



SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan, terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien;
- b. mewujudkan adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c. pedoman dalam penyusunan visi dan misi calon kepala daerah; dan
- d. pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 4

- (1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
 - d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
 - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan; dan/atau
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi:
 1. terjadinya bencana alam;
 2. goncangan politik;
 3. krisis ekonomi;
 4. konflik sosial budaya;
 5. gangguan keamanan;

6. pemekaran Daerah; atau
 7. perubahan kebijakan nasional.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diubah apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Pasal 6

- (1) RPJPD mencakup visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dan sasaran pokok yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur.
- (2) Substansi RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Desember 2024
BUPATI BLITAR,

Ttd.

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

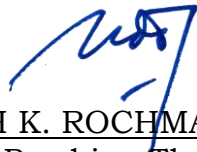
Ttd.

IZUL MAROM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 10/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 283-10/2024

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH K. ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah serta merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 merupakan pelaksanaan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan selama 20 tahun ke depan.

Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. RPJPD Kabupaten Blitar digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Blitar pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah

kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. RPJPD disusun melalui proses partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dengan demikian perencanaan yang disusun merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pemerintah
Kabupaten Blitar



RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

2025-2045

KABUPATEN BLITAR





BAB - I



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sehat dan bersih perlu diterapkan *good governance* didalam praktik penyelenggaraannya. *Good governance* merupakan aspek yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya melalui lembaga formal dan informal. Untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih serta akuntabel, pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya yang efektif serta dukungan dukungan sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Dengan demikian, penerapan *good governance* akan mendukung pemerintah pelaksanaan pembangunan dan pemerataan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses yang sistematis untuk merumuskan rencana, strategi, dan program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk suatu. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan



tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat (3) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 Ayat (1). Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama, kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arah bagi cita-cita pembangunan beserta strategi dan cara pencapaiannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 Ayat (1), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional. Oleh karena itu, RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 merupakan bagian terintegrasi dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJP Nasional. RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat Kabupaten Blitar. Hal ini dikarenakan RPJPD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah selama dua puluh tahun. RPJPD juga memuat visi, misi, dan arah



pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 akan dijadikan sebagai acuan dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan perencanaan lima tahunan dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6) tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



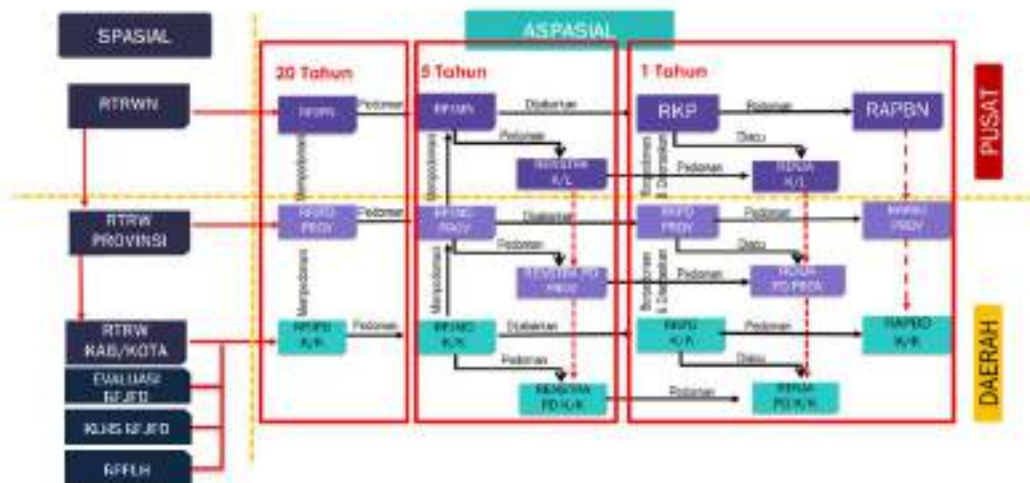
- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



- Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah terdapat beberapa dokumen perencanaan yang harus dipedomani, mencakup Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyelarasan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Adapun keterkaitan antara RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan lainnya diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan gambar diatas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar, dirumuskan secara holistik dan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur maupun kebijakan pembangunan wilayah yang termuat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang berbatasan dan/atau yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Blitar.

RPJPD berpedoman pada substansi (1) tujuan penataan ruang wilayah; (2) rencana struktur ruang kota, yang memuat rencana pembangunan perwilayahan dan pembangunan jaringan infrastruktur kota; (3) rencana pola ruang RPJPD Kabupaten Blitar 2025-2045 yang memuat penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya; serta (4) pelibatan masyarakat dalam penataan ruang kota. Dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 antara lain:

1. Dokumen RPJP Kabupaten Blitar 2025-2045 mengacu pada dokumen RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur.
2. Dokumen RPJP Kabupaten Blitar 2025-2045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar.
3. RPJMD Kabupaten Blitar merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.



4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan pembangunan daerah perlu selaras dengan pembangunan nasional dan pembangunan antar wilayah. Di samping itu, pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan juga penting untuk dipastikan kesinambungannya untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keberlangsungan lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keterkaitan antar wilayah.

Penyusunan RPJPD juga harus memperhatikan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD yang merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang dimaksud, khususnya Pasal 15, mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan KLHS. Hal ini dimaksudkan memastikan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita



dan tujuan sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kabupaten Blitar.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar dan pedoman penyusunan RPJMD.
2. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Blitar, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Blitar;
4. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan; dan
5. Menjamin terciptanya konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan RPJPD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum



penyusunan, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Bab ini diuraikan tentang gambaran umum yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Pada bab ini juga akan diuraikan capaian pembangunan Kabupaten Blitar selama periode RPJPD sebelumnya. Pada bagian ini juga memuat tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik hingga pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang permasalahan utama yang merupakan kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Dalam bab ini juga diuraikan isu-isu strategis daerah yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Pada bab ini akan dijelaskan terkait visi yang merupakan kondisi daerah yang ingin diwujudkan hingga tahun 2045 dan misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini akan dijelaskan terkait dengan arah kebijakan yang merupakan tahapan capaian pembangunan per lima tahun



dalam rangka pencapaian visi daerah. Selain itu, akan dijelaskan sasaran pokok yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD empat periode kedepan. Bab ini juga menjelaskan bagaimana masa peralihan dokumen ini diwaktu yang akan datang, pengendalian dan evaluasi serta mekanisme perubahannya.



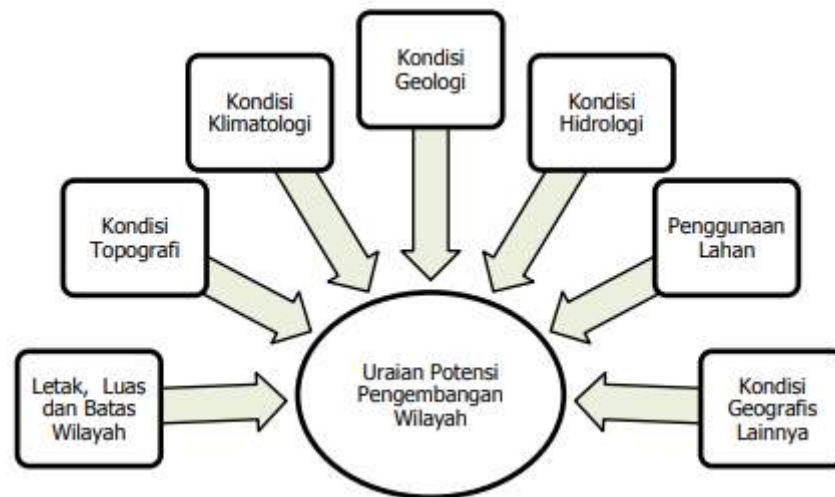
BAB - II

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Bagian ini dimulai dengan memperkenalkan analisis dan dilanjutkan dengan menjelaskan kondisi geografis umum daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat diperkaya dengan penggunaan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya di daerah tersebut. Selain itu, penjelasan perlu disertai dengan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara kondisi geografi daerah dan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sesuai kebutuhan. Berikut Kerangka Pemikirannya :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikutnya, diuraikan mengenai kondisi demografi, termasuk ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk mengalami perubahan seiring waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, dan proses penuaan. Analisis demografi dapat merujuk pada populasi secara menyeluruh atau



kelompok spesifik, berdasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

2.1.1 Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur bagian selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung, diketahui bahwa luas dari wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.744,32 km² dan terbagi menjadi 22 Kecamatan, 220 Desa dan 28 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

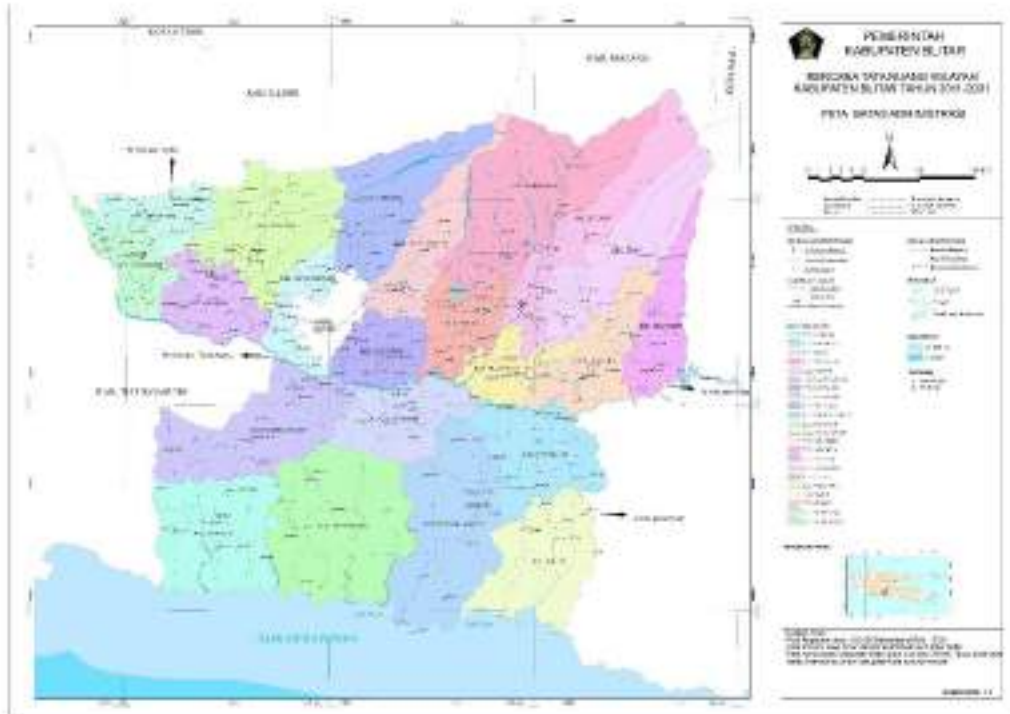
Tabel 2.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Blitar

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Bakung	102,55	5,88
2.	Wonotirto	148,80	8,53
3.	Panggungrejo	132,58	7,60
4.	Wates	91,85	5,27
5.	Binangun	78,78	4,52
6.	Sutojayan	66,83	3,83
7.	Kademangan	110,90	6,36
8.	Kanigoro	45,32	2,60
9.	Talun	52,50	3,01
10.	Selopuro	37,94	2,17
11.	Kesamben	62,09	3,56
12.	Selorejo	62,77	3,60
13.	Doko	96,03	5,51
14.	Wlingi	78,15	4,48
15.	Gandusari	140,18	8,04
16.	Garum	62,75	3,60
17.	Nglegok	93,17	5,34

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
18.	Sanankulon	35,77	2,05
19.	Ponggok	106,54	6,11
20.	Srengat	54,60	3,13
21.	Wonodadi	43,03	2,47
22.	Udanawu	41,20	2,36
Jumlah		1.744,32	100,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tabel di atas, Wonotirto merupakan wilayah terluas dengan luas wilayah 148,80 km² atau 8,53% dari keseluruhan luas wilayah kabupaten, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Sanankulon dengan luas 35,77 km² dengan persentase terhadap luas kabupaten sebesar 2,05%.



Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Blitar
Sumber: RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031

Apabila dilihat secara geografis, letak Kabupaten Blitar



berada antara 111°40'-112°10' Bujur Timur dan 7°58'-8°9'5" Lintang Selatan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Blitar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia
- b) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- c) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Malang
- d) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Bentuk Wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah dataran rendah, pegunungan, daerah aliran sungai dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dengan adanya Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi di sebelah timur. Pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada di bagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi 2 bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan. Sungai Brantas merupakan muara dari sungai-sungai utama yang mengalir dari bagian utara Kabupaten Blitar seperti Sungai Lekso, Sungai Putih dan sebagainya. Pada bagian selatan, terbentang dari timur ke barat wilayah pesisir Kabupaten Blitar sepanjang 45 Km menghadap Samudera Indonesia.

2.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Blitar memiliki ketinggian wilayah ± 167 meter, dengan pembagaian wilayah sebagai berikut:

- 1) Wilayah Utara, memiliki kemiringan berkisar 2%-15%, 15%-40% dan lebih besar daripada 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini termasuk dari bagian wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.



- 2) Wilayah Tengah, adalah daerah yang dapat dikatakan sebagai daerah yang relatif datar dengan tingkat kemiringan 0-20%. Bagian timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata antara 2-15%.
- 3) Wilayah Selatan, sebagian besar wilayah ini merupakan wilayah perbukitan dengan tingkat kemiringan pada 15%-40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini berada di sekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

2.1.3 Kondisi Geologi

Wilayah Kabupaten Blitar terdiri mempunyai jenis batuan dari satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Satuan batuan gamping banyak dijumpai di wilayah Selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir mencapai 20%, terdiri dari batuan gamping terumbu yang tersebar di Kecamatan Bakung, Wonotirto sebagian Kecamatan Panggungrejo dan sebagian Kecamatan Wates. Sementara itu, satuan batuan campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tuva dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan konlomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan, sebagian Kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro dan Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava lahar breksi dan lava andesit sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian utara wilayah Kabupaten Blitar dengan jumlah \pm 50% dari luas wilayah Kabupaten Blitar.

2.1.4 Kondisi Sumber Daya Air (Hidrologi)

Kondisi sungai di wilayah Kabupaten Blitar mempunyai pola yang khas antara wilayah utara dengan selatan. Wilayah utara



sungai Brantas membentuk pola aliran (*drainase system*) radial, yang mana anak sungai dan sungai- sungai utamanya seolah-olah berpusat pada Gunung Kelud dan Gunung Butak, kemudian menyebar keluar dan bermuara di Sungai Brantas. Di sisi lain, sungai-sungai dan anak sungai di wilayah selatan sebagian besar bermuara di Samudera Indonesia dan hanya sebagian kecil (di sekitar Kecamatan Binangun) bermuara di Sungai Brantas. Sumber- sumber mata air utama di Kabupaten Blitar dengan debit air cukup besar terdapat di Kecamatan Srengat, Gandusari, Wlingi, dan Kesamben. Sedangkan sumber air lainnya relatif kecil (rata-rata < 5 liter/detik) terletak di Kecamatan Kesamben, Kademangan, Sutojayan dan Bakung.

2.1.5 Kondisi Iklim (*Klimatologi*)

Kabupaten Blitar mempunyai kondisi iklim dengan kategori C.3, yaitu iklim tropis yang ditandai mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau umumnya berlangsung antara bulan Juni hingga bulan Oktober. Sementara itu, musim penghujan berlangsung pada bulan bulan November hingga bulan Mei. Kondisi klimatologi di Kabupaten Blitar Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Curah Hujan (mm) dan Jumlah Hari Hujan (hari) di Kabupaten Blitar Tahun 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan Terkecil (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matarahari (hari)
Januari	187,5	19	4
Februari	336,5	25	2,4
Maret	212	17	5,6
April	183,5	21	3,1
Mei	10,4	8	6
Juni	73	9	5,3
Juli	106,5	9	6,4
Agustus	0	0	5,7



<i>September</i>	9	3	6
<i>Oktober</i>	13,6	3	8
<i>November</i>	80,80	9	7,8
<i>Desember</i>	128,90	14	7,7

Sumber: BPS (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2023).

Berdasarkan tabel di atas, kondisi curah hujan di Kabupaten Blitar terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 0 mm, sedangkan kondisi curah hujan tertinggi terjadi di bulan Februari sebesar 336,5 mm. Kondisi iklim Kabupaten Blitar juga dilihat dari banyaknya hari hujan pada setiap bulan dalam jangka waktu setahun. Kondisi hujan di Kabupaten Blitar paling sedikit terjadi di bulan Agustus, sebanyak 0 hari atau tidak terjadi hujan sama sekali pada bulan tersebut. Kemudian hujan di Kabupaten Blitar paling sering terjadi di bulan Februari, sebanyak 25 hari atau hampir setiap hari dalam bulan tersebut terjadi hujan.

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Blitar pada Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Blitar Tahun 2023

Penggunaan Lahan	Persentase
<i>Sawah</i>	19,62
<i>Tegal/ Kebun</i>	32,10
<i>Ladang/Huma</i>	0,02
<i>Perkebunan</i>	7,97
<i>Hutan Rakyat</i>	3,40
<i>Padang Penggembalaan/Padang Rumput</i>	0,01
<i>Hutan Negara</i>	6,30
<i>Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dll)</i>	26,18
<i>Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, dll)</i>	4,31
<i>Sementara tidak diusahakan</i>	0,08

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 2024.

Lahan di Kabupaten Blitar sebagian besar dimanfaatkan



untuk lahan tegal/kebun dengan proporsi sebesar 32,10% dari luas wilayah. Sementara itu, untuk penggunaan lahan yang bukan pertanian, yaitu jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll sebesar 26,18% dari luas wilayah. Penggunaan lahan Sawah di Kabupaten Blitar sebesar 19,62%. Pemanfaatan lahan lainnya digunakan untuk ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, padang penggembalaan, hutan negara, serta lahan tambak/kolam/ empang.

2.1.7 Kawasan Rawan Bencana

Topografi Kabupaten Blitar mencakup berbagai elemen penting yang mencirikan kondisi geografisnya. yang terdiri dari pegunungan. dataran. dan pesisir. Secara geografis. Kabupaten Blitar terletak di bagian selatan Jawa Timur. dengan sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. sehingga sepanjang sisi selatan terdapat garis pantai yang panjang. Kondisi topografis yang beragam ini memberikan potensi yang besar untuk pengembangan wilayah Kabupaten Blitar. sekaligus menimbulkan berbagai dampak negatif yang terkait dengan potensi bencana alam.

Pegunungan yang terdapat di wilayah utara Kabupaten Blitar seperti Gunung Kelud, Gunung Kombang, dan Gunung Butak memberikan panorama alam yang indah serta potensi untuk pariwisata dan kegiatan luar ruangan lainnya. Namun, wilayah pegunungan ini juga rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan erupsi gunung api. Dataran yang meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Blitar, terutama di bagian tengah. memberikan kondisi yang cocok untuk pertanian dan permukiman manusia. Namun dataran ini juga dapat mengalami risiko banjir terutama saat musim hujan akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Sementara itu, garis pantai yang membentang di sepanjang sisi selatan Kabupaten Blitar memberikan potensi ekonomi melalui



sektor pariwisata dan perikanan. Namun, wilayah pesisir juga rentan terhadap bencana alam akibat perubahan iklim maupun kerusakan ekosistem pantai. Sementara topografi Kabupaten Blitar memberikan potensi yang positif bagi pengembangan wilayah. pemahaman yang mendalam tentang berbagai dampak negatif yang terkait dengan kondisi geografisnya menjadi penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2024-2029, risiko bencana di Kabupaten Blitar diantaranya:

1) Gempa Bumi

Bahaya gempa bumi dapat didefinisikan sebagai suatu ancaman berupa intensitas guncangan di permukaan tanah pada saat terjadi gempabumi sehingga mengakibatkan kerusakan bangunan/infrastruktur yang dapat menimbulkan korban. Daerah rawan gempa bumi dengan potensi bahaya kelas “tinggi” meliputi 15 kecamatan, yaitu: Binangun, Gandusari, Kademangan, Kanigoro, Nglegok, Panggungrejo, Ponggok, Sanankulon, Selopuro, Srengat, Sutojayan, Talun, Udanawu, Wates, dan Wonodadi.



Gambar 2.1 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Blitar
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

2) Tsunami

Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh macam-macam gangguan di dasar samudra. Menurut catatan historis kejadian Tsunami, Kabupaten Blitar pernah mengalami Tsunami karena termasuk wilayah berimbas dari Kejadian Tsunami di lokasi lain yaitu pada Tahun 1921 yang melanda Kabupaten Jember dan Tahun 1994 dengan kekuatan gempa 7.2 SR yang melanda Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Blitar memiliki garis pantai sepanjang 45 km dengan historis kejadian tsunami menjadikan Kabupaten Blitar termasuk dalam kawasan rawan bencana Tsunami. Daerah rawan bencana tsunami berada di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Blitar, meliputi Kecamatan Wates, Panggungrejo, Wonotirto, dan Bakung. Adapun desa yang berpotensi terjadinya bencana tsunami di Kabupaten Blitar

diantaranya adalah Desa Serang Kecamatan Panggungrejo, Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto, Desa Ringinrejo Kecamatan Wates, dan Desa Bululawang Kecamatan Bakung yang berbatasan langsung garis pantai.



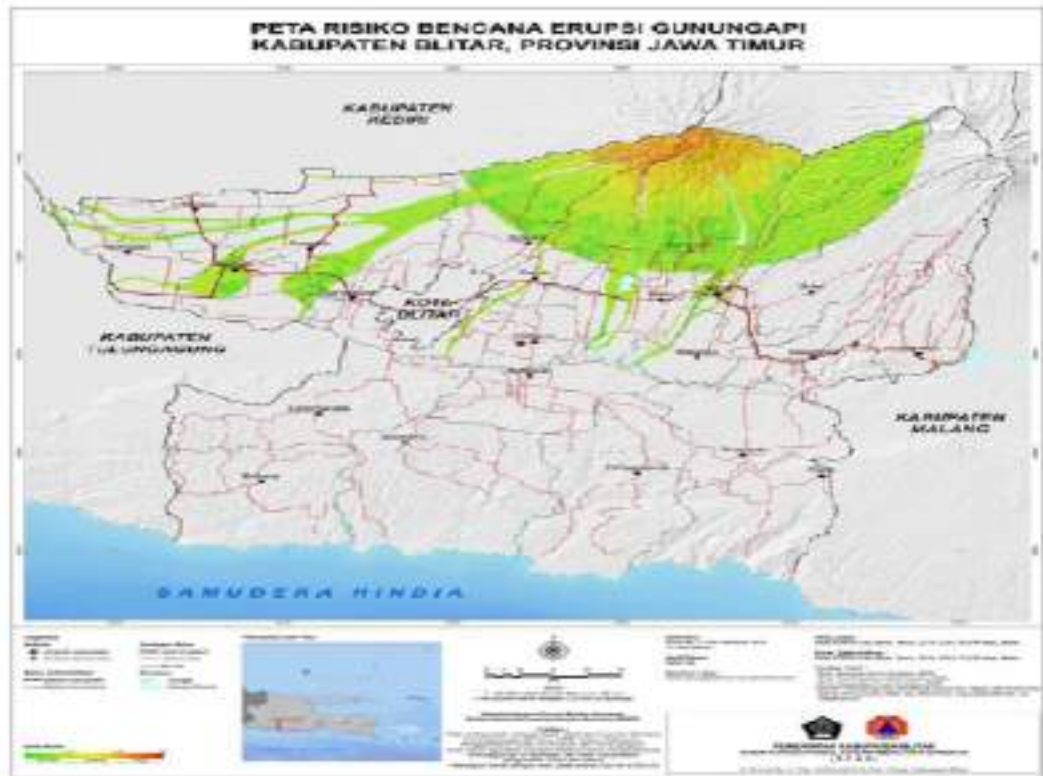
Gambar 2.2 Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Blitar

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

3) Gunung berapi

Bencana gunungapi adalah salah satu bencana alam yang disebabkan oleh letusan atau kegiatan gunungapi yang mengakibatkan kerusakan tata lingkungan hidup dan penderitaan manusia. Peta kawasan rawan bencana gunungapi adalah peta petunjuk tingkat kerawanan bencana suatu daerah apabila terjadi letusan/aktivitas gunungapi. Kabupaten Blitar memiliki satu gunungapi aktif yaitu Gunung Kelud. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Gandusari

yaitu seluas 8.608,41 Ha atau sekitar 30,89 % dari total luas wilayah bahaya Erupsi Gunungapi Kelud.



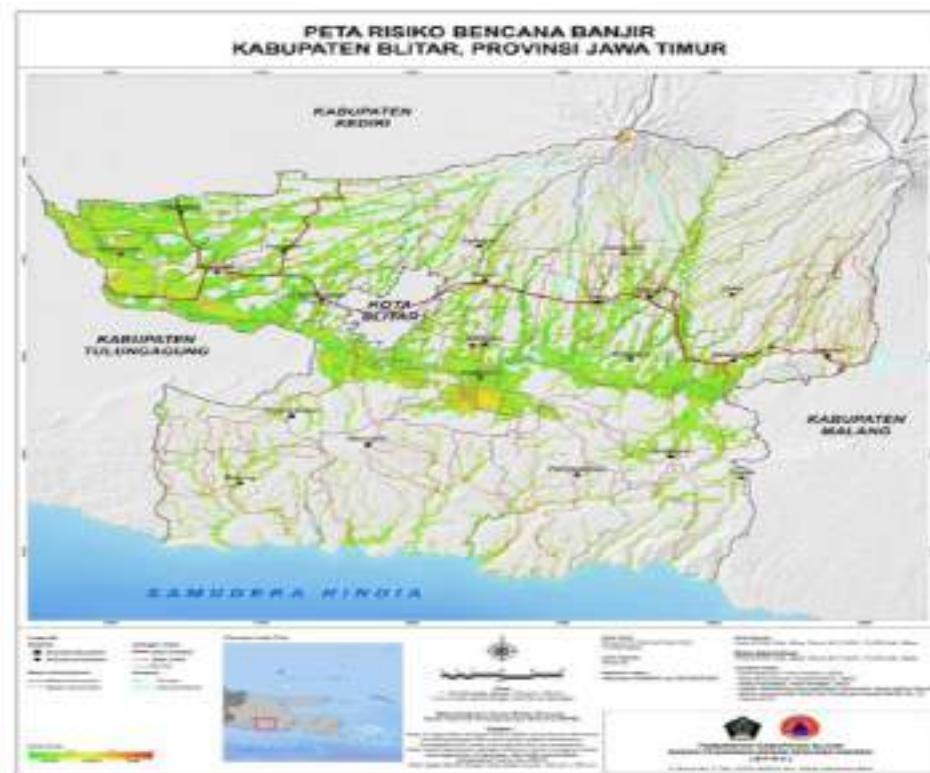
Gambar 2.3 Peta Risiko Bencana Erupsi Gunung Berapi Kabupaten Blitar

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

4) Banjir

Faktor penyebab terjadinya banjir dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah dan banjir yang diakibatkan oleh tindakan manusia. Banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah diantaranya curah hujan, pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai dan pengaruh air pasang. Banjir yang disebabkan oleh tindakan manusia disebabkan oleh perubahan kondisi DAS, kawasan kumuh, sampah, kerusakan bangunan pengendali banjir dan perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat. Berdasarkan bentuk topografi Kabupaten Blitar, wilayah Kabupaten Blitar yang sering mengalami bencana banjir

adalah Kecamatan Sutojatan. Banjir yang pernah terjadi di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar disebabkan oleh adanya sedimentasi yang terbawa oleh air hujan dan menyebabkan pendangkalan sungai, sehingga terjadi luapan air pada saat musim penghujan. Kecamatan Sutojayan juga merupakan wilayah hilir sungai yang bermuara di perbukitan di bagian selatan dari wilayah ini.

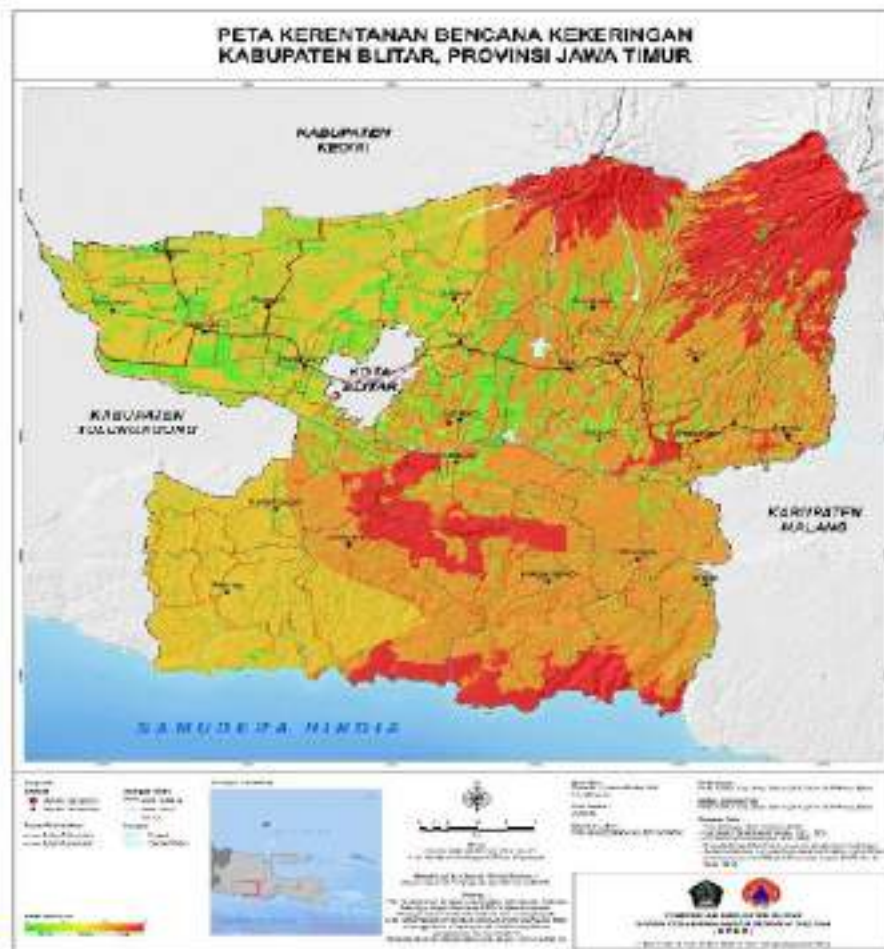


Gambar 2.4 Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Blitar

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

5) Kekeringan

Kekeringan di Kabupaten Blitar terjadi di Kabupaten Blitar sering terjadi pada wilayah selatan yaitu dengan wilayah yang memiliki formasi geologi wonosari dan di dominasi oleh batuan kapur. Beberapa wilayah dengan risiko bencana kekeringan yang tinggi yaitu Kecamatan Binangun, Kademangan, Kesamben, Selorejo, dan Wates.



Gambar 2.5 Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Blitar
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

6) Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu tipe gerakan tanah yang bersifat cepat proses kejadiannya sehingga tergolong tipe bencana Rapid on-set. Gerakan tanah adalah perpindahan massa tanah atau batuan pada arah tegak, datar, atau miring dari kedudukannya semula, yang terjadi bila ada gangguan kesetimbangan pada saat itu. Berdasarkan data kejadian tanah longsor di Kabupaten Blitar Tahun Tahun 2014 - 2023, tanah longsor atau gerakan merupakan salah satu bencana yang sering terjadi setiap Tahunnya, tercatat kejadian tanah longsor terjadi 184 kali selama rentang waktu Tahun 2014 - 2023, terdapat tipe longsor yang sering terjadi di Kabupaten

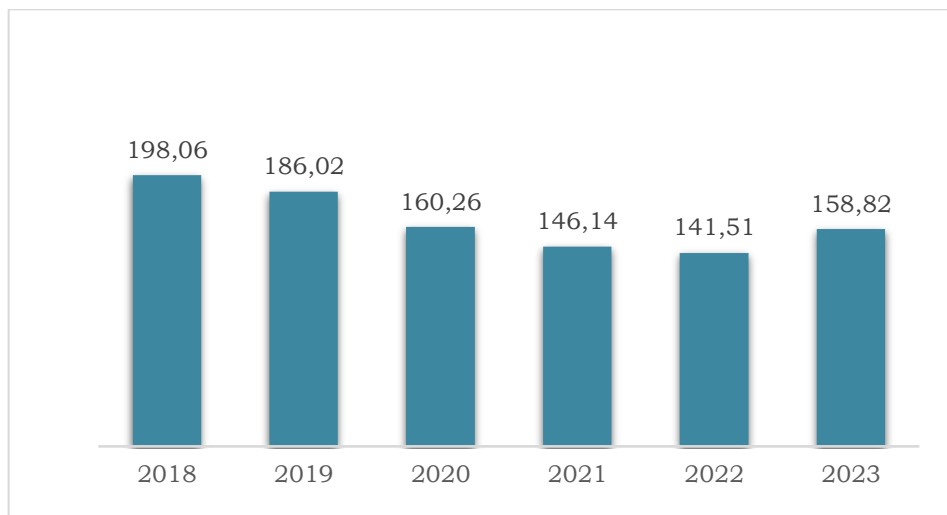
Blitar yaitu tipe gelinciran dan tipe rayapan tanah, hal ini dikarenakan wilayah dengan potensi bahaya tanah longsor merupakan daerah dengan bentuklahan dan jenis tanah perbukitan berbeda.



Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Blitar
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

Bagian utara Kabupaten Blitar yang memiliki potensi tanah longsor tersusun dari formasi geologi Mandalika (Tomm) dengan material penyusun dari lava andesit-basal, latit pofirit, riolit, dan dasit yang di pengaruhi oleh adanya gunung api, kemiringan lereng menjadi salah satu faktor penyebab dari adanya potensi tanah longsor di wilayah Kabupaten Blitar daerah utara serta adanya curah hujan yang di pengaruhi oleh adanya wilayah pegunungan. Sedangkan, untuk wilayah Kabupaten Blitar bagian selatan memiliki tipe longsoran rayapan tanah atau pergerakan secara perlahan namun masif, hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Blitar Selatan merupakan dengan formasi geologi wonosari (Tmwl) dan

anggota Tuf Formasi Mandalika (Tomt) dengan material penyusun dari batu gamping dan umumnya batu apung, dengan fisiografi berupa bukit lipatan dengan tekstur tanah lempung sehingga berpotensi terjadinya gerakan tanah. Beberapa wilayah dengan tingkat risiko tanah longsor kelas “tinggi” yaitu Garum, Nglegok, dan Wlingi, sedangkan dengan tingkat risiko kelas “sedang” mencakup 11 kecamatan mencakup Bakung, Binangun, Doko, Gandusari, Kademangan, Kesamben, Panggungrejo.



Gambar 2.7 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2018-2023

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, SK Hasil Evaluasi Rancangan RPJPD 2025-2045.

Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Blitar pada tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung menurun, Pada tahun 2018 IRB Kabupaten Blitar sebesar 198,06 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 141,51. Perkembangan kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya mitigasi bencana di Kabupaten Blitar semakin baik ditunjukkan tingkat risiko terhadap terjadinya bencana. Namun, berdasarkan hasil pemutakhiran data Indeks Risiko Bencana, nilai

Dalam pengukuran IRB, setiap daerah juga melakukan penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD ini merupakan penilaian kapasitas penanggulangan bencana di suatu daerah.



Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) dan selanjutnya juga dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana. Di Kabupaten Blitar, risiko bencana tidak bisa dihindari karena sebagian wilayahnya memiliki risiko bencana. Kondisi geologi dan geografi Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng raksasa, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta berada dalam wilayah cincin api (*Ring of Fire*) menyebabkan ratusan gunung api dan juga zona subduksi yang menjadi pusat-pusat gempa bumi tersebar di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Blitar. Sementara itu, dari sisi hidrometeorologi, Kabupaten Blitar terancam bencana longsor dan banjir. Semakin tinggi tingkat kerentanan daerah dan semakin rendahnya ketahanan membuat semakin tingginya risiko terhadap bencana. Nilai IKD Kabupaten Blitar selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif yaitu semakin meningkat, menunjukkan tingkat ketahanan bencana yang semakin baik.

Tabel 2.4 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
IKD Kabupaten Blitar	0,43	0,52	0,56	0,58	0,60
IKD Kabupaten/Kota	0,47	0,52	0,56	0,58	0,61

Sumber: Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Nomor:360/0128/208.2/2024 tentang Penyampaian IKD dan IRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

2.1.8 Potensi Penggunaan Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kabupaten Blitar mempunyai potensi yang melimpah dan beragam. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, Kabupaten Blitar masuk ke dalam beberapa rencana pengembangan wilayah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan hortikultura (sentra penghasil pisang, rambutan, dan belimbing);



- 2) Pengembangan kawasan perkebunan (tebu, kopi, kakao, kelapa, dan nilam);
- 3) Pengembangan kawasan sentra peternakan besar (ternak besar dan peternakan unggas); dan
- 4) Pengembangan kawasan perikanan, meliputi perikanan air tawar (budidaya ikan hias), dan perikanan air laut.

Sektor pertanian menjadi kegiatan yang mempunyai peran utama dalam tumbuh kembangnya perekonomian di Kabupaten Blitar, dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah dan unggulnya potensi pertanian Kabupaten Blitar. Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan mencapai 19,62% dari luas wilayah, belum termasuk untuk kegiatan perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan.

Di sisi lain, sektor peternakan khususnya produksi telur unggas Kabupaten Blitar secara terus-menerus menyumbang hampir sepertiga produksi telur di wilayah Jawa Timur. Produk lain yang dihasilkan dari sektor perternakan ini adalah daging ayam dan susu. Selain sektor pertanian, Kabupaten Blitar juga mempunyai potensi perikanan yang cukup besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Potensi perikanan tangkap sangat menjanjikan, karena wilayah Kabupaten Blitar langsung berbatasan dengan Samudra Indonesia di bagian Selatan. Sementara itu, sektor perikanan budidaya ikan hias di Kabupaten Blitar terkenal dengan komoditas ikan koi, dengan pusat budidaya ikan koi terletak di Kecamatan Nglegok yang telah diakui secara nasional sebagai salah satu sentra ikan koi berkualitas di Indonesia.

Sektor perdagangan juga berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Blitar dapat dipenuhi dengan layak. Komoditas unggulan lain Kabupaten Blitar diantaranya meliputi gula kelapa, minyak atsiri (kenanga dan



nilam), serta kerajinan batok kelapa yang telah menembus pasar nasional.

Berdasarkan peta geologi yang disusun oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir.

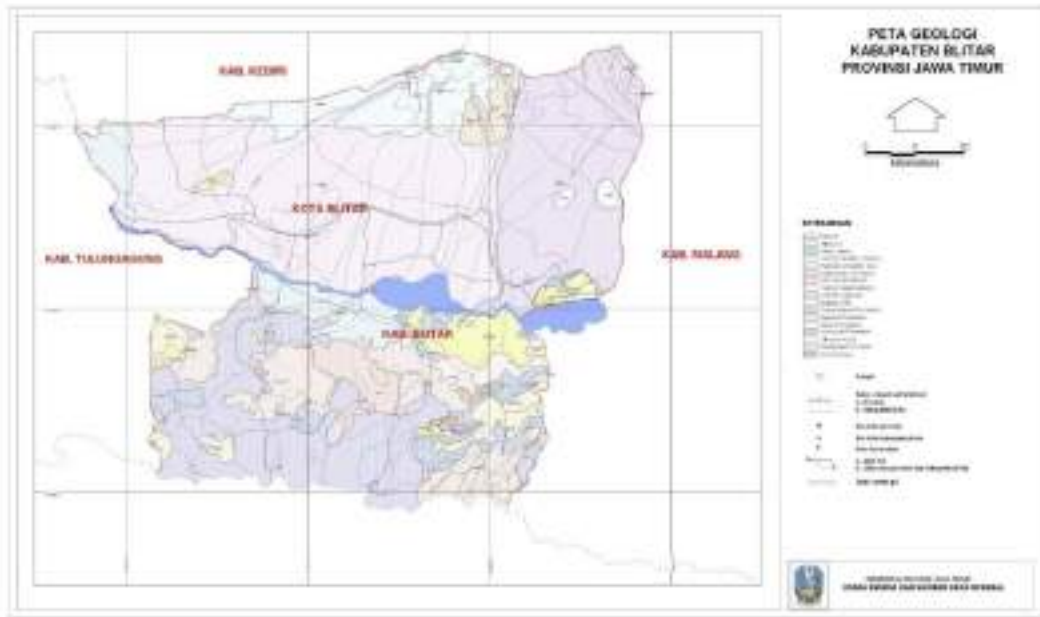
- a) Satuan batuan gamping banyak dijumpai di wilayah Selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir mencapai 20%, terdiri dari batuan gamping terumbu yang tersebar di Kecamatan Bakung, Wonotirto sebagian Kecamatan Panggungrejo dan sebagian Kecamatan Wates.
- b) Satuan batuan campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tufa dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan konlomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan, sebagian Kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro dan Ponggok.
- c) Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava lahar breksi dan lava andesit sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian utara wilayah Kabupaten Blitar dengan jumlah \pm 50% dari luas wilayah Kabupaten Blitar.

Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Blitar sebagian besar berada di bagian selatan dan telah dieksploitasi, yaitu:

1. Kaolin di Kecamatan Bakung dan Sutojayan;
2. Ball Clay di Kecamatan Sutojayan, Bentoit di Kecamatan Binangun;
3. Batu Bintang di Kecamatan Binangun, Panggungrejo, Winotirto dan Sutojayan;
4. Batu Tufa di Kecamatan Wates;
5. Felspar di Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Panggungrejo;

dan

6. Pasir besi di Kecamatan Bakung dan Panggungrejo.



Gambar Peta Geologi Kabupaten Blitar
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Blitar 2025-2045

2.1.10 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) merupakan jumlah populasi atau kelompok yang dapat didukung oleh sumberdaya dan jasa yang tersedia dalam lingkungan. Faktor yang berpengaruh terhadap keterbatasan lingkungan untuk mendukung kehidupan adalah faktor jumlah sumberdaya yang tersedia, jumlah populasi dan pola konsumsinya. Daya dukung lingkungan dalam aspek lingkungan berhubungan dengan modal alam. Namun, dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), suatu kelompok tidak hanya memiliki modal alam, akan tetapi juga modal manusia, modal sosial dan modal lingkungan buatan. Oleh karena itu, berkaitan dengan keberlanjutan suatu kota, daya dukung lingkungan kota merupakan jumlah populasi atau komunitas yang dapat didukung oleh sumberdaya dan jasa yang tersedia karena terdapat modal alam, manusia, sosial dan lingkungan buatan yang dimilikinya.



Daya dukung dan daya tampung daerah Kabupaten Blitar dijelaskan sebagai berikut.



Tabel 2.5 Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Blitar

No.	Daya Dukung dan Daya Tampung	Keterangan
1.	Ambang batas dan status daya dukung penyedia bahan pangan	<p>Mayoritas kecamatan yang mempunyai jasa ekosistem penyedia pangan sedang dan rendah berada di sebelah selatan. Diantaranya adalah Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Kademangan, dan sebagian Kecamatan Sutojayan. Wilayah Kabupaten Blitar sebelah utara, Kecamatan yang tergolong pada kecamatan dengan jasa ekosistem penyedia pangan sangat rendah yaitu Kecamatan Gandusari bagian utara, Kecamatan Doko bagian utara, dan Kecamatan Wlingi bagian utara. Wilayah bagian tengah merupakan daerah dengan jasa ekosistem penyedia pangan tinggi dan sangat tinggi, dengan sedikit wilayah yang berstatus rendah. Kecamatan yang berada di bagian tengah wilayah kabupaten adalah Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Srengat, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanan Kulon, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Gandusari bagian selatan, Kecamatan Wlingi bagian selatan, dan Kecamatan Doko bagian selatan.</p> <p>Berdasarkan pengkajian berkaitan dengan daya dukung pangan Kabupaten Blitar memiliki 10 kecamatan dengan kondisi daya dukung pangan sangat rendah, yakni pada kecamatan Bakung, Binangun, Kademangan, Kanigoro, Panggungrejo, Sanan Kulon, Srengat, Sutojayan, Wates dan Wonotirto. 7 daerah dengan kategori sedang yakni pada kecamatan gandusari, Kesambem, Ponggok, Selopuro, Talun, Wlingi, Wonodadi dan 5 Kecamatan yang memiliki kategori daya dukung pangan tinggi yakni pada kecamatan Doko, Garum, Nglegok, Selorejo, Udanawu. Sebaran daerah yang memiliki jasa ekosistem pangan tinggi terletak membentak dari sisi timur ke barat di bagian tengah Kabupaten Blitar terutama Blitar bagian utara dimana kondisinya berdekatan dengan Gunung kelud dengan kontur dan topografi tinggi dan jenis tanah aluvial dengan campuran abu vulkanis serta kondisi topografi dengan cuaca sejuk.</p>
2.	Ambang batas dan status daya dukung penyedia air bersih	Terdapat 6 Kecamatan yang mempunyai status daya dukung penyedia air bersih rendah, sedangkan satu kecamatan berstatus sedang, dan 15 kecamatan mempunyai status daya dukung penyedia air bersih tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa secara umum



No.	Daya Dukung dan Daya Tampung	Keterangan
		<p>kemampuan penyedia air bersih di Kabupaten Blitar telah mencukupi. Namun bagi kecamatan yang berstatus daya dukung penyedia air bersihnya kurang, perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah. penyaluran air bersih ke kecamatan tersebut dapat dilakukan dengan memperluas jaringan distribusi air bersih.</p> <p>Mayoritas Kecamatan yang mempunyai jasa penyedia air bersih sedang berada di wilayah Kabupaten Blitar bagian selatan. Kecamatan yang berada di wilayah tersebut adalah Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Kademangan, dan Kecamatan Sutojayan bagian selatan. Sedangkan pada Kabupaten Blitar bagian tengah, merupakan wilayah yang mempunyai jasa penyedia jasa air bersih bervariasi antara rendah sampai dengan sangat tinggi. Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Blitar bagian tengah adalah Kecamatan Selorejo, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Sanan Kulon, Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Garum, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Gandusari.</p>
3.	Daya Tampung Udara	<p>Status daya dukung penyedia udara bersih atau banyak mengandung oksigen dapat digambarkan dari tutupan lahan berupa perkebunan, hutan produksi, maupun hutan konservasi yang umumnya kerapatan tanaman tinggi. Wilayah dengan penyedia udara bersih yang rendah sampai sedang umumnya dijumpai di bagian tengah dan Selatan wilayah Kabupaten, dimana kawasan permukiman berkembang. Ada 15 kecamatan mempunyai status daya dukung penyedia air bersih tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa secara umum kemampuan penyedia udara bersih di Kabupaten Blitar telah mencukupi. Namun bagi kecamatan yang berstatus daya dukung penyedia udara bersihnya kurang, perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah.</p> <p>Mayoritas Kecamatan yang mempunyai jasa penyedia air bersih sedang berada di wilayah bagian selatan dan tengah. Kecamatan yang berada di wilayah tersebut adalah Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo Kecamatan Wates, Kecamatan Kademangan, dan Kecamatan Sutojayan bagian selatan.</p>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045.

2.1.11 Demografi

Penduduk merupakan semua orang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau orang yang bertempat tinggal kurang dari 6 bulan, namun memiliki tujuan untuk menetap. Penduduk menjadin bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya (*input*) produksi, dan menciptakan permintaan barang dan jasa hasil produksi.

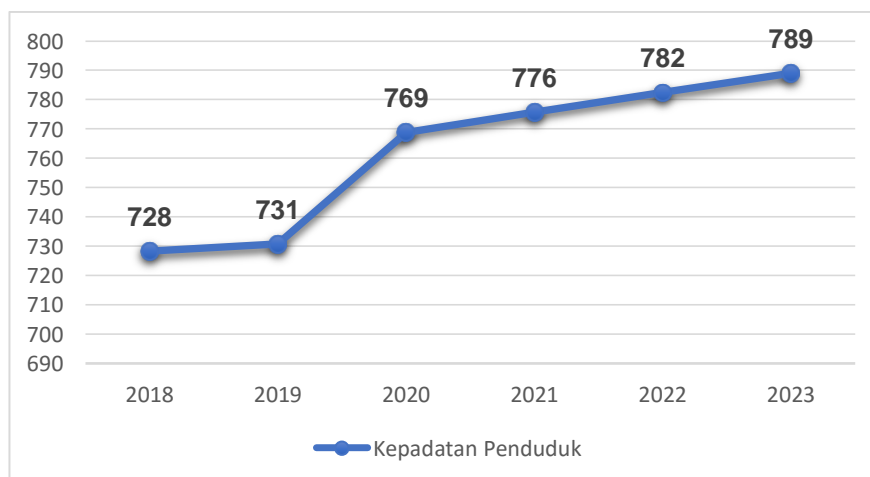
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.160.677	1.164.649	1.231.013	1.240.322	1.253.550
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0.27	0.89	0.89	0.86	0.83
Sex Ratio	100.4	100.37	101.3	101	101

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar periode Tahun 2019 hingga 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar sebesar 0,75%.

2.1.12 Kepadatan Penduduk



Gambar 2.8 Kepadatan Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Apabila pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif, lain halnya dengan perkembangan kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan setiap tahun selama lima tahun terakhir, yaitu mulai Tahun 2018 hingga 2023. Tahun 2018, kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar sebanyak 728 jiwa/km² dan meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 kepadatan penduduk Kabupaten Blitar sebesar 789 jiwa/km².

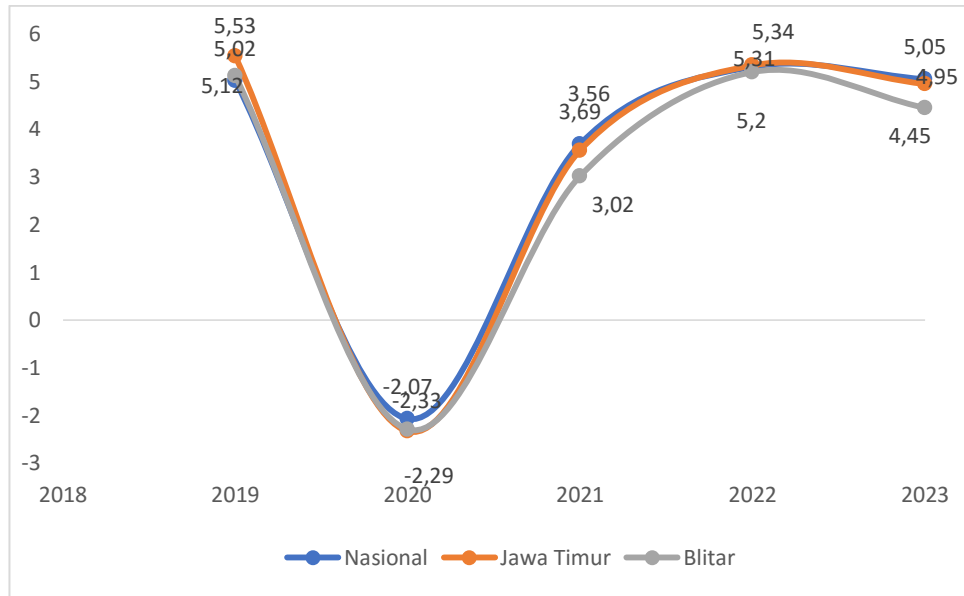
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan secara keseluruhan tidak dapat dinilai hanya dari aspek ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi dapat dianggap sebagai indikator dari dampak kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Pertumbuhan berbagai sektor ekonomi berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi secara keseluruhan. Bagi daerah, indikator ini sangat penting untuk menilai kemajuan pembangunan yang telah dicapai dan berfungsi sebagai panduan untuk pengembangan di masa depan.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.



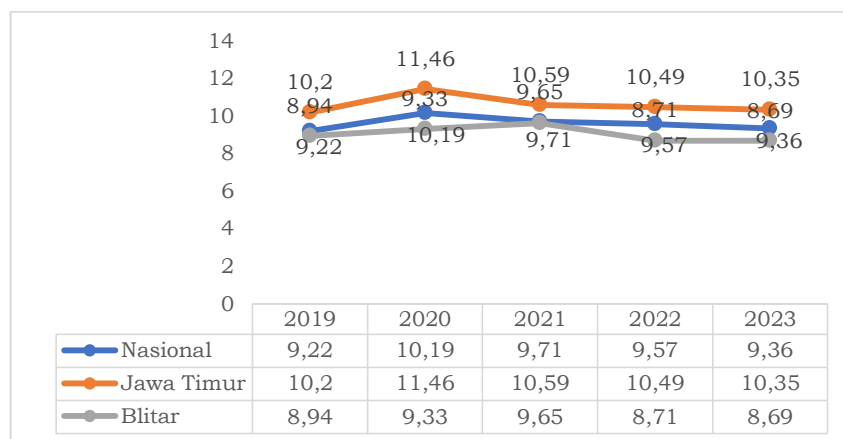
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2024.

Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar sebesar 5,12% yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,10%. Tahun 2020, dampak dari pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi -2,29% dan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 perekonomian berangsur membaik dengan tumbuh positif masing-masing sebesar 3,02% dan 5,20%. Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian bagi Indonesia dan Jawa Timur. Pada kedua wilayah ini pertumbuhan ekonomi melambat, dimana laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melambat dari 5,34% menjadi 4,95% dan Nasional dari 5,31% menjadi 5,05%. Hal yang sama terjadi pula di Kabupaten Blitar, yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 4,45 persen. Namun demikian, ekonomi tahun 2023 di Kabupaten Blitar dapat dikategorikan tumbuh secara berkualitas. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang turut mendorong penurunan pengangguran dan kemiskinan.

2.2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan melibatkan keterbatasan akses terhadap alat pemenuh kebutuhan dasar, kesulitan dalam pendidikan, dan pekerjaan. Permasalahan kemiskinan tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga merupakan tantangan global. Beberapa individu memahami kemiskinan secara relatif dan subjektif, sedangkan yang lain melihatnya dari perspektif moral dan evaluatif. Penanganan masalah kemiskinan, yang merupakan permasalahan kompleks, memerlukan kolaborasi dan koordinasi dari berbagai pihak. Sayangnya, penanganannya cenderung bersifat parsial dan kurang berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat umumnya juga belum optimal. Indeks kemiskinan menjadi alat ukur komposit yang menilai keterbelakangan manusia dalam tiga dimensi, yakni lamanya hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Indeks ini memberikan gambaran mengenai tingkat kemiskinan manusia di suatu wilayah. Berikut grafik persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar:



Gambar 2.10 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023

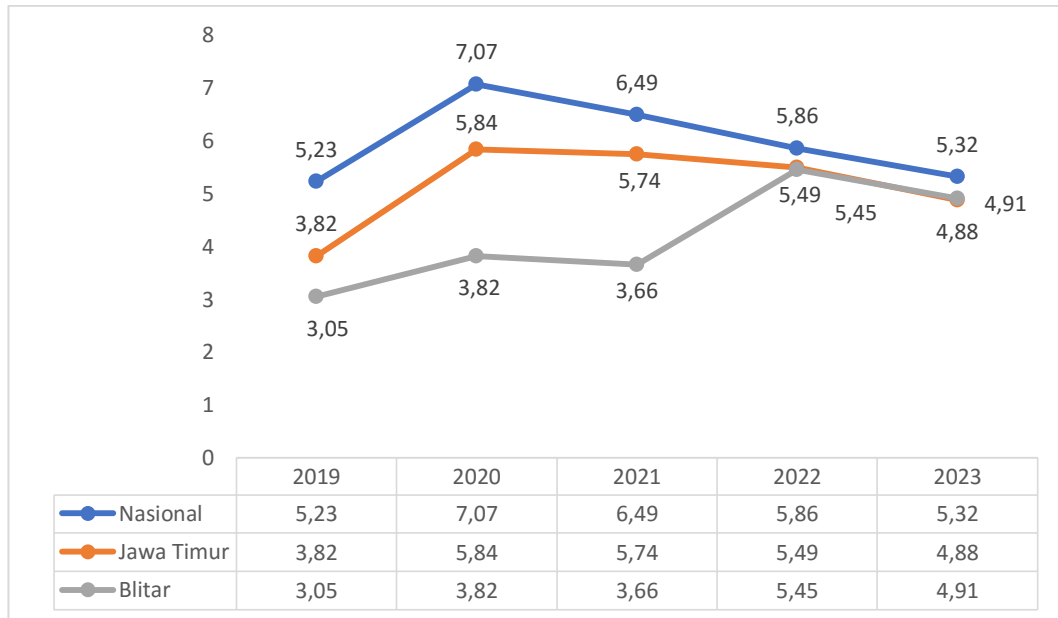
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.



Berdasarkan data yang terlihat pada grafik di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar mengalami penurunan yang signifikan selama periode tertentu. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin turun ke angka 8,69%, dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,71%. Dengan capaian penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2023, Kabupaten Blitar merupakan salah satu diantara 4 (empat) kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah di Jawa Timur. Apabila dilihat dari perbandingannya dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka capaian kinerja tingkat kemiskinan selalu berada dibawah keduanya.

2.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberadaan pengangguran, atau yang disebut sebagai tuna karya, merujuk pada individu yang tidak memiliki pekerjaan, sedang berusaha mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau aktif mencari pekerjaan yang sesuai. Pengangguran umumnya muncul ketika jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja yang dapat menyerap mereka. Pengangguran terbuka mencakup kelompok angkatan kerja yang tidak sedang bekerja atau dalam tahap pencarian pekerjaan, termasuk mereka yang belum pernah bekerja sama sekali, yang sudah memiliki pengalaman kerja, atau sedang mempersiapkan diri untuk memulai usaha sendiri. Beberapa orang mungkin tidak aktif mencari pekerjaan karena merasa sulit untuk menemukan pekerjaan, sementara ada juga yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai tugasnya. Berikut grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).



Gambar 2.11 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

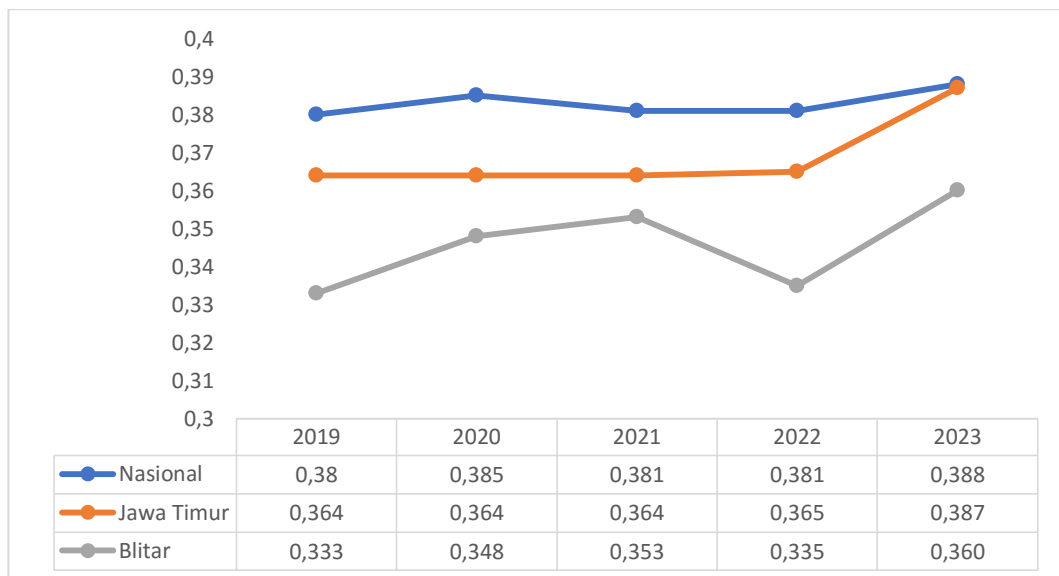
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Berdasarkan gambar di atas, selama lima tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil dari Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Capaian yang baik ditunjukkan dalam pengendalian jumlah penganggur oleh Pemerintah Kabupaten Blitar baik melalui penyelenggaraan job fair, pelaksanaan program padat karya, pelatihan kewirausahaan termasuk pelatihan bagi penyandang disabilitas, pendampingan usaha mikro untuk pengembangan kapasitas dan naik kelas melalui program UM Berdasi (Usaha Mikro Berdaya Saing) dan Wiranita Naik Kelas, dan lain-lain.

Perkembangan ini jelas terlihat melalui angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar yang menunjukkan tren peningkatan, dimana pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di angka 3,05% menjadi 5,45 di tahun 2022 dan di tahun 2023 berhasil turun menjadi 4,91%.

2.2.1.4 Indeks Gini

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah melalui perhitungan koefisien Gini (Gini Ratio). Evaluasi tingkat ketidaksetaraan distribusi pendapatan ini didasarkan pada kriteria berikut: a) Jika nilai koefisien Gini kurang dari 0,4, maka tingkat ketidaksetaraan dianggap rendah, b) Jika nilai koefisien Gini antara 0,4 dan 0,5, tingkat ketidaksetaraannya dianggap sedang, dan c) Jika nilai koefisien Gini lebih dari 0,5, tingkat ketidaksetaraan distribusi pendapatan dianggap tinggi. Dalam Gini Ratio tahun 2014 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar mencapai angka 0,30. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketidaksetaraan di Kabupaten Blitar tergolong rendah karena nilai koefisien Gini berada di bawah 0,4. Berikut adalah grafik indeks gini Kabupaten Blitar tahun 2019-2023.



Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023

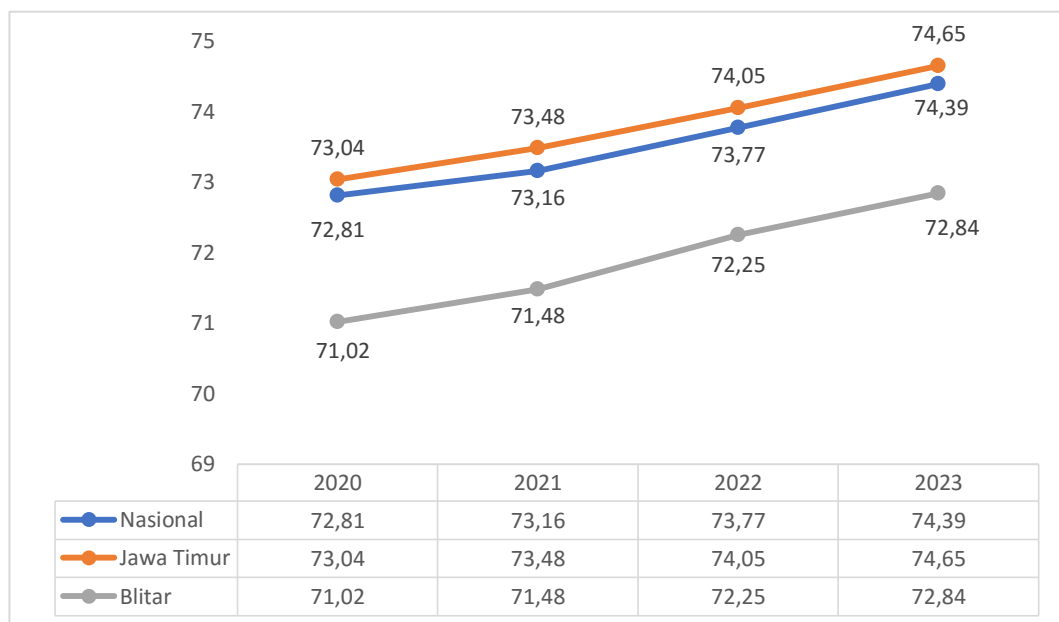
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS RI, 2024.

Indeks Gini Kabupaten Blitar tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan kondisi yang dinamis. Indeks Gini pada tahun

2019 hingga tahun 2021 naik menjadi 0,353 dan menurun di tahun 2022 menjadi 0,335, akan tetapi naik kembali menjadi 0,360 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun nasional, indeks gini di Kabupaten Blitar masih tergolong rendah. Dengan nilai Indeks Gini berada di kisaran $0,3 \leq \text{Gini} \leq 0,5$ maka Kabupaten Blitar masuk ketimpangan Sedang.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah atau wilayah, dengan fokus pada tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan daya beli. IPM dihasilkan dari sejumlah variabel, termasuk angka harapan hidup (AHH), angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak. Melalui nilai IPM, dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai hasil dari upaya pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM pada suatu daerah, semakin baik pula pencapaian pembangunan manusianya, dan sebaliknya.



Gambar 2.13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2023

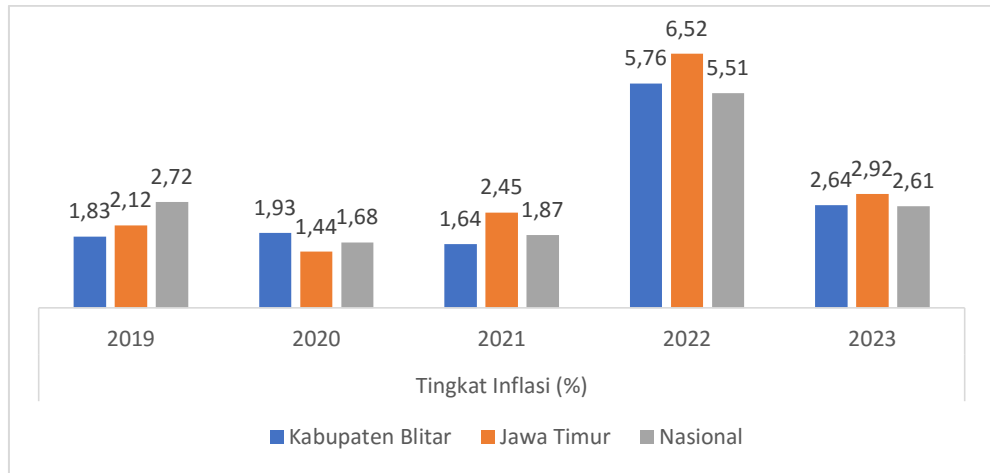
Sumber: BPS Kabupaten Blitar

Secara umum capaian capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren yang positif yaitu mengalami peningkatan. Dimulai dari 71.02 pada tahun 2020, angka IPM terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 dengan nilai 72.84. Data tersebut mencerminkan komitmen dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli di sepanjang periode tersebut. Peningkatan konsisten ini mencerminkan pencapaian positif dalam pembangunan manusia.

2.2.1.6 Laju Inflasi

Indikator penting lainnya mengenai kesejahteraan ekonomi adalah tingkat inflasi, yang mencerminkan perubahan harga komoditas dalam jangka waktu tertentu. Kabupaten Blitar bukan termasuk dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di antara 8 kabupaten/kota di Jawa Timur. Adapun Kota Kediri menjadi *sister city* Kabupaten Blitar dalam perhitungan inflasi karena kedekatan geografis dan struktur ekonominya yang hampir sebanding, yang mengarah pada pola konsumsi yang serupa di antara penghuninya, sehingga tingkat inflasi Kota Kediri menjadi standar pengukuran inflasi di Kabupaten Blitar.

Secara umum dapat terlihat bahwa laju inflasi di Kabupaten Blitar selama periode 2020-2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan lonjakan besar pada tahun 2022 dan penurunan yang cukup tajam pada tahun 2023. Dibandingkan dengan Jawa Timur dan Indonesia, Kabupaten Blitar mengalami dinamika inflasi yang cukup berbeda, dengan beberapa tahun mencatat inflasi lebih tinggi dan beberapa tahun lebih rendah.



Gambar 2.14 Laju Inflasi Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024.

Faktor-faktor lokal seperti kebijakan ekonomi, kondisi pasar, dan situasi pasokan barang dan jasa sangat mempengaruhi laju inflasi di Kabupaten Blitar. Penurunan inflasi pada tahun 2023 menunjukkan adanya upaya efektif dalam mengendalikan harga setelah lonjakan signifikan pada tahun sebelumnya, yang bisa menjadi indikator positif bagi stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2019 tingkat inflasi di Kabupaten Blitar sebesar 1,83% dan pada tahun 2020, tercatat laju inflasi sebesar 1,93%. Tahun 2021 menunjukkan penurunan laju inflasi di Kabupaten Blitar menjadi 1,64%. Meskipun turun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,87%, namun lebih rendah daripada Jawa Timur yang mencapai 2,45%. Penurunan ini mencerminkan stabilisasi harga barang dan jasa di Kabupaten Blitar setelah tahun sebelumnya yang lebih volatil.

Pada tahun 2022, Kabupaten Blitar mengalami lonjakan laju inflasi yang signifikan menjadi 5,76%. Ini adalah kenaikan yang sangat besar dari tahun sebelumnya dan menempatkan Kabupaten Blitar di posisi kedua tertinggi setelah Jawa Timur yang inflasinya mencapai 6,52%. Secara nasional, laju inflasi pada



tahun ini adalah 5,51%. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kemungkinan terjadinya gangguan pasokan barang penting, kenaikan harga energi, atau dampak dari kebijakan nasional dan internasional yang mempengaruhi harga-harga di tingkat lokal.

Tahun 2023 menunjukkan penurunan laju inflasi di Kabupaten Blitar menjadi 2,64%. Ini adalah penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yang mungkin mencerminkan upaya-upaya efektif dalam mengendalikan inflasi setelah lonjakan pada tahun 2022. Sebagai pembandingan, laju inflasi di Jawa Timur adalah 2,92% dan di Indonesia adalah 2,61%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti stabilisasi harga barang dan jasa maupun pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana semua warga negara dapat hidup secara normal, mengembangkan diri, dan menjalankan fungsi sosial dengan memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah usaha terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kesejahteraan sosial ini dapat diukur melalui berbagai aspek, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2.2.2.1 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan diperoleh dari hasil olah umur harapan hidup, asumsinya semakin sehat seseorang maka semakin panjang usia hidupnya. Indeks ini terkait pembangunan kesehatan di daerah. Perhitungan Indeks Kesehatan mulai tahun



2020 menggunakan data Long Form SP2020. Berikut Indeks Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tabel 2.7 Indeks Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kesehatan	0,8214	0,8391	0,8400	0,8440	0,8480

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, diolah.

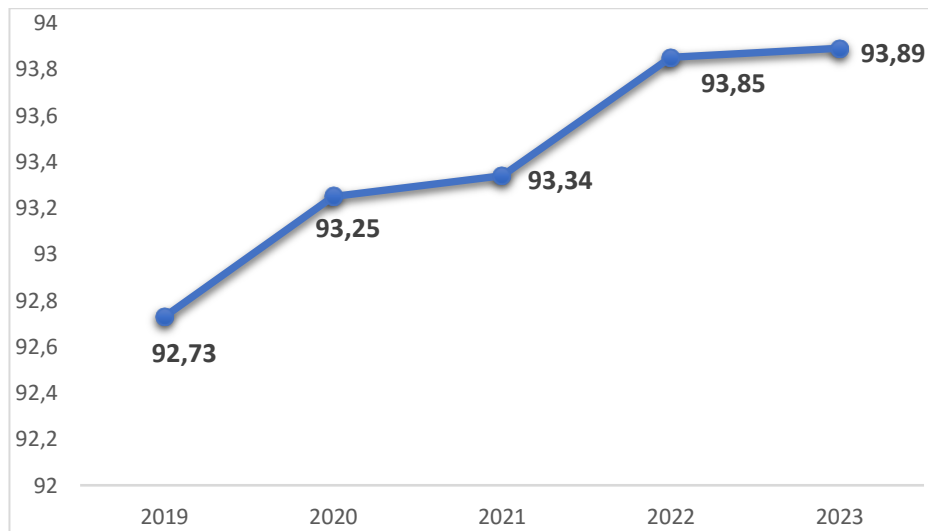
Trend Indeks Kesehatan di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan positif dari tahun 2019 sebesar 0,8214 menjadi 0,8480 pada tahun 2023. Angka tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan layanan kesehatan di wilayah dengan penambahan fasilitas kesehatan berupa unit khusus Rumah Sakit Srengat (tahun 2020), pemberian bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu juga disertai berbagai inovasi layanan di fasilitas kesehatan.

2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada dasarnya menggunakan indikator yang serupa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terdiri dari Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Purchasing Power Parity (PPP). Variabel yang sama, seperti Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita, juga menjadi indikator pembentuk keduanya. Perbedaan mendasar antara IPG dan IPM terletak pada tujuan data dan cara perhitungannya. IPM menilai pembangunan manusia secara menyeluruh dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu daerah, sementara IPG bertujuan untuk menilai tingkat pembangunan gender (perempuan) dari tiga aspek yang sama dengan IPM.

Meskipun penghitungan IPM dan IPG menggunakan metode yang sama, IPG memisahkan perhitungan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, kemudian mencari rasio di antara keduanya.

Nilai IPG mendekati 100 menunjukkan pembangunan gender antara laki-laki dan perempuan yang seimbang. Sebaliknya, jika nilai menjauhi 100, itu menunjukkan ketidakseimbangan dalam pembangunan gender antar jenis kelamin. Berikut data Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Blitar selama periode 2019 hingga 2023.



Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Catatan: IPG 2019 berdasar SP 2010 dan IPG 2020-2023 berdasarkan LFSP2020

Data capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Blitar selama periode 2019 hingga 2023 secara umum mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blitar mencapai 92,73 dan mengalami penurunan menjadi 92,70 pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 hingga tahun 2023, terjadi peningkatan sampai pada angka 93,40. Dengan angka ini menunjukkan IPG di Kabupaten Blitar telah cukup baik dengan kisaran nilai 93 yang artinya pembangunan gender antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang.

2.2.2.3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator baru yang menyempurnakan indikator ketimpangan gender sebelumnya dan disusun berdasarkan dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG menunjukkan kerugian potensial dalam capaian pembangunan manusia karena ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG berkisar 0-1, semakin kecil IKG menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah (kesetaraan yang semakin tinggi).

**Tabel 2.8 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Blitar
Tahun 2019-2023**

Tahun/Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketimpangan Gender	0,382	0,348	0,287	0,355	0,260

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024.

Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Blitar sejak tahun 2019 hingga 2023 mengalami tren menurun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Dalam rangka menurunkan ketimpangan gender maka dilakukan peningkatan partisipasi melalui perempuan pelatihan ketrampilan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

2.2.2.4 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Anak (IPA)- yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)-Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di suatu wilayah. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I terkait hak sipil dan kebebasan; Klaster II terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III terkait kesehatan dasar dan

kesejahteraan; Klaster IV terkait pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V terkait perlindungan khusus.

Tabel 2.9 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022

Tahun/Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Blitar	70,35	70,02	65,06	65,64	n.a
Indeks Perlindungan Anak Jawa Timur	71,8	72,25	64,59	66,10	n.a

Sumber: DP3APPKB Kabupaten Blitar, Rancangan Akhir RPJPD Jawa Timur 2025-2045.

Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Blitar pada tahun 2019-2022 cenderung mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan Indeks Perlindungan Anak. Data menunjukkan sepanjang tahun 2020-2023 jumlah kekerasan terhadap anak fluktuatif namun ada kecenderungan meningkat yaitu pada 2020 sejumlah 43 kasus, tahun 2021 sejumlah 51 kasus, tahun 2022 sejumlah 43 kasus, dan pada tahun 2023 sejumlah 70 kasus.



Gambar 2.16 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak Tahun 2020-2023

Sumber: UPT. PPA Kabupaten Blitar, 2024.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan berbagai kegiatan dari sisi



preventif atau pencegahan, penyediaan perlindungan anak hingga penguatan pengembangan lembaga penyedia perlindungan anak yang bertujuan untuk menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, termasuk edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang cara melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

2.2.2.5 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta berperan penting untuk memetik bonus demografi. Keberhasilan pembangunan pemuda dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Dalam kerangka penyusunan IPP, pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain. Kelima domain tersebut adalah (i) domain pendidikan, (ii) domain kesehatan dan kesejahteraan, (iii) domain lapangan dan kesempatan kerja, (iv) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) domain gender dan diskriminasi.

**Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Blitar
Tahun 2019-2023**

Tahun/Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Pemuda	n/a	n/a	51,83	54,17	56,67

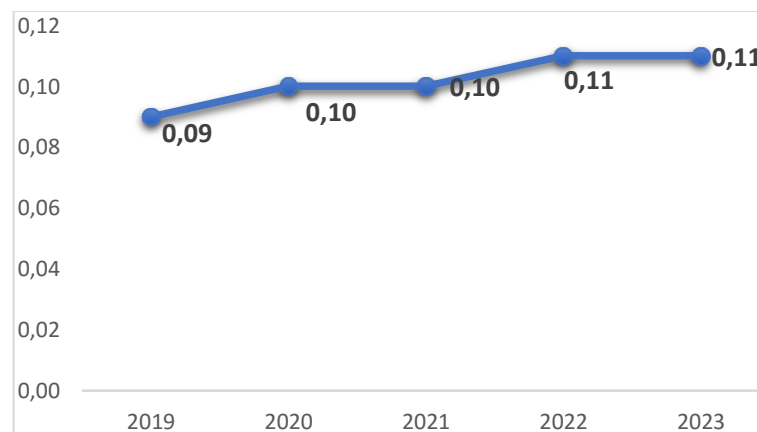
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, 2024.

Nilai IPP Tahun 2022 sebesar 54,17 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 56,67 (kategori Sedang). Secara berturut-turut, skor domain penyusunan IPP dari yang tertinggi, ke yang terendah adalah Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, Domain Pendidikan, Domain Peluang dan Kesempatan Kerja, Domain Gender dan Diskriminasi, serta Domain Partisipasi dan Kepemimpinan. IPP memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. IPP Kabupaten Blitar Tahun 2023 memiliki skor sebesar

56,67 (kategori sedang) dan capaiannya lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur dan Nasional. IPP Kabupaten Blitar secara konsisten mengalami peningkatan sejak 2021 hingga 2023. Pada 2021 ke tahun 2022, peningkatan sebesar 2,33 poin dari 52,5 menjadi 54,83. Sementara pada tahun 2022 ke tahun 2023, peningkatan terjadi sebesar 1,84 poin.

2.2.2.6 Indeks Keluarga Sehat

Dalam menghadapi era pembangunan yang semakin dinamis, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu parameter yang menjadi fokus utama adalah Indeks Keluarga Sehat. Indeks ini tidak hanya mencerminkan tingkat kesehatan fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting lainnya yang berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Melalui analisis dan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud dengan memprioritaskan aspek-aspek kunci yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.



Gambar 2.17 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2024.

Pada tahun 2019, Indeks Keluarga Sehat mencapai nilai 0,09 dan mengalami peningkatan setiap tahun hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 dan 2023, yaitu masing-masing



0,11. Nilai tersebut mencerminkan konsistensi dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hasil laporan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kabupaten Blitar tahun 2023 mencapai indeks keluarga sehat 0,11 atau 11% jumlah keluarga sehat yang memenuhi 12 indikator Keluarga Sehat. Capaian indikator tersebut diuraikan sebagai berikut;

Tabel 2.11 Indikator Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Blitar Tahun 2023

NO	INDIKATOR	NILAI 2023 (%)
1	Keluarga mengikuti program KB	47,4
2	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	98,9
3	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	98,53
4	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	84,34
5	Pertumbuhan Balita dipantau	93,24
6	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	46,4
7	Penderita hipertensi yang berobat teratur	17,22
8	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	44,18
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	49,99
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	31,27
11	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	96,36
12	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	87,34
Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2024.

2.2.2.7 Kebudayaan

Kebudayaan dan pembangunan adalah dua hal yang saling terkait dan mempengaruhi. Perubahan kebudayaan dan laju pembangunan akan senantiasa terus membentuk perkembangan dan peradaban masyarakat ke depan. Kebudayaan harus dianggap



sebagai aset penting yang berkontribusi terhadap pembangunan. Berikut table indicator kebudayaan Kabupaten Blitar tahun 2019 hingga tahun 2023.

**Tabel 2.12 Indikator Kebudayaan di Kabupaten Blitar
Tahun 2021-2023**

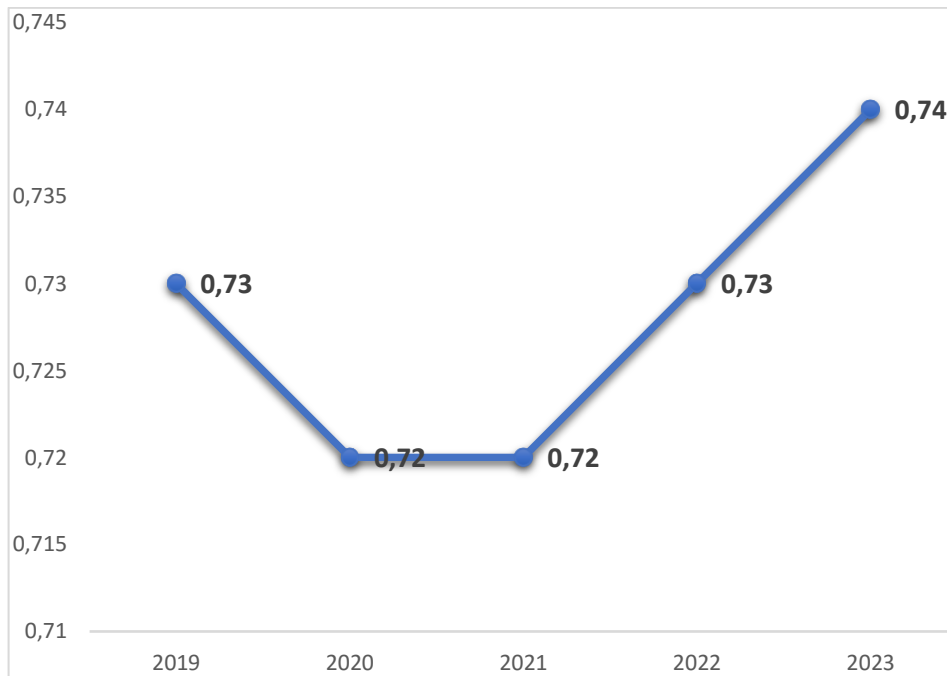
No.	Indikator	2021	2022	2023
1.	Jumlah Cagar Budaya	104	104	104
2.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	4	17	17
3.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	618	618	618

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, 2024.

Indikator kebudayaan Kabupaten Blitar meliputi Jumlah Cagar Budaya, Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan dan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi. Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 17 cagar budaya dari tahun sebelumnya.

2.2.2.8 Indeks Pengeluaran

Indeks Pengeluaran merupakan salah satu komponen IPM yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan atau paritas daya beli guna mengukur kemampuan masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya melalui kemampuan daya beli. Berikut merupakan perkembangan Indeks Pengeluaran (IP) di Kabupaten Blitar selama periode 2019 hingga 2023.



**Gambar 2.28 Indeks Pengeluaran Kabupaten Blitar
Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, diolah.

Tahun 2019 Indeks Pengeluaran Kabupaten Blitar senilai 0,73 dan pada menurun pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai masing-masing 0,72 mengindikasikan perekonomian yang sedang menurun diakibatkan pandemi COVID-19. Terjadi tren kenaikan yang konsisten hingga tahun 2023 sebesar 0,01 setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari nilai IP tahun 2022 sebesar 0,73 dan tahun 2023 sebesar 0,74 seiring dengan membaiknya perekonomian di Kabupaten Blitar.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing adalah kapasitas ekonomi yang harus menarik bagi pelaku ekonomi yang ada maupun yang akan masuk ke daerah tersebut, sehingga menciptakan efek ganda yang meningkatkan daya saing daerah. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dapat

dijelaskan melalui beberapa indikator, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indikator lainnya.

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu atau menunjukkan produktivitas suatu wilayah. Berikut disajikan data PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023.

Tabel 2.13 PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (juta rupiah)	36.447.136,4	36.023.963,4	37.819.725,5	41.379.309,6	44.891.700,0
PDRB ADHK (juta rupiah)	25.530.112	24.945.465	25.700.019	27.037.331,1	28.239.861,1

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Produktivitas Kabupaten Blitar yang tercermin dari PDRB pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan dampak pandemik *Covid-19*, namun terus menunjukkan tren positif seiring dengan membaiknya perekonomian. PDRB perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB perkapita pada tahun 2019 sebesar Rp.31,39 juta yang pada tahun berikutnya menurun menjadi Rp.29,49 juta akibat lumpuhnya perekonomian dampak pandemic *Covid-19*. Dengan mulai terkendalinya *Covid-19*, PDRB perkapita meningkat di tahun 2021 menjadi Rp.30,68 juta. PDRB perkapita dalam tiga tahun terakhir rata-rata tumbuh sebesar 3,96 persen.

Sektor utama penopang perekonomian di Kabupaten Blitar adalah pertanian, perdagangan, dan industry pengolahan. Hampir sepertiga struktur PDRB didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu di tahun 2023 sebesar 30,75%. Namun dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, kontribusinya cenderung menurun. Sebaliknya terjadi pada sektor perdagangan



dan sektor industri pengolahan, kontribusinya cenderung meningkat. Artinya, secara gradual telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.14 Kontribusi Sektor Utama PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	32,28	33,08	32,04	31,05	30,75
2.	Perdagangan Besar dan Eceran (%)	18,58	17,63	18,39	18,88	19,13
3.	Industri Pengolahan (%)	13,88	13,52	14,04	14,73	14,89

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Struktur PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, dengan kontribusi pada tahun 2023 sebesar 69,48 persen. Kontributor terbesar berikutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masing-masing sebesar 27,01 persen dan 6,37 persen, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.15 Tiga Besar Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023 (persen)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (%)	67,9	68,71	68,24	68,89	69,48
2.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (%)	8,31	7,69	7,6	6,68	6,37
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	28,85	28,04	27,84	27,75	27,01

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Ekonomi kreatif memiliki potensi ekonomi yang signifikan karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan budaya. Hal ini juga mendorong inovasi, kewirausahaan, daya saing dan pertukaran budaya antar komunitas maupun wilayah. Ekonomi kreatif yang berkembang di



Kabupaten Blitar terutama yang banyak bersinggungan dengan kebudayaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari sisi jumlah pelaku, apabila dilihat dari banyaknya pelaku di sub sektor ekraf, pelaku yang bergerak di bidang seni pertunjukan dan seni rupa, maka jumlahnya mendominasi dari total pelaku di subsektor ekonomi kreatif, yaitu sebesar 56,35%.

Tabel 2.16 Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

No.	Subsektor Ekonomi Kreatif	2022	2023
1	Aplikasi	4	4
2	Arsitektur	0	0
3	Desain Interior	1	1
4	Desain Komunikasi Visual	0	3
5	Desain Produk	1	3
6	Fesyen	31	36
7	Film, Animasi dan Video	2	3
8	Fotografi	12	13
9	Kriya	89	91
10	Kuliner	61	46
11	Musik	2	2
12	Penerbitan	1	1
13	Pengembang Permainan	0	1
14	Periklanan	2	3
15	Seni Pertunjukan	216	322
16	Seni Rupa	3	5
17	TV dan Radio	7	3
	Jumlah	432	537

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, 2024.

Adapun nilai tambah ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar selama tiga tahun terakhir meskipun belum signifikan namun menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.

Tabel 2.17 Nilai Tambah Ekonomi Kreatif di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	237.247.500	264.750.000	565.753.500

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, 2024.

Nilai tambah ekonomi kreatif meningkat lebih dari 100% melalui dukungan kebijakan Kepala Daerah untuk penggunaan batik motif cakrapalah sebagai pakaian dinas harian. Hal ini mendorong para pengrajin batik untuk lebih produktif guna memenuhi permintaan



pasar. Untuk semakin memperkuat peran ekonomi kreatif yang diproyeksikan sebagai pilar perekonomian masa depan, Pemerintah Kabupaten Blitar perlu menyelenggarakan lebih banyak event-event kreatif untuk mewadahi ide-ide inovatif dan kreatif pelakunya, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhannya dari sisi ekonomi, melakukan pendampingan agar produknya memiliki nilai daya saing, maupun membangun sinergi dan kerjasama antara para inventor dengan para investor.

2.3.1.2 PDRB Perkapita

PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk di wilayah tersebut. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah, maka diindikasikan semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya. Meskipun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk, PDRB per kapita tetap dapat memberikan gambaran umum tentang kondisi kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.18 PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Blitar 2019-2023
(Juta Rupiah)**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	31,39	29,49	30,72	33,36	35,81

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Tabel di atas menunjukkan perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Blitar selama periode 2019-2023. Data tersebut mengungkapkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Blitar cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan dampak lesunya perekonomian



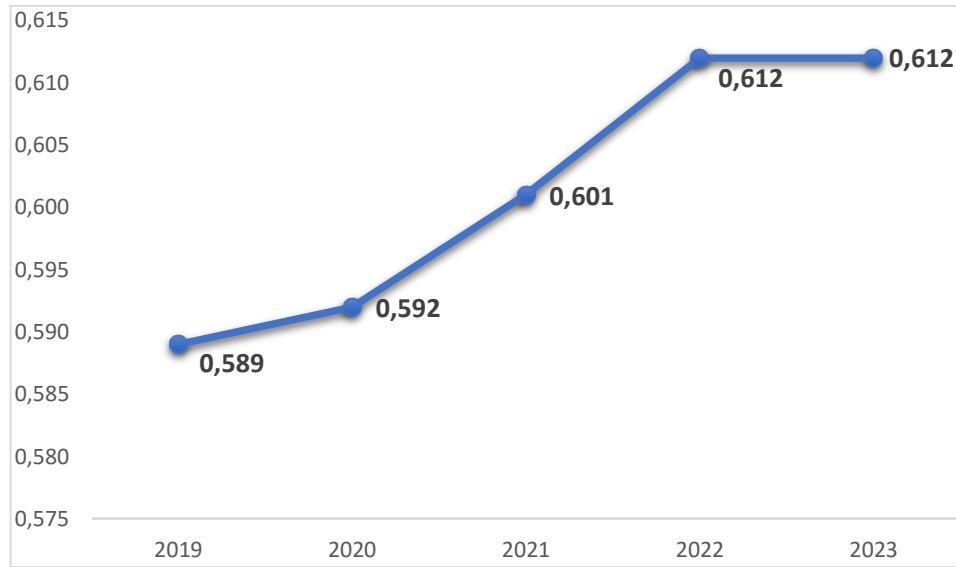
akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Blitar tercatat sebesar 30,72 juta rupiah. Angka ini meningkat menjadi 33,36 juta rupiah pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 35,81 juta rupiah pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi di Kabupaten Blitar, yang mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Fokus sumber daya manusia adalah aspek yang membahas mengenai kondisi sumber daya manusia di suatu daerah. Di Kabupaten Blitar, kondisi sumber daya manusia diukur melalui indikator tingkat partisipasi angkatan kerja. Berikut adalah hasil capaian dari fokus sumber daya manusia di daerah tersebut.

2.3.2.1. Indeks Pendidikan

Keberhasilan suatu negara dapat tercermin dari tingkat pendidikan yang dimilikinya. Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, yang merupakan elemen kunci dalam proses pembangunan nasional. Untuk mengukur perkembangan pendidikan, digunakan Indeks Pendidikan sebagai indikator utama yang mencerminkan progres dan kualitas sistem pendidikan di suatu negara. Berikut grafik indeks pendidikan Kabupaten Blitar pada tahun 2019 – 2023.



Gambar 2.19 Indeks Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023.

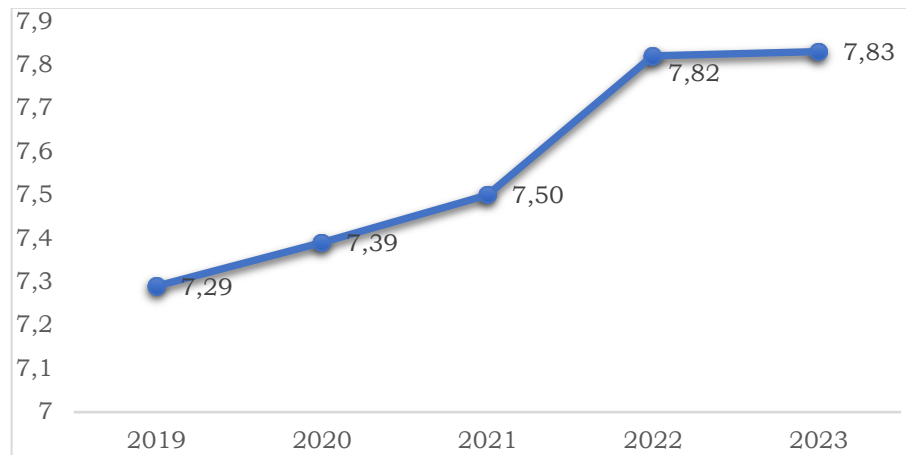
Sumber: BPS Kabupaten Blitar (diolah).

Pencapaian Indeks Pendidikan (IP) di Kabupaten Blitar selama periode 2019 hingga 2023, terlihat peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, IP mencapai 0,589 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 0,592, tahun 2021 sebesar 0,601 dan capaiannya stabil sebesar 0,612 di tahun 2022 dan tahun 2023.

2.3.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dapat dicapai melalui peningkatan tingkat pendidikan dan penurunan tingkat kemiskinan penduduk. Keadaan ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Rata-rata lama pendidikan didefinisikan sebagai jumlah tahun studi yang telah diselesaikan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas dalam pendidikan formal, tidak termasuk tahun studi ulang. Misalnya, tamatan SD dihitung bersekolah selama 6 tahun, tamatan SMP 9 tahun, dan tamatan SMA sesuai dengan durasi pendidikan tanpa mengulang kelas. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin baik status

pendidikan suatu masyarakat. Berikut adalah grafik angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Blitar.



Gambar 2.20 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Blitar

Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2019 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Blitar mencapai 7,29 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Angka ini masih perlu didorong melalui perluasan cakupan kepesertaan pendidikan kesetaraan, penanganan anak tidak sekolah dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.

2.3.2.3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pengukuran IPLM ini adalah untuk mengetahui pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi perpustakaan, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, jumlah perpustakaan telah memiliki Standar Nasional Perpustakaan (SNP), tingkat keterlibatan



masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang perpustakaan, dan perkembangan jumlah anggota perpustakaan. Berikut disajikan data IPLM Kabupaten Blitar Tahun 2021-2023.

Tabel 2.19 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2023

Tahun/Indikator	2021	2022	2023
IPLM (skala 0-20)	11,07	17,26	14,69
IPLM (skala 0-100)	52,69	82,20	69,95

Sumber: Perpustakaan Nasional (Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun Anggaran 2022-2023) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, 2024.

Pada tahun 2021, IPLM Kabupaten Blitar sebesar 11,07 dan pada tahun yang sama IPLM Jawa Timur sebesar 14,78. Pada tahun 2022, terdapat perubahan metode perhitungan IPLM dimana pada tahun 2021 digunakan skala 0-20 sedangkan perhitungan tahun 2022 menggunakan skala 0-100. IPLM Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebesar 82,20. Jika IPLM Tahun 2021 dikonversi dengan skala 0-100, maka capaiannya sebesar 52,69.

Pada tahun 2023, berdasarkan data rilis Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun Anggaran 2023, terdapat perbedaan skala nilai Unsur Pembentuk Literasi Masyarakat (UPLM) dimana pada tahun 2023 nilai maksimal UPLM sebesar “1” yang mengindikasikan suatu indikator telah memenuhi standar atau mencapai 100%. IPLM Kabupaten Blitar pada tahun 2023 sebesar 69,95. Dengan nilai berada pada kisaran 50-79,99 maka IPLM tahun 2023 berada pada kategori “Sedang”. Capaian ini masih lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur sebesar 75,18 namun lebih baik dibanding IPLM Nasional sebesar 69,42. Mengacu pada Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun Anggaran 2023 oleh Perpustakaan Nasional, indikator yang masih perlu untuk ditingkatkan adalah



pemerataan layanan perpustakaan (UPLM-1), ketercukupan koleksi (UPLM-2), dan Tingkat Kunjungan Masyarakat (UPLM-4).

2.3.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK di Kabupaten Blitar selama periode 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Tahun/Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
TPAK (%)	72,93	70,83	70,44	72,79	73,50

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Blitar Tahun 2023 sejumlah 734.660 orang, terdiri dari 698.611 orang bekerja dan 36.049 orang menganggur. Menurut jenis kelamin, selamat tiga tahun terakhir, TPAK laki-laki lebih besar dibanding TPAK perempuan dan terdapat kecenderungan tren TPAK laki-laki semakin meningkat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.21 TPAK Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2023

Wilayah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (%)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kabupaten Blitar	86,15	86,42	88,62	54,77	59,19	58,32

Sumber: BPS RI, 2024.

2.3.2.5. Angka Literasi dan Numerasi



Pendidikan merupakan pondasi utama untuk membangun peradaban dan mendorong kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang baik, Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, cerdas dan berkarakter dapat terwujud. Literasi dan Numerasi merupakan kompetensi atau kemampuan yang sifatnya general dan mendasar. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi. Ini tidak hanya terbatas pada keterampilan dasar membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap teks, kemampuan menganalisis informasi, serta keterampilan berpikir kritis untuk mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif. Literasi tidak hanya terkait dengan kata-kata tertulis, tetapi juga mencakup literasi numerik atau numerisasi. Numerisasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan dan berinteraksi dengan angka, serta menerapkan konsep-konsep matematika dalam berbagai situasi. Kemampuan ini melibatkan pemahaman terhadap bilangan, operasi matematika dasar, dan keterampilan dalam menggunakan angka dalam konteks sehari-hari maupun profesional. Indeks Literasi/Numerisasi digunakan untuk mengukur atau menilai tingkat pemahaman, pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, memahami informasi yang kompleks, serta memahami, menggunakan, dan bekerja dengan angka. Berikut disajikan angka literasi dan angka numerasi Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023.

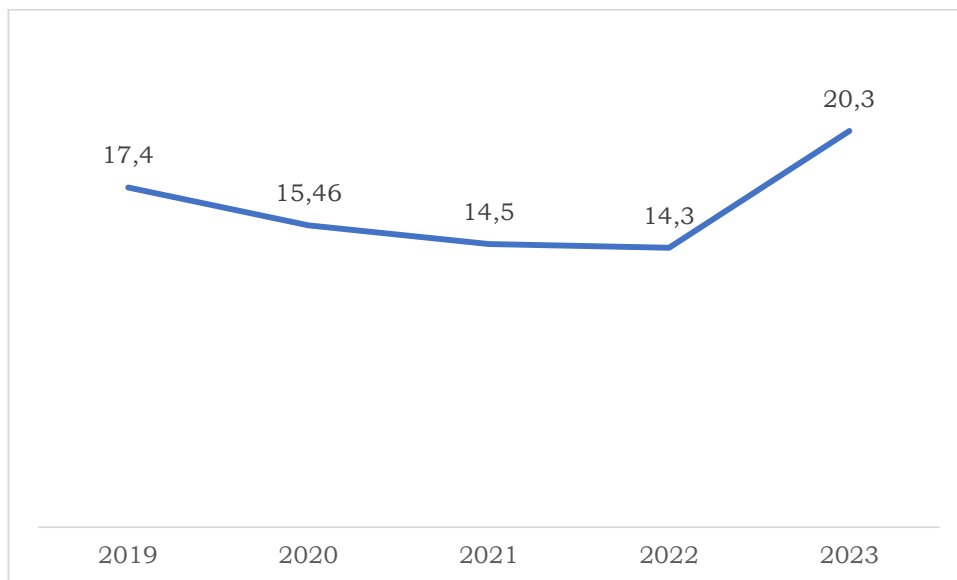
Tabel 2.22 Angka Literasi dan Angka Numerasi Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

URAIAN	SD		SMP	
	2022	2023	2022	2023
KEMAMPUAN LITERASI	75,14	84,87	68,36	79,78
KEMAMPUAN NUMERASI	48,24	72,28	45,11	56,82

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar (Rapor Pendidikan Tahun 2023).

2.3.2.5. Prevalensi Stunting

Berkaitan dengan kualitas SDM, persoalan yang perlu mendapat focus penanganan adalah terkait stunting. Tercatat sepanjang tahun 2019 hingga 2022 prevalensi stunting berangsur-angsur menurun, namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Setelah dilakukan evaluasi, diperoleh data bahwa pola asuh menjadi salah satu faktor terbesar penyebab stunting. Ke depan, edukasi, sosialisasi, penjangkauan, dan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting harus diperkuat.



Gambar 2.22 Prevalensi Stunting Kabupaten Blitar 2019-2023.

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2024.

Beberapa tahun terakhir dunia menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, perubahan iklim, krisis ekonomi global, konflik, serta degradasi lingkungan hingga terganggunya rantai pasok pangan internasional merupakan beberapa hal penyebab terjadinya kerawanan pangan dan gizi. Prevalensi



Ketidakcukupan Konsumsi Pangan dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi. ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Semakin tinggi prevalensinya, maka kian tinggi pula persentase penduduk yang mengonsumsi makanan, tetapi kurang dari kebutuhan energinya. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga mengaksesnya di tingkat sosial ekonomi yang berbeda.

Tabel 2.23 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Blitar (Persen)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)	9,19	11,39	11,27	12,76	10,91

Sumber: BPS RI, 2024.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Blitar selama periode 2019-2023 mengalami fluktuatif, yaitu sempat menaik pada periode pandemic Covid-19, namun pada tahun 2023 dapat kembali ditekan.

Ketahanan Pangan merupakan isu global dan nasional yang perlu mendapat perhatian, karena memerlukan upaya komprehensif lintas sektoral yang berkelanjutan. Penguatan kelembagaan petani, diversifikasi usaha, pelibatan *stakeholder* terkait (salah satunya BUMD), diversifikasi pangan, pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan, menjadi langkah-langkah menuju hilirisasi pertanian.

Mengatasi persoalan rendahnya minat masyarakat untuk bekerja di sector pertanian, Pemerintah Kabupaten Blitar akan memberikan pendampingan bagi petani-petani milenial mulai dari



proses tanam hingga pasca panen, sehingga akan menumbuhkan minat masyarakat pada sector ini. Potensi pertanian disektor hortikultura di Kabupaten Blitar dapat menjadi unggulan dan daya Tarik bagi generasi muda. Penerapan inovasi dan difusi teknologi pada sector ini harus terus dikembangkan. Selain itu, dilakukan perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Penguatan ketahanan pangan dan gizi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat juga harus harus terus dijaga baik melalui pekarangan pangan lestari maupun penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah.

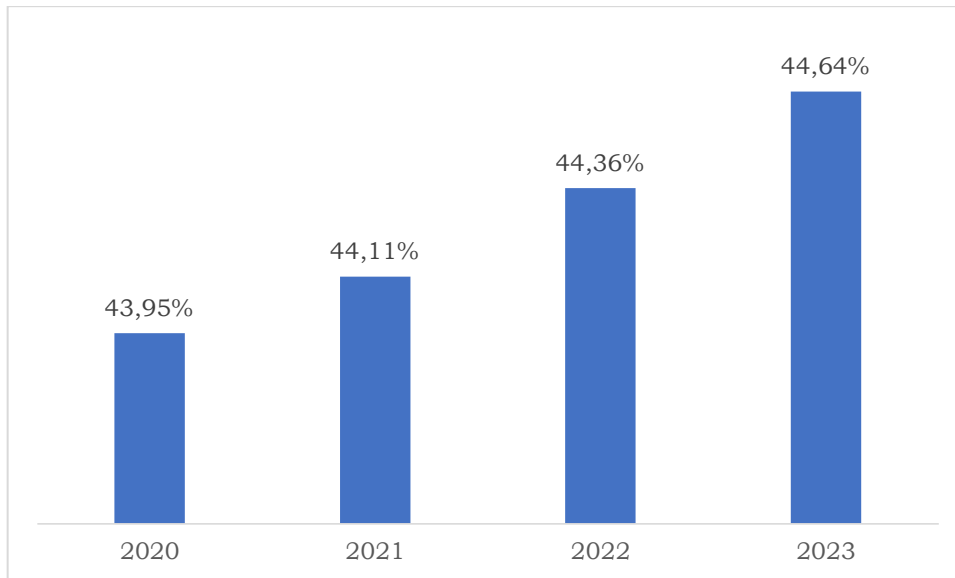
2.3.3 Daya Saing Fasilitas /Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan fasilitas atau infrastruktur di suatu wilayah dapat mendukung daya saing daerah dan memiliki kaitan langsung dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Beberapa indikator yang mencerminkan hal ini antara lain: jumlah orang yang diangkut oleh angkutan umum dan jumlah penumpang di terminal, penataan wilayah, fasilitas perbankan dan nonbank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah makan, serta ketersediaan penginapan. Di Kabupaten Blitar, fokus pada ketersediaan infrastruktur diukur melalui beberapa indikator kinerja, yaitu total jembatan yang telah terbangun dan panjang jalan yang sudah terbangun dan indikator lainnya.

2.3.3.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (usia 0-15 Tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-65 Tahun). Rasio ketergantungan ini menunjukkan jumlah penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif di suatu wilayah. Perkembangan rasio ketergantungan

penduduk di Kabupaten Blitar dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.23 Rasio Ketergantungan Kabupaten Blitar Tahun 2020-2023

Sumber: BPS RI, 2024 (diolah).

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2020 rasio ketergantungan di Kabupaten Blitar sebesar 43,95% pada dan cenderung mengalami tren kenaikan hingga pada tahun 2023, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif.

2.3.3.3. Infrastruktur

Salah satu infrastruktur yang menjadi modal utama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur jalan yang berkualitas. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/492/409.06/KPTS/2019 Tahun 2019 Kabupaten Blitar memiliki panjang jalan 1.558,30 km dengan uraian kondisi jalan sebagai berikut.

Tabel 2.24 Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Kondisi Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
---------------	------	------	------	------	------



	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
Kondisi Jalan										
Mantap		80,20		82,27		78,14		79,8		82,10
Baik	899,89	65,05	1074,24	68,95	777,65	49,9	970,89	62,3	830,89	53,32
Sedang	209,58	15,15	204,54	13,32	440,04	28,24	272,57	17,5	448,48	28,78
Tidak Mantap		19,80		17,75		21,86		20,2		17,9
Rusak Ringan	179,65	12,98	179,65	11,53	97,2	6,24	100,73	6,46	66,54	4,27
Rusak Berat	94,38	6,82	96,87	6,22	243,52	15,63	214,11	13,7	212,4	13,63
Jumlah	1.383,27	100	1.558,30	100	1.558,30	100	1.558,30	100	1558,30	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Blitar, 2024.

Kondisi jalan mantap di Kabupaten Blitar mengalami fluktuasi sepanjang lima tahun terakhir. Tahun 2021 kondisi jalan mantap menurun menjadi 78,14%, hal ini terjadi karena anggaran secara umum difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19. Namun, pada 2022-2023 prioritas pembangunan salah satunya diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur sehingga kondisi jalan mantap kembali meningkat yaitu menjadi 82,10% pada tahun 2023.

Berkaitan dengan infrastruktur jalan, wilayah Jawa Bagian Selatan merupakan jalur Pansela yang pada tahun 2024 ini masih dalam proses penyelesaian pembangunan, termasuk Kabupaten Blitar. Pembangunan Jalan Pansela merupakan salah satu program prioritas nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Pansela Provinsi Jawa Timur melintas pada 8 (delapan) kabupaten di pesisir selatan Provinsi Jawa Timur dari Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyuwangi dengan skema pembangunan fisik oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan pembebasan lahan oleh masing-masing pemerintah daerah. Total Panjang Pansela di Provinsi Jawa Timur sepanjang 628,39 Km dengan panjang

Pansela terbangun sepanjang 372,82 Km. Saat ini pembangunan Pansela sedang dalam proses konstruksi baik melalui sumber pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maupun *loan* dari Islamic Development Bank. Pada tahun 2019 dilakukan *review Detail Engineering Design* (DED) oleh Kementerian PUPR yang semula panjang trase di Kabupaten Blitar sepanjang 64,2 km menjadi 62,02 km.



Gambar 2.24 Progress Pembangunan Pansela di Kabupaten Blitar
Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Blitar, 2024.

Pansela di Kabupaten Blitar telah terbangun sepanjang 21,78 km sedang proses konstruksi (*loan phase II*) sepanjang 16,85 km (62,29%), dan sisanya belum terbangun sepanjang 23,39 km (37,71%) dari total panjang trase 62,02 km, dengan rincian *progress* pembangunan per bulan Agustus 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.25 Progress Pembangunan Jalan Pansela di Kabupaten Blitar Tahun 2024

No.	Nama Ruas	Panjang (Km)	Keterangan
A.	Ruas Terbangun		



1	Molang Bululawang	-	4,62	Selesai (100%)
2	Tambakrejo Serang	-	13,21	Selesai (100%)
3	Jolosutro Malang	-	3,95	Selesai terbangun 3,95 km dari total panjang ruas 6,79 km
B.	Ruas Progress	On		
1	Bululawang Sidomulyo Tambakrejo	- -	12,53	<ul style="list-style-type: none">▪ Sedang proses Konstruksi;▪ Tidak ada pembebasan lahan dan bangunan fisik;▪ Sedang dilakukan proses tata batas dan inventarisasi tegakan;▪ Target selesai pengerjaan pada awal tahun 2026.
2	Serang Sumbersih	-	4,32	<ul style="list-style-type: none">▪ Sedang proses Konstruksi;▪ Sedang dilakukan proses tata batas dan inventarisasi tegakan;▪ Target selesai pengerjaan pada akhir tahun 2025.
C	Ruas Terbangun	Belum		
1	Sumbersih Ringinrejo	-	13,19	<ul style="list-style-type: none">▪ Telah disusun DPPT pada TA 2023;▪ Proses appraisal dan proses ganti rugi lahan terdampak dianggarkan di DPA Dinas PUPR TA 2024;▪ Terdapat <i>deadlock</i> beberapa bidang tanah, sehingga sebagian alokasi anggaran dialihkan untuk Ruas Sp. Jolosutro-Bts. Malang.
2	Ringinrejo Jolosutro	-	7,36	<ul style="list-style-type: none">▪ Tidak ada pembebasan lahan, trase masuk dalam kawasan hutan
3.	Jolosutro Malang	-	2,84	<ul style="list-style-type: none">▪ DPPT sudah disusun TA 2023;▪ Proses appraisal dianggarkan dalam P-APBD 2024;▪ Ganti rugi lahan (8 bidang) sudah tersedia alokasi anggaran.

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Blitar, 2024.

Pembangunan Pansela ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan akses pariwisata dan pengembangan potensi kelautan serta perikanan di wilayah Blitar Selatan. Tantangan utama dalam pembangunan Pansela ini adalah penyelesaian pembebasan lahan.

Infrastruktur jalan tentu tidak lepas dari kelengkapan jalan dan system transportasi di wilayah tersebut. Fenomena maraknya transportasi online juga terjadi di Kabupaten Blitar, sehingga jumlah angkutan umum dalam lima tahun terakhir berkurang. Berikut adalah gambaran umum data transportasi dan sarana-prasarana kelengkapan jalan di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.26 Data Transportasi dan Sarana-Prasarana Kelengkapan Jalan di Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Pemasangan Rambu-rambu (%)	36,9 5	38,5 3	39,9 9	42,3 9	42,8 3
2	Indeks konektivitas angkutan jalan (indeks)	0,22	6,26	6,25	8,7	13,6 3
3	Jumlah CCTV Jalan raya (unit)	30	30	33	33	37
4	Jumlah Stasiun Kereta Api (unit)	5	5	5	5	5
5	Jumlah Terminal (Tipe A; B; dan C) (unit)	3	3	3	3	3
6	Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum (unit)	2	2	2	2	2
7	Persentase Kendaraan Tidak Lulus Uji KIR (%)	15,1	14,2 5	14	10,8 8	10,7 5
8	Jumlah Dermaga (unit)	16	16	16	15	15

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2024.

Sebagaimana diketahui Kabupaten Blitar memiliki 69 perlintasan sebidang kereta api, dengan rincian: 10 titik telah dijaga oleh PT. KAI; sejumlah 7 titik merupakan *flyover/underpass*; sejumlah 4 titik dilakukan normalisasi; sejumlah 3 titik dilakukan penjagaan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar; 2 titik dibangun pos oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan sejumlah 33 titik masih belum berpalang/belum ada penjagaan. Untuk kepentingan keselamatan pengguna jalan, Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya secara bertahap mengalokasikan anggaran pembangunan dan penjagaan

perlintasan sebidang kereta api, termasuk pengajuan usulan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun melalui CSR.

Infrastruktur lain yang tidak kalah penting mengingat Kabupaten Blitar merupakan daerah berbasis pertanian adalah infrastruktur sumber daya air. Berikut disajikan data infrastuktur sumber daya air di Kabupaten Blitar dalam tiga tahun terakhir.

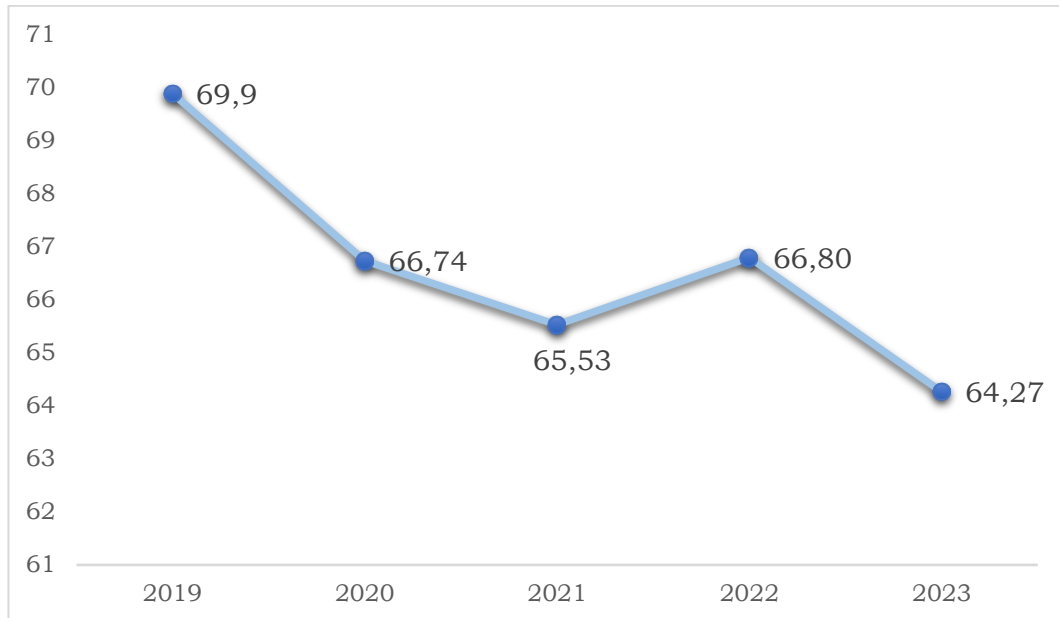
Tabel 2.27 Infastruktur Sumber Daya Air di Kabupaten Blitar

Uraian	2021	2022	2023
Bendung	593	593	593
DI Permukaan	674	674	674
Waduk	2	2	2
Mata Air	81	81	81

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Blitar, 2024.

2.3.3.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencerminkan kinerja nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dapat menjadi sumber informasi penting untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH di level kabupaten/kota menggunakan 3 (tiga) indikator kualitas lingkungan utama, yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA); (2) Indeks Kualitas Udara (IKU); dan (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL). Data mengenai IKLH Kabupaten Blitar memberikan gambaran tentang bagaimana tingkat kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan aspek-aspek kritis seperti air, udara, dan lahan. Informasi ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk evaluasi dan perumusan kebijakan lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.



Gambar 2.25 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2024

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa IKLH Kabupaten Blitar pada lima tahun terakhir mengalami trend menurun. Pada tahun 2019 nilai IKLH sebesar 69,9 mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 65,53 kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 66,80 namun menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 64,27. Dengan capaian tersebut, IKLH Kabupaten Blitar masih berada di dalam kategori sedang ($50 < \text{IKLH} < 70$).

Apabila dirinci menurut komponennya, maka indikator yang terus mengalami penurunan kinerja adalah Indeks Kualitas Air yang menurun dari 66 (2019) menjadi 59,14 (2023) dan Indeks Kualitas Udara yaitu dari 99,4 (2019) menjadi 82,07 (2023).

Tabel 2.28 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Komponen Pembentuknya di Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH	69,9	66,74	65,53	66,8	64,27
Indeks Kualitas Air (IKA)	66	56,67	55	61,67	59,41
Indeks Kualitas Udara (IKU)	99,4	98,22	87,46	86,8	82,07
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	50,66	50,69	39,01	39,08	39,7



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2024.

Penyebab Indeks Kualitas Air cenderung menurun di setiap tahunnya adalah bertambahnya kegiatan usaha peternakan terutama peternakan sapi perah dan pedaging di sekitar DAS kawasan hulu yang berada di Kecamatan Wlingi, Gandusari, dan Doko menyebabkan tingginya parameter biologis yaitu cemaran Fecal Coli serta meningkatnya cemaran limbah domestik dari permukiman warga.

Berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup tentu tidak lepas dari pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Tabel 2.29 Kinerja Pengelolaan Sampah dan Sarana-Prasarana Persampahan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penanganan Sampah (Ton per Tahun)	67.377,84	56.534,45	56.559	55.535	57.567,58
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (Ton per Tahun)	11,81	15,6	373,76	5.310,53	4.569,58
Jumlah sampah yan ditangani (Ton per Tahun)	49.947,50	55.732	54.077,76	55.534,53	57.567,58
Jumlah TPA (unit)	3	3	3	3	3,00
Jumlah Bank Sampah (Unit)	160	183	202	239	165
Jumlah TPS3R (unit)	5	5	5	6	15
Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	n.a	77,16	77,21	80,27	84,97

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2024.

Keterangan: Tahun 2019 belum dilakukan perhitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara



ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

2.2.3.3 Cakupan Akses Air Minum Layak

Akses air minum layak untuk masyarakat merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Indikator ini merupakan gambaran dari pelayanan dasar untuk masyarakat, sehingga dapat dipastikan menjadi prioritas daerah dalam pembangunan. Cakupan pelayanan terhadap akses air minum layak di Kabupaten Blitar sebagai berikut.

Tabel 2.30 Cakupan Akses Air Minum Layak Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Tahun/Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Akses Air Minum Layak (%)	81,42	82,30	82,76	84,17	89,70

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Blitar, 2024.

Pada kurun waktu 5 tahun dapat dilihat cakupan akses air minum layak di Kabupaten Blitar meningkat signifikan. Cakupan tahun 2019 sebesar 81,42% menjadi 89,70% di tahun 2023.

2.3.3.4 Cakupan Akses Sanitasi Layak

Tingginya cakupan akses terhadap sanitasi layak merupakan gambaran daerah yang memprioritaskan layanan dasar terhadap masyarakat. Indikator ini juga dapat menjadi tolak ukur kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah karena berkaitan erat dengan pengukuran *prevalensi stunting* dan tingkat kemiskinan. Cakupan akses sanitasi layak di Kabupaten Blitar tahun 2019 hingga tahun 2023 sebagai berikut.



**Tabel 2.31 Cakupan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Blitar
Tahun 2019-2023**

Tahun/Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Sanitasi Layak (%)	70,15	72,00	72,43	72,59	82,10

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Blitar, 2024.

Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa layanan dasar untuk masyarakat telah menjadi prioritas. Cakupan akses sanitasi layak pada tahun 2019 sebesar 70,15% meningkat secara signifikan menjadi 82,10% di tahun 2023.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Investasi adalah tindakan menanamkan modal untuk jangka panjang yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah serta menciptakan peluang kerja baru, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, pengembangan investasi dianggap sebagai salah satu faktor krusial dalam meningkatkan aktivitas pembangunan di suatu wilayah. Suatu wilayah akan menjadi lebih kompetitif jika memiliki iklim investasi yang berkualitas tinggi. Keberhasilan investasi juga memberikan dampak signifikan terhadap tingkat daya saing daerah tersebut.

2.3.4.1 Penanaman Modal

Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam suatu daerah. Peningkatan investasi dapat dicapai melalui implementasi peraturan daerah yang memberikan fasilitas atau insentif bagi penanaman modal, kerjasama dengan otoritas provinsi, penerapan prosedur operasi standar, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan pendukung seperti tindakan fasilitasi dan insentif penanaman modal, evaluasi pelaksanaan tindakan tersebut, seminar bisnis, *Bussiness Matching*, pameran penanaman modal, delegasi penanaman modal, dan penerbitan izin baik yang bersifat



perizinan maupun nonperizinan. Monitoring dan pelaporan terhadap realisasi penanaman modal, perkembangan lembaga penanaman modal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta perkembangan investasi asing dan domestik, juga menjadi bagian dari strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut data realisasi investasi di Kabupaten Blitar

Tabel 2.32 Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar Tahun 2019 -2023

TAHUN	NILAI PMDN	NILAI PMA	TOTAL
2019	Rp 3.197.219.696.256	Rp 1.469.129.210.455	Rp 4.666.348.906.711
2020	Rp 404.736.452.162	Rp 997.869.330.109	Rp 1.402.605.782.271
2021	Rp 1.075.324.540.178	Rp 202.972.218.243	Rp 1.278.296.758.421
2022	Rp 1.476.246.824.937	Rp 248.091.416.626	Rp 1.724.338.241.563
2023	Rp 1.842.744.868.942	Rp 1.085.462.365.438	Rp 2.928.207.234.380

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Blitar, 2024

Pada tahun 2019 realisasi investasi di Kabupaten Blitar mencapai Rp 4.666.348.906.711, nilai tersebut merupakan realisasi tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir. Kemudian nilai tersebut menurun pada tahun 2020 dan 2021 yang diakibatkan perekonomian secara nasional terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 dan 2023 realisasi investasi di Kabupaten Blitar mulai meningkat masing-masing 0,35 persen dan 0,70 persen dari tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu tersebut realisasi investasi di Kabupaten Blitar masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Apabila dilihat dari peluang investasi berdasarkan potensi Kabupaten Blitar yang tercermin dari PDRB, maka sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata 30%. Namun, jika dilihat dari laju pertumbuhannya, sektor transportasi dan pergudangan serta informasi dan komunikasi rata-rata bertumbuh 7-8% dalam lima tahun terakhir, kecuali pada tahun 2020 dimana mayoritas sektor PDRB mengalami kontraksi.

2.3.4.2 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Tabel 2.33 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

Komponen	Pilar	Skor	
		2022	2023
Lingkungan Pendukung	Institusi	4,34	4,59
	Infrastruktur	1,45	3,35
	Adopsi TIK	3,38	4,75
	Stabilitas Ekonomi Makro	3,04	3,15
Sumber Daya Manusia	Kesehatan	4,15	4,15
	Keterampilan	2,92	3,35
Pasar	Pasar Produk	2,86	2,79
	Pasar Tenaga Kerja	2,39	2,70
	Sistem Keuangan	4,06	3,00
	Ukuran Pasar	1,69	4,55
Ekosistem Inovasi	Dinamika Bisnis	5,00	2,68
	Kapabilitas Inovasi	0,56	1,62
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Blitar		2,99	3,39
Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Timur		3,15	3,78
Indeks Daya Saing Daerah Nasional		3,26	3,44

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024.

IDSD Kabupaten Blitar pada tahun 2022 masih lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pilar yang tertinggal adalah Infrastruktur, namun dengan focus pembangunan terhadap infrastruktur di tahun 2023 mengakibatkan nilai pilar ini naik pada tahun 2023 dan juga menjadi faktor pengungkit naiknya IDSD Kabupaten Blitar di tahun 2023.

2.3.4.3. Keamanan dan Ketertiban Umum

Persentase penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan hasil dari jumlah aduan masyarakat terkait ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti serta fasilitasi kegiatan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Kabupaten Blitar.



**Tabel 2.34 Indikator Keamanan dan Ketertiban Umum
Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023**

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	95%	95%	95%	95%	95%
Persentase Pelayanan Pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: SATPOL PP Kabupaten Blitar

Capaian presentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan pada tahun 2019 hingga 2023 stabil pada angka 95%. Angka tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk memeberikan rasa aman bagi masyarakat dengan mengoptimalkan kerjasama dengan perangkat daerah terkait, kepolisian, TNI serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui karang taruna, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Blitar mencapai 100% dimana sepanjang Tahun 2023 kejadian yang ditangani tercatat sejumlah 249 kasus diantaranya penanganan kebakaran dengan jumlah 76 kejadian dan 173 kejadian penanganan Non Kebakaran.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

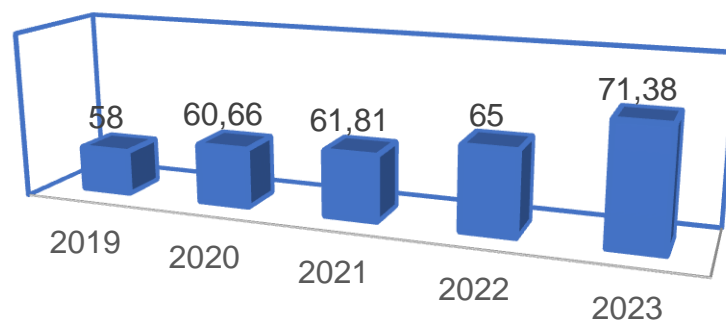
Aspek pelayanan umum merujuk pada berbagai elemen yang terkait dengan penyediaan layanan bagi masyarakat, melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu, akses, dan efisiensi layanan yang disediakan oleh pemerintah. Bagian ini akan menguraikan kondisi umum dari aspek pelayanan publik, terutama melalui indikator-indikator yang paling mewakili perkembangan dan kondisi pelayanan publik di wilayah yang bersangkutan.

2.4.1 Reformasi Birokrasi

Strategi reformasi birokrasi pemerintahan daerah merupakan upaya untuk memperkuat daerah dalam menjalankan

roda pemerintahan sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjalankan konsep desentralisasi sesuai dengan amanat otonomi daerah. Dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan guna memperkuat pencapaian tujuan pemerintah daerah, reformasi birokrasi dilaksanakan secara terstruktur dan menyeluruh.

Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat untuk menilai keberhasilan reformasi birokrasi dalam suatu lembaga pemerintah. Reformasi birokrasi adalah langkah mendasar untuk mengubah sistem dan struktur pemerintahan, bertujuan untuk menyegarkan dan merombak sistem pemerintahan. Penilaian indeks reformasi birokrasi terdiri dari dua komponen: pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit mencakup pemenuhan, hasil antara area perubahan, dan reformasi. Sementara komponen hasil meliputi akuntabilitas kinerja dan keuangan, mutu layanan publik, integritas pemerintahan, serta kinerja organisasi. Berikut Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Blitar periode tahun 2019 hingga 2023.



Gambar 2.26 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Sumber: Kementerian PAN-RB

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Blitar terus mengalami peningkatan dalam periode tahun 2019 hingga 2023



yaitu dari 58 ke 71,38. Dengan capaian tahun 2023 ini Indeks Reformasi Birokrasi masuk predikat BB (Sangat Baik). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan dan upaya pemenuhan indikator reformasi birokrasi, diantaranya penyederhanaan struktur organisasi, implementasi digitalisasi arsip, perbaikan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa, dan penguatan implementasi sistem merit.

2.4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mengukur respon terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Melalui SKM ini dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Tabel 2.35 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Blitar

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	79,46	80,94	82,46	84,59	85,61

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar, 2024.

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Blitar pada tahun 2020-2023 terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Kabupaten Blitar lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2023 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pemerintah Kabupaten Blitar dengan sampel penyelenggara pelayanan sebanyak 5 (lima) perangkat daerah, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Dari hasil SKM tersebut diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,61 dengan kategori Baik.

2.4.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah pelaksanaan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan SPBE adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam membangun daerah dengan menerapkan SPBE. Penerapan SPBE dapat dilakukan melalui penyediaan layanan bagi instansi pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, dan pengguna layanan lainnya.

Tabel 2.36 Indeks SPBE Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	2,90	n/a	2,76	2,61	3,63

Sumber: Kemenpan RB

Indeks SPBE Kabupaten Blitar tahun 2019 sebesar 2,90, namun pada tahun 2020 berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia nomor: B/386/M.KT.03/2020 perihal pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2020, Kabupaten Blitar tidak termasuk di dalam 130 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang diambil sebagai sampling evaluasi SPBE. Pada Tahun 2021 terdapat penambahan indikator dari 37 menjadi 47 indikator penilaian Indeks SPBE. Adapun tahun 2022 Indeks SPBE Kabupaten Blitar sebesar 2,61 atau masuk pada kategori “Baik”. Capaian ini memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,76, namun masih



lebih tinggi dibanding rata-rata Indeks SPBE Nasional sebesar 2,35. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Blitar tahun 2023 sebesar 3,63 atau mendapat predikat “Sangat Baik”, meningkat signifikan dibanding tahun 2022. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding nilai Indeks SPBE Nasional sebesar 2,79 dan Provinsi Jawa Timur sebesar 3,62.

2.4.4 Indeks Inovasi Daerah

Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin (innovation driven). Dalam era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing (innovation-driven development). Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan iptekin (innovation driven). Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas (a) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (b) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Kementerian Dalam Negeri setiap tahun menyelenggarakan *Innovative Government Award* (IGA).

Penganugerahan IGA kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan penilaian dan apresiasi pemerintah pusat terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif. Melalui penilaian dan penghargaan IGA ini, diharapkan dapat mendorong dan memotivasi pemerintah daerah, untuk terus



melakukan inovasi daerah dalam meningkatkan layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan di daerah.

**Tabel 2.37 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2019-2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Skor IID	10.530	3.922	56,58	55,51	61,42
Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri.

Mulai tahun 2021 dilakukan reformulasi penghitungan indeks dari sebelumnya bersifat tak hingga menjadi penghitungan bersifat hingga (skala 1-100). Pada tahun 2021, skor IID sebesar 56,58 dan pada tahun 2022 dari target 62,50 dapat direalisasikan sebesar 55,51 dan Kabupaten Blitar masih dapat mempertahankan predikat daerah inovatif. Adapun pada tahun 2023, melalui berbagai upaya pendampingan intensif dengan Perangkat Daerah, Indeks Inovasi Daerah berhasil ditingkatkan menjadi 61,42 dan masuk kategori Sangat Inovatif.



2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025. Dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 memuat visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar "Terbangunnya Perekonomian Rakyat Yang Mandiri, Tangguh Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Kabupaten Blitar Yang Sejahtera, Makmur, Dan Religius".

Selanjutnya, untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar serta sesuai dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur, maka misi pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai;
4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM;
6. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan; dan
7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi



daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN.

Sementara itu, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat.
2. Terwujudnya kualitas pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
3. Terwujudnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.
4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM.
6. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan.
7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih.

Analisis capaian kinerja RPJPD Kabupaten Blitar pada masing-masing periode diuraikan sebagai berikut.

2.5.1 Periode Perencanaan I (2005-2010)

Pada periode perencanaan I Tahun 2005-2010, terdapat 6 (enam) Arah Kebijakan beserta dengan capaian kinerjanya sebagai berikut.



- 1) Menata kembali dan membangun Kabupaten Blitar di segala bidang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia ditandai dengan menurunnya **angka pengangguran** dan jumlah **penduduk miskin** sejalan dengan **pertumbuhan ekonomi** yang berkualitas, **meningkatnya kualitas sumber daya manusia**, termasuk sumber daya manusia di bidang pertanian yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Kondisi tersebut dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur. Selaras dengan kondisi tersebut, dilaksanakan pula revitalisasi kelembagaan pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki lokasi strategis, antara lain kawasan sentra industri berbasis sentra agribisnis. Pada Arah Kebijakan ini dapat di uraikan capaiannya, sebagai berikut.
 - a) Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2005 hingga Tahun 2010 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2005 sebesar 5,18 persen dan terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2008 menjadi 6,04 persen, pada Tahun 2009 sempat turun menjadi 5,18 persen. Namun, pada Tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 5,33 persen.
 - b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Blitar pada Tahun 2006 hingga Tahun 2010 terus mengalami penurunan. TPT pada Tahun 2005 yaitu sebesar 6,03 persen, lalu secara bertahap mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya dan mencapai 2,24 persen pada Tahun 2010. Penurunan ini sangat signifikan dan dibarengi dengan penurunan jumlah pengangguran. Berdasarkan data Tahun 2005 menunjukkan jumlah



pengangguran sebanyak 35.142 jiwa dan cenderung menurun hingga tahun 2010 mencapai 13.276 jiwa, kecuali tahun 2008 sempat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

- c) Tahun 2005 tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar mencapai 16,11 persen, yaitu sebanyak 175,8 ribu jiwa. Kenaikan harga BBM pada Tahun 2005 telah memberikan dampak negatif khususnya bagi masyarakat miskin. Masalah kemiskinan secara bertahap ditangani dan akhirnya mampu menekan persentase penduduk miskin sebesar 12,13 persen pada Tahun 2010. Pada akhir periode ini jumlah penduduk miskin sebanyak 135,5 ribu jiwa.

2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain, ditandai oleh meningkatnya **indeks pembangunan manusia (IPM)** yang diarahkan untuk membangun bangsa yang berkarakter cerdas, adil dan beradab, berkepribadian nasional, tangguh, kompetitif, bermoral, dan berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap **pelayanan pendidikan dan kesehatan**; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan mengendalikan **jumlah dan laju pertumbuhan penduduk**. Pada Arah Kebijakan ini dapat diuraikan capaiannya, sebagai berikut.

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami peningkatan. IPM pada tahun 2005 sebesar



70,33 dan meningkat dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2010 terdapat perubahan metode penghitungan IPM di tingkat nasional yang menyebabkan nilai IPM Kabupaten Blitar menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan penggunaan metode baru tersebut, maka IPM Kabupaten Blitar tahun 2010 sebesar 64,79.

- b) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2005 mencapai 7,3 tahun dan pada tahun 2006 naik menjadi 7,4 tahun. Selanjutnya, pada tahun 2010 angka RLS mengalami penurunan menjadi 7,23 tahun. RLS Kabupaten Blitar sebesar 7,23 tahun dapat diartikan bahwa penduduk usia 25 tahun rata-rata memiliki tingkat pendidikan setara dengan SMP kelas 2. Pada tahun 2010, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi salah satu indikator IPM, yang menggambarkan lama pendidikan yang diselesaikan oleh masyarakat. HLS Kabupaten Blitar tahun 2010 mencapai 11,03 tahun.
- c) Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan pendidikan. Melalui berbagai program dan kegiatan antara lain Wajib Belajar 9 tahun dan Kelompok Belajar Paket (Kejar Paket), upaya peningkatan melek huruf masyarakat dapat memberikan hasil positif. Angka melek huruf pada tahun 2005 mencapai 86,20% dan kondisi tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2010 mencapai 92%.
- d) Indikator utama tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Angka harapan hidup sangatlah dipengaruhi oleh tingkat kesehatan seseorang, semakin baik tingkat kesehatannya maka semakin tinggi angka harapan hidup orang



tersebut. Pada tahun 2005 angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Blitar 69,9 tahun, dan terus bertambah setiap tahunnya hingga mencapai 72 tahun pada tahun 2010. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Blitar hidup hingga usia 72 tahun.

e) Indikator IPM yang mewakili gambaran standar hidup layak masyarakat adalah Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Blitar pada tahun 2010 mencapai 638,5 ribu rupiah. Jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2005 jumlah penduduk sebesar 1.295.601 jiwa, dan pada tahun 2010 kembali mengalami penurunan menjadi 1.116.639 jiwa.

3) Peningkatan kegiatan **mitigasi bencana alam** sesuai dengan kondisi geologi Kabupaten Blitar. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai **lingkungan hidup** dan menyadari keadaan wilayah yang rawan bencana sehingga makin peduli dan antisipatif. Hal itu didukung oleh pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas di setiap tingkatan pemerintahan dalam rangka penanggulangan bencana serta diacunya rencana tata ruang sebagai payung kebijakan spasial semua sektor dalam rangka mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana. Pada Arah Kebijakan ini dapat diuraikan capaiannya, sebagai berikut.

a) Pada Tahun 2004 luas lahan kritis di Kabupaten Blitar seluas 19.283 Hektar dan setelah penanganan melalui Gerhan pada tahun 2009, lahan kritis yang tersisa tinggal 9.038 Ha atau telah berkurang 46,87%. Program Gerhan



adalah suatu program nasional yang bertujuan menanggulangi lahan kritis melalui berbagai upaya sehingga kembali produktif. Selain Gerhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar juga melaksanakan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kegiatan ini jelas sangat bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar hutan dan juga mampu mencegah kerusakan hutan.

- b) Wujud nyata pengakuan terhadap keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah diraihnya penghargaan Adipura berturut-turut mulai tahun 2008 hingga 2010.
- 4) Meningkatnya rasa aman dan damai serta terjaganya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika melalui tertanganinya berbagai kerawanan, serta meningkatnya **keamanan termasuk keamanan sosial**. Kondisi itu didukung oleh berkembangnya nilai baru yang positif dan produktif pada setiap aspek kehidupan dalam rangka memantapkan budaya nasional, menguat dan meluasnya pemahaman tentang identitas nasional; dan meningkatnya **pelestarian serta pengembangan kekayaan budaya** untuk memperkokoh kedaulatan NKRI berlandaskan falsafah Pancasila. Pada Arah Kebijakan ini dapat diuraikan capaiannya, sebagai berikut.
- a) Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah melalui kegiatan penegakan Perda. Hasil yang dicapai adalah peningkatan kesadaran masyarakat terutama para pelaku usaha untuk mengurus perijinannya.
 - b) Pengembangan budaya dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai event budaya, antara lain Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) dan Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran. Kedua kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2010 masing-masing 1 kali sebagai agenda rutin



kabupaten.

- 5) Meningkatnya keadilan dan penegakan hukum; terciptanya landasan hukum untuk memperkuat kelembagaan demokrasi; meningkatnya **kesetaraan gender** di berbagai bidang pembangunan; terciptanya landasan bagi upaya penegakan supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Arah Kebijakan ini dapat diuraikan capaiannya, sebagai berikut.
 - a) Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Blitar pada tahun 2010 mencapai 66,59. Angka ini menempatkan Kabupaten Blitar berada pada posisi 14 daerah di Jawa Timur yang memiliki indeks pemberdayaan gender tertinggi.
 - b) Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Blitar pada tahun 2010 mencapai 89,3. Angka ini menempatkan Kabupaten Blitar berada pada posisi 18 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur yang memiliki indeks pembangunan gender tertinggi. Posisi ini tepat di atas Indeks pembangunan gender Provinsi Jawa Timur.
- 6) Kualitas pelayanan masyarakat makin membaik dengan meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermin dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta **tertatanya kelembagaan birokrasi** dalam mendukung percepatan terwujudnya **tata pemerintahan yang baik**. Pada Arah Kebijakan ini dapat diuraikan capaiannya, sebagai berikut.
 - a) Dalam rangka reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik telah dihasilkan rancangan Peraturan Daerah tentang penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Blitar sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007 yang



direalisasikan pada tahun 2008. Sementara dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik telah dibentuk lembaga tersendiri yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPSP) yang menjadi wadah pemberian layanan perijinan kepada masyarakat.

2.5.2 Periode Perencanaan II (2016-2020)

Pada periode perencanaan II Tahun 2011-2015, terdapat 5 (lima) Arah Kebijakan beserta dengan capaian kinerjanya sebagai berikut.

- 1) Memantapkan penataan kembali Kabupaten Blitar di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan **kualitas sumber daya manusia** termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta **penguatan daya saing perekonomian**. Pada Arah Kebijakan ini dapat diuraikan capaiannya, sebagai berikut.
 - a) IPM Kabupaten Blitar pada tahun 2011 sebesar 74,24 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi 75,61. Peningkatan ini didukung oleh meningkatnya komponen pembentuk IPM baik pada aspek pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga **ketertiban dan keamanan** melalui kerjasama dengan aparat keamanan. Sejalan dengan meningkatnya **kesadaran dan penegakan hukum**, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Selain itu, sejalan pula semakin terwujudnya kehidupan yang lebih demokratis, yang ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya, **kualitas pelayanan publik** yang lebih murah, cepat, transparan, dan



akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di semua tingkatan pemerintah. Pada Arah Kebijakan ini dapat di uraikan capaiannya, sebagai berikut.

- a) Persentase penegakan perda di Kabupaten Blitar pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 yaitu sebesar 80 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 menjadi 100 persen, namun pada tahun 2015 turun menjadi hanya 97,78 persen.
 - b) Nilai SAKIP Kabupaten Blitar pada Tahun 2015 adalah 32,15 atau predikat C. Nilai ini mengalami peningkatan bila dibandingkan Tahun 2014 yang memiliki nilai 43,87 atau predikat.
- 3) Peningkatan kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya **pendapatan per kapita**; menurunnya **persentase penduduk miskin** dan **tingkat pengangguran** sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan **sistem pendidikan yang mantap**; **meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat**; meningkatnya **kesetaraan gender**; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka **memantapkan budaya dan karakter bangsa**. Pada Arah Kebijakan ini dapat di uraikan capaiannya, sebagai berikut.
- a) Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Blitar pada



tahun 2011 yaitu sebesar 11,18 tahun, dan mengalami peningkatan hingga tahun 2013 menjadi 11,37 tahun dan pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 11,98 tahun.

- b) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 yaitu 7,36 tahun, 2012 (7,45), 2013 (7,41), 2014 (7,42) dan tahun 2015 turun menjadi (7,24).
- c) Umur harapan hidup (UHH) Kabupaten Blitar berdasarkan *trend* periode 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. UHH Kabupaten Blitar tahun 2011 sebesar 72,36 tahun dan pada tahun 2015 UHH mencapai 72,80 tahun. Capaian UHH tahun 2015 bermakna bahwa rata-rata bayi yang lahir pada tahun tersebut memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 72,80 tahun.
- d) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Blitar pada tahun 2011 sebesar 8.726 ribu rupiah, yang berarti meningkat dari tahun 2010. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun, dan tahun 2015 mencapai 9.272 ribu rupiah.
- e) Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2011 mencapai 11,29 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 126,90 ribu jiwa. Indikator kemiskinan di Kabupaten Blitar cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga mencapai 9,97 persen tahun 2015 dengan jumlah penduduk miskin 114,12 ribu jiwa.
- f) TPT di Kabupaten Blitar pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 yaitu sebesar 3,61 persen dan menurun di tahun 2012 menjadi 2,86 persen. Namun pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 3,74 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 23.046 jiwa. Berbagai upaya dilakukan untuk



menekan pengangguran dan menunjukkan hasil dengan turunnya TPT pada tahun 2014 mencapai 3,02 persen dan sekain turun pada tahun 2015 menjadi 2,79 persen. Jumlah penganggur tahun 2015 juga ikut menurun menjadi 16.657 jiwa.

- g) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blitar pada periode 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. IDG pada tahun 2011 mencapai 63,33 dan meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2015 sebesar 75,08. IDG Kabupaten Blitar sempat mengalami penurunan pada tahun 2013 namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Indeks pembangunan gender Kabupaten Blitar pada tahun 2015 mencapai 92,96. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan capaian tahun 2011 yaitu 89,77.
- h) Indeks pembangunan gender Kabupaten Blitar pada tahun 2015 mencapai 92,96. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan capaian tahun 2011 yaitu 89,77.
- i) Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka peningkatan modal sosial di Kabupaten Blitar dapat dilihat dari capaian indikator Persentase grup kesenian/kebudayaan yang dibina. Pada tahun 2015, indikator Persentase grup kesenian/kebudayaan yang dibina mencapai 94%. Secara konsisten, jumlah grup kesenian/kebudayaan di Kabupaten Blitar yang dibina selalu mengalami peningkatan. Dari total 200 grup kesenian/kebudayaan, terdapat 187 grup yang dibina di tahun 2015. Grup kesenian/kebudayaan yang telah mendapatkan pembinaan diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam beberapa event seperti gelar seni budaya unggulan di Jawa Timur, pengiriman festival seni dan budaya, serta event Purnama Seruling Penataran.



4) Meningkatnya **daya saing perekonomian** melalui **penguatan sentra-sentra industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan** dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Pada Arah Kebijakan ini dapat di uraikan capaiannya, sebagai berikut.

- a) LPE Kabupaten Blitar pada tahun 2011 yaitu sebesar 5,43 persen dan naik pada tahun 2012 menjadi 5,62 persen. Namun, pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan menjadi masing-masing sebesar 5,06 persen dan 5,02 persen. Kondisi perekonomian kembali menunjukkan perbaikan pada tahun 2015 yang ditandai dengan LPE sebesar 5,06 persen.
- b) Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Blitar pada tahun 2011 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 yaitu sebesar 35,00%, tahun 2013 naik menjadi 35,25% dan pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 36,38%.
- c) Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 kontribusinya mencapai 13,59% dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2014 menjadi 12,75%. Namun, pada tahun 2015 mengalami



sedikit peningkatan menjadi 12,83%.

5) Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian **pembangunan yang berkelanjutan** melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta **penanggulangan bencana** di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Pada Arah Kebijakan ini dapat diuraikan capaiannya, sebagai berikut.

- a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2015 mencapai 66,31.
- b) Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blitar pada periode ini berada pada angka 210 yang berarti masuk kategori risiko Tinggi.

2.5.3 Periode Perencanaan III (2016-2020)

Pada periode perencanaan III Tahun 2016-2020, terdapat 6 (enam) Arah Kebijakan beserta dengan capaian kinerjanya sebagai berikut.

- 1) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai



bidang dengan menekankan pencapaian **daya saing kompetitif perekonomian** berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Pada Arah Kebijakan ini dapat diuraikan capaiannya, sebagai berikut.

- a) Selama tahun 2016-2019 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar berada di angka 5 persen. Namun Pandemi COVID-19 secara simultan telah mengganggu struktur perekonomian daerah dan nasional hingga terjadi kontraksi. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Blitar pada tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha akibat pandemi COVID-19 dan sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Blitar atas dasar harga konstan 2010, sebesar 24,95 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 25,53 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,29 persen atau mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,12 persen. Kontraksi Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan di 3 (tiga) lapangan usaha yang sangat dominan di Kabupaten Blitar yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan dan Konstruksi meskipun lapangan usaha dominan lainnya seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi tetap tumbuh positif. Kontraksi pertumbuhan yang terjadi di beberapa lapangan usaha lainnya juga berefek pada kontraksi pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan provinsi, maka kontraksi



pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur secara agregat bahkan lebih dalam lagi hingga -2,39%. Adapun di level nasional, tingkat kontraksinya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan apa yang terjadi di Kabupaten Blitar dan Jawa Timur dengan berada pada angka -2,09%. Hasil-hasil tersebut menjadi anomali karena sejak krisis ekonomi 1998 berlalu Indonesia selalu berada pada periode positif, di mana perekonomian mampu selalu tumbuh kendati terjadi perlambatan dan fluktuasi ekonomi.

2) Sejalan dengan keamanan dan ketertiban yang makin mantap yang ditandai dengan peningkatan profesionalisme aparat keamanan yang didukung partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap **ketertiban dan keamanan** di lingkungannya. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelebagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta **profesionalisme aparatur** negara makin mampu mendukung pembangunan nasional. Pada Arah Kebijakan ini dapat di uraikan capaiannya, sebagai berikut.

- a) Persentase penegakan PERDA pada tahun 2016 mencapai 82 persen dan meningkat menjadi 95 persen di tahun 2017 dan capaian ini tetap hingga tahun 2020.
- b) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun menunjukkan tren positif. Capaian indeks RB tahun 2016 sebesar 47,73 meningkat dari tahun ke tahun mencapai 60,66 pada tahun 2020.
- c) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar pada periode 5 tahunan ini mengalami peningkatan dari tahun ke



tahun. Pada tahun 2016, Indeks RB mencapai 50,54. Angka ini meningkat terus dan mencapai 69,00 dengan kategori B pada tahun 2020.

3) Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang terus membaik, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan **relevansi pendidikan**, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya **derajat kesehatan dan status gizi** masyarakat; meningkatnya **kesetaraan gender**; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak, tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang, dan mantapnya **budaya dan karakter bangsa**. Pada Arah Kebijakan ini dapat diuraikan capaiannya, sebagai berikut.

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar cenderung terus mengalami kenaikan sejak tahun 2016 sebesar 68,88. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Blitar meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 70,57. Pada tahun 2020, angka IPM Kabupaten Blitar sudah mencapai 71,02 poin (LF SP2020). Meskipun mengalami perlambatan dibandingkan kenaikan pada periode sebelumnya, tren positif ini perlu dipertahankan karena pentingnya IPM dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan kualitas dan kuantitas SDM terlebih di tengah pandemi COVID-19, yang muaranya diharapkan juga turut mendukung penguatan pembangunan ekonomi yang berkualitas.
- b) Angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Blitar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 7,25 tahun,



- 2017 sebesar 7,26 tahun, 2018 sebesar 7,27 tahun, 2019 sebesar 7,29 tahun dan pada tahun 2020 naik menjadi 7,39 tahun. RLS Kabupaten Blitar tahun 2020 bermakna bahwa penduduk usia 25 tahun rata-rata memiliki tingkat pendidikan setara dengan SMP kelas 2.
- c) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Blitar selama periode ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 HLS Kabupaten Blitar mencapai 12,42 tahun dan meningkat terus sampai mencapai 12,46 tahun pada tahun 2020. Ini berarti anak-anak usia 7 tahun berpeluang tamat SMA atau mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi tingkat pertama.
 - d) Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Blitar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 72,9 tahun dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 73,16 tahun. Selanjutnya, pada tahun 2020 berdasar data Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 (LF SP2020), UHH kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 74,54 tahun. Capaian UHH tahun 2020 bermakna secara rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 74,54 tahun.
 - e) Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan menunjukkan trend yang cenderung naik, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Blitar mencapai 10,65 juta rupiah, turun sebesar 1,91%. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi COVID-19.
 - f) Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar pada tahun 2016-2020 secara berturut-turut adalah 113,51 ribu, 112,93 ribu, 112,40 ribu, 103,75 ribu, dan 108,55 ribu. Kondisi tersebut menunjukkan tren penurunan walaupun pada



tahun 2020 menunjukkan peningkatan akibat COVID-19. Persentase penduduk Kabupaten Blitar yang berada di bawah garis kemiskinan selama periode tersebut juga terus mengalami penurunan secara moderat. Akan tetapi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, kondisi ekonomi daerah turun sehingga menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Akibatnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Blitar meningkat menjadi 9,33 persen tahun 2020 atau sekitar 108.550 jiwa. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar dan Jawa Timur umumnya masih tergolong tinggi. Persentase penduduk miskin Kabupaten Blitar tahun 2018 sebesar 9,72% sedangkan tahun 2019 turun sebesar 8,94%, namun tahun 2020 kembali meningkat menjadi 9,33%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Blitar berada di peringkat 14 kemiskinan terendah di Jawa Timur dan masih di bawah Provinsi Jawa Timur.

- g) Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka setiap tahun secara garis besar mengalami kecenderungan meningkat pada periode 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016 persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,73% yang mana mengalami kenaikan secara berturut-turut pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang masing-masing menjadi 2,99% dan 3,38%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 3,05%, lalu kembali meningkat menjadi 3,82% pada tahun 2020. Peningkatan TPT tahun 2020 sebesar 0,71% merupakan salah satu dampak buruk dari pandemi COVID-19. Pada RPJMD indikator TPT ditargetkan 2,51 namun terealisasi 3,82%.
- h) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blitar pada 2016-2020 selalu mengalami peningkatan, yang artinya kesetaraan dan keadilan akses perempuan atas kehidupan



ekonomi, politik dan manajerial semakin baik sehingga dapat berperan aktif dalam ekonomi maupun politik. IDG Kabupaten Blitar pada tahun 2016 mencapai 75,61, meningkat setiap tahunnya dan mencapai 80,32 pada tahun 2020. Pencapaian ini membawa Kabupaten Blitar berada pada posisi tiga besar daerah di Jawa Timur yang memiliki IDG tertinggi setelah Kota Kediri dan Kota Surabaya.

- i) IPG Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2017-2020 berfluktuasi dari 92,50 pada tahun 2017 menjadi 92,33 pada tahun 2018 kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 92,73 pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 0,03 poin menjadi 92,70. Fluktuasi IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya fluktuasi beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata.
- 4) Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi **lingkungan hidup** dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang. Pada Arah Kebijakan ini dapat diuraikan capaiannya, sebagai berikut.
 - a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Blitar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 yaitu mencapai 66,87 dan pada tahun 2019 angkanya naik



menjadi 69,90. Kemudian pada tahun 2020 IKLH Kabupaten Blitar mengalami penurunan menjadi 68,65. Memperhatikan capaian kinerja IKLH Kabupaten Blitar, sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 meskipun meningkat lalu mengalami penurunan pada tahun 2020, pada dasarnya tetap berada pada range kategori yang sama, yaitu cukup. Nilai IKLH tersebut dibentuk dari 3 komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan. Penyumbang menurunnya nilai IKLH pada tahun 2020 adalah capaian IKA. Penyebab penurunan indeks kualitas air khususnya di tahun 2019 ke 2020 adalah salah satunya karena limbah rumah tangga belum terolah dengan sempurna dan adanya penambahan limbah menyebabkan banyaknya limbah tidak terolah dan terjadinya peningkatan pencemaran air sehingga hal ini perlu diselesaikan dengan langkah seperti pembangunan IPAL untuk Limbah Air dan sebagainya.

- b) Nilai indeks risiko bencana Kabupaten Blitar pada tahun 2020 mencapai 169.22, yang berarti berada pada kategori risiko Tinggi. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kondisi pada awal periode pembangunan ini yaitu tahun 2015 yang mencapai 210.00.
- 5) Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan **semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan** dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Pada Arah Kebijakan



ini dapat di uraikan capaiannya, sebagai berikut.

- a) Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB pada tahun 2016 yaitu mencapai 3,05 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2018 menjadi 1,15 persen, namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 1,62 persen. Pada Tahun 2020 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga masih mampu tumbuh positif meskipun cukup tipis pada angka 0,06%. Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang relatif baik mengingat peranannya sebagai kontributor utama di dalam struktur perekonomian Kabupaten Blitar.
 - b) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,13 persen, 2017 (6,5 persen), 2018 (6,96 persen) dan 2019 (7,78 persen). Namun demikian, mayoritas sektor lapangan usaha di Kabupaten Blitar mengalami kontraksi dengan adanya pandemi COVID-19. Dari 17 sektor lapangan usaha, 11 di antaranya tengah mengalami kontraksi pada tahun 2020 termasuk sektor Industri Pengolahan yang turun hingga -5,26%.
- 6) Ketersediaan **infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi**. Pada Arah Kebijakan ini dapat di uraikan capaiannya, sebagai berikut.
- a) Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur yang meliputi Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi di Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2016, indikator ini mencapai 75,86 persen dan meningkat menjadi 83,76 persen pada tahun 2020.



2.5.4 Periode Perencanaan IV (2021-2025)

Pada periode perencanaan IV Tahun 2021-2025, terdapat 5 (lima) Arah Kebijakan beserta dengan capaian kinerjanya sebagai berikut.

- 1) Upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang sejahtera dan berdaya melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya **perekonomian rakyat** yang mandiri dan tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Pada Arah Kebijakan ini diuraikan capaiannya sebagai berikut.

- a) Ekonomi Kabupaten Blitar mengalami pertumbuhan positif di tahun 2021 yaitu sebesar 3,02% atau naik sebesar 5,31% dari tahun 2020 yang sebelumnya sempat berkontraksi negatif sebesar -2,29% akibat pandemi COVID-19 yang telah memicu krisis ekonomi global. Selanjutnya pada tahun 2022 LPE Kabupaten Blitar kembali mengalami pertumbuhan yang positif menjadi 5,20% atau naik sebesar 2,18% dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha dan sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Blitar atas dasar harga konstan 2010, sebesar 27,04 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 25,70 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,02 persen. Kinerja yang bagus diciptakan oleh Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda



Motor; transportasi dan pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi dan Jasa Lainnya yang mampu tumbuh diatas 6 persen.

b) Kelembagaan politik dan hukum telah terbentuk ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya **rasa aman dan damai** bagi seluruh rakyat. Kondisi itu didukung oleh terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta **birokrasi yang profesional dan netral**; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri. Pada Arah Kebijakan ini dapat di uraikan capaiannya, sebagai berikut.

a) Pada Tahun 2022 indikator Persentase penegakan perda dan perkada mencapai 95 persen dari target sebesar 95 persen yang dimuat dalam RPJMD 2021-2026.

b) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2022 adalah 65,00 atau kategori “B” atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 61,81.

c) Tahun 2022, nilai SAKIP Kabupaten Blitar turun menjadi 69,02 dari tahun 2021 sebesar 69,13 dengan predikat B. Berbagai kebijakan peningkatan nilai SAKIP terus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan perencanaan dan efektifitas pemilihan program dan kegiatan (refocusing) yang benar-benar



mendukung kinerja sasaran strategis. Selain itu, berbagai kegiatan dan dokumen pendukung untuk meningkatkan kualitas SAKIP terus dilakukan diantaranya menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, melakukan review SOP, peningkatan kompetensi tim penyusun SAKIP perangkat daerah, dan menyusun Proses Bisnis Internal pemerintahan.

2) Kelembagaan politik dan hukum telah terbentuk ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat. Kondisi itu didukung oleh terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri. Pada Arah Kebijakan ini diuraikan pencapaiannya sebagai berikut.

- a) Pada Tahun 2022 indikator Persentase penegakan perda dan perkara mencapai 95 persen dari target sebesar 95 persen yang dimuat dalam RPJMD 2021-2026;
- b) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2022 adalah 65,00 atau kategori “B” atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 61,81;
- c) Tahun 2022, nilai SAKIP Kabupaten Blitar turun menjadi 69,02 dari tahun 2021 sebesar 69,13 dengan predikat B. Berbagai kebijakan peningkatan nilai SAKIP terus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan perencanaan dan efektifitas pemilihan program dan kegiatan (refocusing) yang



benar-benar mendukung kinerja sasaran strategis. Selain itu, berbagai kegiatan dan dokumen pendukung untuk meningkatkan kualitas SAKIP terus dilakukan diantaranya menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, melakukan review SOP, peningkatan kompetensi tim penyusun SAKIP perangkat daerah, dan menyusun Proses Bisnis Internal pemerintahan.

3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, pendidikan, derajat kesehatan, dan terwujudnya kesetaraan gender. Pada Arah Kebijakan ini dapat diuraikan capaiannya, sebagai berikut.

- a) Indikator IPM Kabupaten Blitar menunjukkan angka yang terus meningkat secara progresif. Data menunjukkan pada tahun 2020 IPM Kabupaten Blitar sebesar 70,58 dan naik 0,47 poin menjadi 71,05 di tahun 2021 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2022 menjadi sebesar 71,86. Capaian angka IPM tahun 2022 ini masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 72,14 dan IPM Nasional sebesar 72,29. Angka IPM Kabupaten Blitar termasuk kategori menengah di Indonesia dan menempati peringkat ke 22 tertinggi dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
- b) Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Blitar pada tahun 2021 yaitu 7,50 tahun dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 7,82 tahun, yang artinya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Blitar adalah setara dengan SMP kelas 2. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan taraf pendidikan masyarakat, meskipun rata-rata lama sekolah hanya sampai SMP kelas 2.
- c) Harapan Lama Sekolah Kabupaten Blitar pada tahun 2021 yaitu 12,63 tahun. Selanjutnya Angka Harapan Lama sekolah (HLS) tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,01



tahun 2022 sehingga menjadi 12,64 tahun. Ini berarti anak-anak usia 7 tahun berpeluang tamat SMA atau mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi tingkat pertama.

- d) Perbaikan pelayanan kesehatan memberikan kontribusi terhadap peningkatan UHH setiap tahun rata-rata 0,21 tahun. Angka UHH (LF SP2020) tahun 2022 adalah 74,86 tahun atau naik sebesar 0,37 tahun dibandingkan dengan UHH (LF SP2020) Tahun 2021 yang hanya 74,60 tahun. Capaian UHH ini berarti secara rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 73,98 tahun. Angka UHH Kabupaten Blitar dalam 5 tahun terakhir juga selalu di atas UHH Provinsi Jawa Timur.
- e) Angka pengeluaran perkapita penduduk tahun 2020 sedikit turun akibat pandemi COVID-19 dan sebagai dampak penurunan PDRB. Pada tahun 2021, Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan kembali menunjukkan kenaikan setelah tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan. Tren positif pada komponen Pengeluaran per Kapita menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang salah satunya direfleksikan melalui daya beli. Kenaikan ini seiring dengan perbaikan ekonomi setelah dampak pandemi. Tahun 2021 indikator pengeluaran perkapita mencapai Rp.10.757 ribu/orang/tahun dan tahun 2022 meningkat menjadi Rp.11.001 ribu/orang/tahun.
- f) IDG Kabupaten Blitar pada periode III RPJPD (2016-2020) cenderung mengalami peningkatan. Dengan memperhatikan nilai IDG ini diharapkan ke depan pengambilan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dapat terus dilanjutkan sehingga posisi perempuan akan semakin setara dengan laki-laki dan peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat



semakin nyata. Perkembangan IDG menunjukkan pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan menjadi 79,68 dari capaian 2020 sebesar 80,32. Namun kondisi pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan nilai IDG menjadi 81,92. Pencapaian ini membawa Kabupaten Blitar berada pada posisi tiga besar daerah di Jawa Timur yang memiliki IDG tertinggi setelah Kota Kediri dan Kota Surabaya.

- g) Nilai IPG Kabupaten Blitar diatas 90 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Blitar sudah mendekati seimbang antara laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Blitar pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibanding tahn sebelumnya menjadi 93,34. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan pada tahun berikutnya menunjukkan peningkatan yakni 93,85, menempatkan Kabupaten Blitar pada posisi 14 daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki IPG tertinggi.
- 4) Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa menjadikan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin semakin rendah. Pada Arah Kebijakan ini dapat di uraikan capaiannya, sebagai berikut.
- a) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama 3 tahun terakhir menunjukkan angka fluktuatif naik secara moderat. TPT Kabupaten Blitar pada tahun 2020 sebesar 3,82% dan terus naik menjadi 5,45% tahun 2022, walau demikian pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan mencapai 3,66%. Faktor pemicu kenaikan ini adalah resesi ekonomi global akibat Pandemi COVID-19 dan belum pulih sepenuhnya kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Blitar. Terjadi PHK besar-



besaran dari sektor formal produksi maupun matinya usaha informal, yang mendorong peningkatan pengangguran. Tahun 2021 seiring dengan kebijakan pemulihan ekonomi, angka TPT menurun sebesar 0,16% atau menjadi 3,66%. Hal ini sebagai dampak kebijakan Pemerintah Daerah bersama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang massif dan fokus pada pemulihan ekonomi dan sosial. Akan tetapi, pada tahun 2022 terjadi lonjakan kenaikan TPT yaitu sebesar 1,78% menjadi 5,45%. Banyak usaha mikro dan kecil yang mengandalkan bahan baku impor seperti kedelai, gandum, dll, mengalami harga yang fluktuatif, sehingga mendorong turun produksi dan pengurangan karyawan. Namun demikian, angka TPT Kabupaten Blitar tahun 2022 ini tetap masih di bawah angka TPT Jawa Timur yaitu 5,49% dan nasional 5,86%.

- b) Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 naik sebesar 0,32% menjadi 9,65% atau sekitar 112.650 jiwa dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2022 mencapai 8,71% atau 101.940 jiwa, turun 0,94% dari tahun 2021. Persentase penduduk miskin ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur yaitu 10,59% dan angka nasional sebesar 9,71%.
- 5) Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang. Pada Arah Kebijakan ini dapat di uraikan capaiannya, sebagai berikut.
- a) Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Blitar tahun 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan capaian tahun 2020. IKLH



Kabupaten Blitar yang sempat turun di tahun 2020 meningkat menjadi 65,53 pada tahun 2021 dan tahun berikutnya mencapai 66,80. Capaian IKLH dipengaruhi oleh meningkatnya nilai komponen pembentuknya yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan. Untuk indikator Indeks Kualitas Air memperoleh capaian kinerja di atasnya dari target yang telah ditentukan, yaitu dari angka target 55.2 tercapai 60,53 atau tercapai prosentase sekitar 109,66%. Sedangkan, untuk indikator Indeks Kualitas Udara dari target 86.8 juga mampu tercapai 87.63 atau sekitar 100,96% dan Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi capaian kinerjanya dari target 43.55 capaian kinerjanya adalah 39,08 atau hanya tercapai persentasenya sekitar 89,74%. Selain itu, capaian IKLH juga didukung oleh indikator Prosentase peningkatan pengelolaan kebersihan dengan target 80% dan realisasi kinerjanya adalah 80,27% atau tercapai 100,34%. Angka ini didapat dari jumlah wilayah perkotaan yang sudah terlayani pengangkutan sampahnya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa inovasi program, yaitu Bank Pohon dan Blitar Libas Sampah Plastik (Balistik). Bank Pohon adalah inovasi baru yang memadukan sistem pelayanan perbankan dalam hal manajemen keluar masuk bibit tanaman dengan model pengelolaan persemaian bibit permanen oleh BPDAS Brantas yang diterapkan di Kabupaten Blitar untuk mendukung percepatan Gerakan Blitar Menanam. Sementara itu, Balistik adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar pembatasan dan pengendalian sampah plastik sekali pakai.

- b) Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blitar pada tahun 2022 mencapai 141.51 yang berarti masuk pada kelas risiko Sedang. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding



tahun sebelumnya yang mencapai 154.75 atau kategori risiko Tinggi.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Blitar selama periode 2005 sampai dengan 2022 secara menunjukkan perkembangan yang baik, kecuali pada periode COVID-19 dan dampaknya sampai saat ini.
- b. Indikator makro pembangunan yang masih perlu mendapatkan prioritas penanganan yaitu pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Gini Ratio masih menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan kondisi awal RPJPD pada tahun 2005. Selain itu, nilai TPT dan jumlah pengangguran tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
- c. Perkembangan perekonomian Kabupaten Blitar menunjukkan mulai bergesernya struktur ekonomi dari sektor berbasis Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.
- d. Capaian indikator kinerja sasaran RPJMD selama 3 (tiga) periode yakni mulai tahun 2011 sampai 2022 cukup baik, sebagai berikut:
 - Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Periode 2011-2016 sebesar 201,39% dengan predikat Sangat Tinggi.
 - Rata-rata capaian 17 indikator sasaran pada tahun 2021 sebesar 74,10% dengan predikat Sedang.
 - Rata-rata capaian 28 indikator sasaran RPJMD pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun 2026 mencapai 96,94% dengan predikat Sangat Tinggi. Sedangkan rata-rata capaian kinerja tujuan RPJMD sebesar 96,75%. Pencapaian tersebut

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2022 sudah hampir mendekati target akhir RPJMD di tahun 2026.

Adapun kinerja indikator makro Kabupaten Blitar Tahun 2005 - 2022 sebagai berikut;

1. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi alat ukur dalam menilai standar hidup yang layak suatu daerah sehingga memberi gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan perkembangan kondisi kemiskinan Kabupaten Blitar tahun 2005-2022.



Gambar 2.27 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025

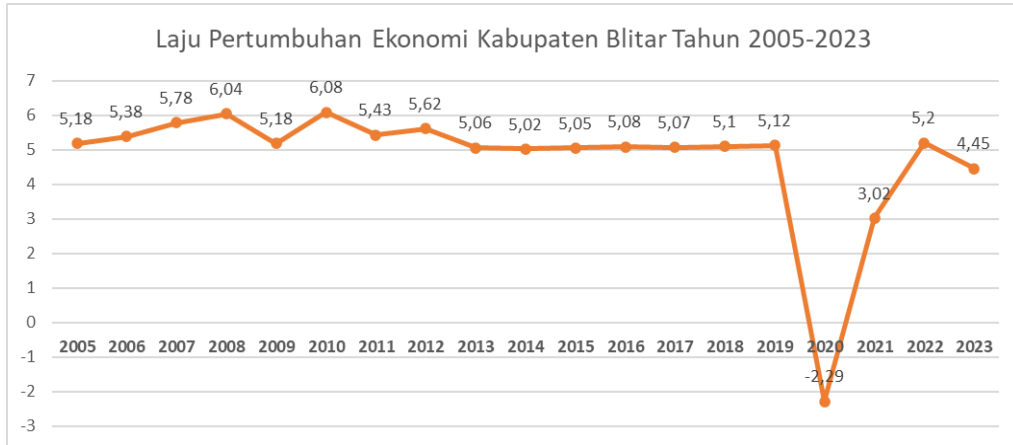
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Dari grafik diatas, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Blitar tahun 2005 sebesar 16,11 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 175,8 ribu jiwa dan pada tahun 2022 berhasil diturunkan menjadi 8,71 persen dengan jumlah penduduk miskin seba 101,94 ribu jiwa.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat digambarkan

melalui laju pertumbuhan ekonomi. Dinamika laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2005-2023 disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.28 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025

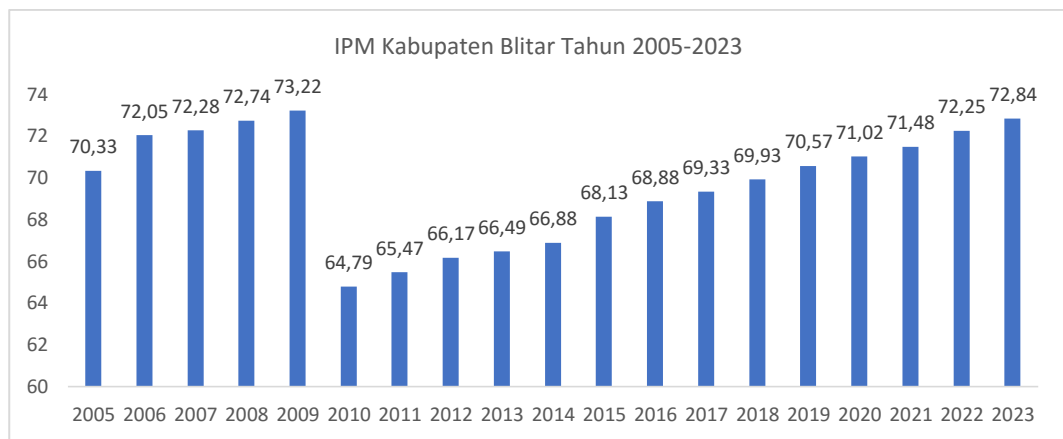
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar pada tahun 2005 sebesar 5,18 persen dan laju-nya hingga tahun 2012 mengalami fluktuasi, namun dalam kurun tahun 2013 hingga 2019 laju pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan. Pada tahun 2020, dampak dari pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi -2,29 persen, namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 perekonomian berangsur membaik dengan tumbuh positif masing-masing sebesar 3,02 persen dan 5,20 persen. Namun pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi kembali melambat pada 4,45 persen karena ketidakpastian situasi global yang mendorong terjadinya inflasi menyebabkan konsumsi masyarakat menurun. .

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu wilayah dapat digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran untuk menilai

kemajuan pembangunan manusia dengan fokus dimensi utama, yaitu IPM di Kabupaten Blitar pada tahun 2005-2023 disajikan sebagai berikut;



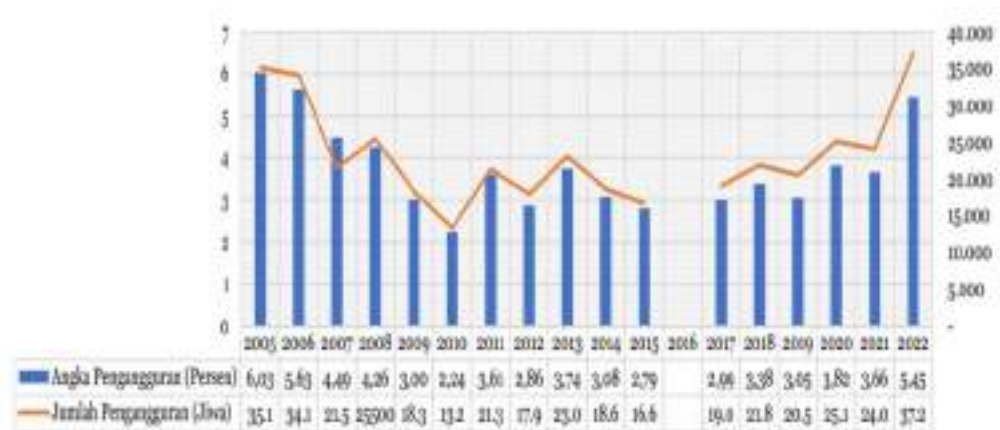
Gambar 2.29 Perkembangan IPM di Kabupaten Blitar Tahun 2005-2023

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Pada tahun 2005 IPM di Kabupaten Blitar tercatat sebesar 70,33. Pada tahun 2010 terjadi perubahan metode perhitungan sehingga nilai IPM menjadi lebih kecil, yaitu sebesar 64,79. Sepanjang tahun 2010 hingga 2023, IPM mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 64,79 menjadi 72,84.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah tergambar melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencakup kelompok angkatan kerja yang tidak sedang bekerja atau dalam tahap pencarian pekerjaan. Adapun grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Blitar tahun 2005-2022 sebagai berikut.



Gambar 2.30 Perkembangan Jumlah Pengangguran dan TPT di Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

TPT di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tersebut mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2005 sebesar 6,03 persen, kemudian mengalami tingkat pengangguran terendah pada tahun 2015 sebesar 2,79 persen namun pada akhir tahun 2022 meningkat menjadi 5,45.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisis proyeksi kependudukan

Proyeksi penduduk adalah perhitungan ilmiah untuk memperkirakan jumlah penduduk yang akan datang. Perhitungan proyeksi ini didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu angka kelahiran, angka kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang

lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang (Badan Pusat Statistik, 2018).

2.6.2.1 Proyeksi Kependudukan

Jumlah penduduk di suatu wilayah akan bertambah dari waktu ke waktu sehingga memiliki konsekuensi dalam penyediaan fasilitas dasar yang memadai untuk menjamin kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi kependudukan Kabupaten Blitar tersaji dalam tabel berikut;

Tabel 2.38 Proyeksi Penduduk di Kabupaten Blitar

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
1.253.550	1.273.450	1.318.010	1.354.680	1.416.912	1.472.044

Sumber: Buku Proyeksi Kependudukan Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2020-2035 dan Proyeksi Penduduk Tahun 2040 dan 2045 (BPS Jatim).

Adapun berdasarkan jenis kelamin, proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Blitar tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.39 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Blitar

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	630.506	639,66	659,70	675,72	701.282	724.193
Perempuan	623.044	633,79	658,30	678,96	715.629	747.852

Sumber: Buku Proyeksi Kependudukan Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2020-2035 dan Proyeksi Penduduk Tahun 2040 dan 2045 (BPS Jatim).

Seperti yang kita ketahui pertumbuhan penduduk pasti akan disertai dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja. Pertumbuhan penduduk usia kerja ini akan berdampak kepada kondisi ketenagakerjaan yang ada pada suatu daerah yaitu tersedianya tenaga kerja yang potensial yang akan menentukan perekonomian daerah tersebut dapat berkembang dengan pesat.



Jika penduduk usia kerja dibekali dengan kemampuan dan skill yang memadai ini bisa membuat suatu daerah itu akan maju hal ini dikarenakan semakin tingginya kualitas SDM nya sehingga daerah tersebut akan semakin berkembang.

Tabel 2.40 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Blitar

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	255.853	255.100	251.690	257.00	253.000	252.990
15-64 Tahun	866.677	876.630	893.940	895.320	950.820	976.470
>65 Tahun	131.020	141.730	172.380	202.350	213.080	242.580

Sumber: BPS & Bappedalitbang Kabupaten Blitar, 2024.

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana mengacu pada data proyeksi penduduk yang telah dilakukan oleh BPS. Dinamika kependudukan perlu diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah. Penentuan kebutuhan sarana dan prasarana mengacu SNI 03-1733- 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Proyeksi kebutuhan rumah atau tempat tinggal melibatkan analisis terhadap pertumbuhan populasi, perubahan gaya hidup, dan faktor-faktor demografis lainnya. Pertama-tama, pertumbuhan populasi menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kebutuhan perumahan. Dengan populasi yang terus meningkat, permintaan akan rumah atau tempat tinggal juga akan terus tumbuh. Selain itu, perubahan gaya hidup dan perkembangan ekonomi dapat mempengaruhi preferensi perumahan, seperti keinginan untuk tempat tinggal yang lebih modern, berkelanjutan, atau terintegrasi dengan teknologi. Proyeksi kebutuhan rumah yang efektif harus

mempertimbangkan perubahan-perubahan ini untuk memberikan pemahaman yang lebih akurat terhadap permintaan pasar.

Kedua, faktor demografis seperti penambahan jumlah keluarga, perubahan struktur keluarga, dan migrasi juga berkontribusi pada proyeksi kebutuhan rumah. Perkembangan di bidang pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur juga dapat mempengaruhi distribusi geografis kebutuhan perumahan. Perhitungan proyeksi ini menggunakan asumsi dari SNI 03- 1733-2004, yaitu jumlah penghuni rumah rata-rata adalah 5 jiwa dan kebutuhan kavling minimum per rumah adalah 100 m². Pada umumnya, 1 unit rumah ditinggali oleh 4 penduduk. Berikut ini adalah hasil proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal permukiman pada Kabupaten Blitar dari tahun 2025 hingga tahun 2045.

Tabel 2.41 Proyeksi Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Blitar

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.253.550	1.273.450	1.318.010	1.354.680	1.416.912	1.472.044
Proyeksi Kebutuhan Rumah	310.800	318.363	329.503	338.670	354.228	368.011

Sumber: BPS & Bappedalitbang Kabupaten Blitar

2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Daya dukung air merujuk pada kapasitas suatu wilayah atau sistem untuk menyediakan, mengelola, dan mempertahankan ketersediaan air yang memadai untuk keperluan manusia dan ekosistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung air mencakup jumlah curah hujan, ketersediaan sumber air permukaan dan tanah, serta manajemen air yang efisien. Daya dukung air sangat penting dalam konteks pertanian, industri, permukiman, dan ekosistem alami. Penting untuk memahami daya dukung air dalam konteks keberlanjutan, mengingat tekanan



yang semakin besar pada sumber daya air di seluruh dunia. Perubahan iklim, urbanisasi, dan pertumbuhan populasi yang cepat dapat mempengaruhi daya dukung air suatu wilayah.

Perhitungan kebutuhan air bersih dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kebutuhan Domestik

Kebutuhan domestik merupakan kebutuhan air bersih untuk menunjang aktivitas rumah tangga yang perhitungannya didasarkan pada jumlah penduduk. Kebutuhan air per orang per hari disesuaikan dengan standar kriteria serta pelayanan berdasarkan pada ukuran atau kategori kotanya.

Standar Kebutuhan Domestik

Kategori Kota	Jumlah Penduduk	Keb. Domestik (Ltr/Org/Hari)	Non Domestik
Metropolitan	> 1 juta	190	Berdasarkan survei masterplan
Kota Besar	500 ribu – 1 juta	170	
Kota Sedang	100 – 500 ribu	150	
Kota Kecil	20 – 100 ribu	130	20 – 30% keb. Domestik
Kota Kecamatan	3 – 20 ribu	100	10 – 20% keb. Domestik
Pedesaan	< 3000	60	-

Sumber: SK-SNI Air Bersih

Perhitungan kebutuhan air domestik didasarkan pada rumus berikut:

$$\text{Kebutuhan Air Domestik} = \text{Jumlah Penduduk} \times \text{Kebutuhan Air Per Kapita}$$

Sesuai dengan standar, Kabupaten Blitar pada tahun 2023 dengan penduduk jiwa 1.253.550 dapat diklasifikasikan sebagai metropolitan. Maka, kebutuhan domestik per kapita untuk air bersih adalah sebesar 190



liter/orang/hari. Begitu juga pada tahun 2045, jumlah penduduk di Kabupaten Blitar diprediksi akan menjadi 1.656.194 jiwa atau masih pada kategori metropolitan sehingga kebutuhan domestik per kapita untuk air bersih di Kabupaten Blitar diperkirakan sebesar 190 liter/orang/hari.

b. Kebutuhan Non Domestik

Kebutuhan non domestik meliputi kebutuhan air selain untuk menunjang kegiatan rumah tangga, yang dapat ditujukan untuk melayani kegiatan komersial, industri, fasilitas umum dan lain sebagainya. Proporsi/perkiraan kebutuhan air non domestik ini setiap tahun dianggap sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan domestik, yakni 10-20% dari kebutuhan domestik. Sementara itu, asumsi untuk tiap jenis kebutuhan air non domestik dapat diuraikan sebagai berikut:

- Fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik
- Kantor = 15% x kebutuhan domestik
- Komersial = 20% x kebutuhan domestik
- Industri = 10% x kebutuhan domestik

c. Kebocoran/Kehilangan Air

Kebocoran air dapat didefinisikan sebagai selisih atau perbedaan antara jumlah air yang diproduksi oleh produsen air dan jumlah air yang terjual kepada konsumen (*unaccounted water*) sesuai dengan yang tercatat pada meter air pelanggan. Secara umum, kebocoran air diasumsikan sebesar 10% dari kebutuhan total, dimana kebocoran ini dapat terjadi pada saat distribusi air ke tiap konsumen. Kebocoran/ kehilangan air terdiri dari 2 (dua) macam, yakni:

- 1) Kehilangan teknis, yang terjadi karena adanya perbedaan angka pemakaian air (volume) yang diukur



dari meter air pelanggan atau terjadi karena kebocoran pada jaringan perpipaan air bersih.

- 2) Kehilangan non teknis, yang terjadi karena kesalahan pembacaan meter air serta adanya kerjasama antara petugas dan konsumen maupun dikarenakan adanya sambungan pipa air bersih secara ilegal.

Sesuai dengan hasil proyeksi dimana jumlah penduduk pada Kabupaten Blitar terus mengalami peningkatan. Hal tersebut juga menyebabkan kebutuhan air bersih pada kawasan perencanaan juga mengalami peningkatan. Standar kebutuhan air bersih kemudian didasarkan pada beberapa perhitungan sebagai berikut:

- ☐ $\text{Kebutuhan Air Domestik} = \sum \text{Penduduk} \times \text{Kebutuhan Air per Kapita}$
- ☐ **Kebutuhan Non Domestik**
 - Fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik
 - Kantor = 15% x kebutuhan domestik
 - Komersial = 20% x kebutuhan domestik
 - Industri = 10% x kebutuhan domestik
- ☐ $\text{Hidran air} = 20\% \times (\text{kebutuhan domestik} + \text{kebutuhan non domestik})$
- ☐ $\text{Kehilangan Air} = 10\% \times (\text{kebutuhan domestik} + \text{kebutuhan non domestik})$
- ☐ $\text{Kebutuhan Total} = \text{kebutuhan domestik} + \text{kebutuhan non domestik} + \text{hidran}$
- ☐ $\text{Kebutuhan Rata-rata Harian} = \text{kebutuhan domestik} + \text{kebutuhan non domestik} + \text{hidran} + \text{kehilangan air}$
- ☐ $\text{Kebutuhan Harian Maksimum} = 1,15 \times \text{kebutuhan rata-rata harian.}$

Dengan menggunakan perhitungan tersebut, kebutuhan air bersih di Kabupaten Blitar pada masa mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.253.550	1.273.450	1.318.010	1.354.680	1.416.912	1.472.044
Proyeksi Kebutuhan Minum (L/O/H)	449.773.740	456.913.860	472.901.988	486.059.184	508.388.026	528.169.387

Sumber: BPS & Bappedalitbang Kabupaten Blitar, 2024.

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik

Sistem kelistrikan di wilayah perencanaan terutama bergantung pada Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) untuk mendistribusikan tenaga listrik. Selanjutnya, tenaga listrik disalurkan melalui gardu-gardu distribusi yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti industri, penerangan, rumah tangga, dan lain-lain. Pengelolaan jaringan listrik di wilayah perencanaan ini menjadi tanggung jawab dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Konstruksi instalasi distribusi primer dan sekunder umumnya dibangun dengan kapasitas sebagai berikut:

1. Instalasi distribusi sekunder (SUTM) dengan kapasitas 20-50Kv.
2. Instalasi distribusi tersier (SUTR) dengan kapasitas 220V.

Sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara maka ditentukan jarak minimal antara penghantar dengan tanah dan benda lain dengan aturan sebagai berikut.

Tabel 2.4 Jarak Minimal antara Penghantar dengan Tanah dan Benda Lain



NO	LOKASI	SUTT		SUTET	SUTM	SUTR	SALURAN KABEL	
		66 KV	150 KV	500 KV			SKTM	SKTR
1	Bangunan Beton	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
2	Pompa Bensin	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
3	Penimbunan Bahan Bakar	50 m	20 m	50 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
4	Pagar	3 m	20 m	3 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
5	Lapangan Terbuka	6,5 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
6	Jalan Raya	8 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
7	Pepohonan	3,5 m	20 m	8,5 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
8	Bangunan Tahan Api	3,5 m	20 m	8,5 m	20 m	1,5 m	20 m	20 m
9	Rel Kereta Api	8 m	20 m	15 m	20 m	20 m	20 m	20 m
10	Jembatan Besi/Tangga besi/kereta api	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
11	Lapangan Olah Raga	2,5 m	20 m	14 m	20 m	20 m	20 m	20 m
12	SUTT Lainnya penghantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, televisi	2,5 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m

Sumber: Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992

Kebutuhan akan listrik bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, maka kebutuhan listrik pada tahun berikutnya juga akan meningkat. Oleh sebab itu, perencanaan pengembangan jaringan listrik harus disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan listrik yang didasarkan pada jumlah penduduk. Ini menunjukkan bahwa pentingnya proyeksi untuk beberapa tahun ke depan terkait jumlah kebutuhan listrik per individu. Estimasi kebutuhan listrik untuk 20 tahun mendatang dapat dihitung sesuai dengan standar pelayanan PLN, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rumah tangga: 750 watt = 0,75 KVA/rumah tangga.
2. Industri & Perdagangan: 70% kebutuhan rumah tangga.
3. Fasilitas Sosial & Ekonomi: 15% kebutuhan rumah tangga.
4. Fasilitas Perkantoran: 10% kebutuhan rumah tangga.
5. Penerangan jalan: 1% kebutuhan rumah tangga.
6. Cadangan: 5% kebutuhan rumah tangga.

Berikut ini adalah tabel hasil proyeksi kebutuhan listrik di wilayah perencanaan Kabupaten Blitar:

Tabel 2.5 Proyeksi Kebutuhan Listrik (Kabupaten Blitar)

Uraian	Kondisi Tahun	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045



	2023					
Jumlah Penduduk	1.253.550	1.253.550	1.273.450	1.318.010	1.354.680	1.381.808
Jumlah Rumah Tangga (KK)	313.388	318.363	329.503	338.670	354.228	368.011
Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVa)	472.431,66	479.931,47	496.725,02	510.545,03	533.998,71	554.776,58

Sumber: BPS Jawa Timur & BPS RI (Proyeksi Penduduk 2020-2045) (diolah)

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan listrik di wilayah perencanaan terus meningkat dari tahun 2023 hingga tahun 2045. Pada awal periode tersebut, wilayah ini memiliki populasi sebanyak 1.253.550 jiwa yang tersebar dalam 313.388 rumah tangga pada tahun 2023. Proyeksi kebutuhan listrik untuk tahun 2045 dilakukan berdasarkan jumlah rumah tangga di wilayah Kabupaten Blitar. Perkiraan kebutuhan listrik rumah tangga dihitung dengan menggunakan standar 750 watt atau 0,75 KVA per rumah tangga, menghasilkan proyeksi total sekitar 554.776,58 KVa.

Peningkatan signifikan tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya strategi pengembangan infrastruktur listrik yang matang untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang seiring pertumbuhan penduduk dan sektor-sektor ekonomi di wilayah perencanaan. Pemetaan terhadap pola kebutuhan listrik ini menjadi kunci dalam menyusun rencana pengembangan yang efisien dan berkelanjutan untuk memastikan pasokan listrik yang memadai dan handal dalam mendukung kehidupan masyarakat dan perkembangan ekonomi di masa mendatang.

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan merujuk pada perkiraan atau prediksi mengenai jenis dan jumlah fasilitas kesehatan yang diperlukan dalam suatu wilayah atau komunitas



untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Proses penyusunan proyeksi kebutuhan sarana kesehatan melibatkan analisis berbagai faktor, seperti pertumbuhan populasi, karakteristik demografis, tingkat kebutuhan layanan kesehatan, prevalensi penyakit, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur kesehatan yang ada dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Penyediaan sarana kesehatan didasarkan pada jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Beberapa jenis sarana kesehatan yang dibutuhkan adalah puskesmas, puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan, rumah sakit, posyandu, balai pengobatan warga, Balai Kesehatan Ibu dan Anak/Klinik bersalin dan apotek.

Adapun dasar yang digunakan dalam menentukan kebutuhan sarana kesehatan lain menurut SNI 03-1733-2004 adalah:

1. Puskesmas melayani kurang lebih 120.000 jiwa penduduk.
2. Puskesmas pembantu, BKIA/klinik bersalin dan apotik melayani kurang lebih 30.000 jiwa penduduk.
3. Posyandu melayani kurang lebih 1.250 jiwa penduduk.
4. Rumah sakit melayani kurang lebih 240.000 jiwa penduduk.

Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blitar Berdasarkan SNI



Uraian	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.253.550	1.273.450	1.318.010	1.354.680	1.381.808	1.398.788
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Puskesmas	24	11	11	11	12	12
Rumah Sakit	8	5	5	6	6	6
Posyandu	1472	1019	1054	1084	1134	1178
Puskesmas Pembantu	67	42	44	45	47	49

Sumber: BPS Jawa Timur & BPS RI (Proyeksi Penduduk 2020-2045) (diolah)

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa kebutuhan fasilitas kesehatan sudah dapat mencukupi proyeksi hingga tahun 2045, namun jika didasarkan pada pertimbangan aspek geografis di Kabupaten Blitar dan untuk kepentingan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka kuantitasnya dapat ditambah sesuai kebutuhan. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar, tentu memerlukan kontrol dan pemantauan oleh pemerintah daerah agar sarana kesehatan yang ada saat ini dapat meningkat kualitas dan fasilitasnya sehingga dapat mencakup kebutuhan penduduk pada 20 tahun kedepan.

2.6.4 Persampahan

Analisis sistem manajemen sampah dilaksanakan untuk mengestimasi volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia di suatu kota. Untuk menilai besarnya akumulasi sampah, pedoman yang digunakan adalah SNI-3242-2008 sebagai acuan perhitungan, yang kemudian dibandingkan dengan standar kebutuhan prasarana yang tertuang dalam SNI 03-1733-2004. Hal ini bertujuan untuk meramalkan infrastruktur persampahan yang diperlukan di dalam wilayah studi. Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh SNI-3242-2008 dan SNI 03-1733-2004, prediksi untuk volume timbulan sampah dan infrastruktur yang diperlukan di

kota kecil ditetapkan sekitar 2,5 liter per orang per hari, sedangkan kota besar ditetapkan sekitar 3 liter per orang per hari.

Tabel 2.46 Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan	
	Sarana pelengkap	Status	Dimensi		
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi	-	-	
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah kecil		6 m ³		Gerobak mengangkut 3x seminggu
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³		Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m ³		
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/TPA lokal	-	Mobil mengangkut 3x seminggu	
	Bak sampah besar		25 m ³		
Kota (> 480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA	-	-	
	Tempat daur ulang sampah		-		

Sumber: Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan (SNI 03-1733-2004)

Menurut ketentuan tersebut, untuk meningkatkan layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di skala kecamatan, diperlukan fasilitas persampahan seperti kendaraan pengangkut sampah dan bak sampah berukuran 25 m³ di Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setempat. Hasil proyeksi volume sampah dan kebutuhan sarana pengelolaan serta menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi daam Penyelenggaraan Penanganan Sampah didapatkan rumus untuk total timbulan Sampah Ton per Hari dengan formula seperti = Total Jumlah Penduduk * Angka timbulan Sampah Perkapita, dan dengan ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. 47 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Berdasarkan SNI

Uraian	2023	2025	2030	2035	2040	2045



Jumlah Penduduk (jiwa)	1.253.550	1.273.450	1.318.010	1.354.680	1.416.912	1.472.044
Volume Sampah (L/org/hari)	3.760.650	3.820.350	3.954.030	4.064.040	4.250.736	4.416.132
Proyeksi Total Timbulan sampah Ton per Hari	10	10	11	11	13	14
Proyeksi Kebutuhan TPST	0	1	1	1	1	1

Sumber: BPS Jawa Timur & BPS RI (Proyeksi Penduduk 2020-2045) (diolah)

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2025 dengan penduduk 1.273.450 jiwa, maka total timbulan sampah ton per hari adalah mencapai 10 ton dan dengan jumlah tersebut dibutuhkan kurang lebih sejumlah 1 TPST. Pada tahun 2045 dengan proyeksi penduduk sejumlah 1.472.044 jiwa, maka total timbulan sampah ton per hari diperkirakan mencapai 14 ton dan diproyeksikan membutuhkan kurang lebih sejumlah 5 TPST, termasuk mengkonversi 3 TPA yang ada menjadi TPST. Kondisi eksisting saat ini Kabupaten Blitar memiliki 3 TPA, 65 TPS dan 15 TPS-3R.

Berkembangnya perkotaan dan meningkatnya jumlah penduduk membawa permasalahan baru dalam penanganan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, dan kerugian ekonomi sehingga pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) menjadi solusi yang tepat untuk menata limbah dengan tertib.

Oleh karena itu, ke depan perlu adanya peningkatan prasarana pengelolaan sampah dan pelibatan peran serta masyarakat dalam peningkatan efisiensi pengelolaan sampah rumah tangga maupun lingkungan hidup sehingga sampah tidak menjadi persoalan di masa mendatang.

2.6.5 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan



Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap unit administrasi pemerintahan, termasuk yang bersifat informal (RT, RW) dan formal (Kelurahan, Kecamatan). Penyediaan sarana pendidikan tidak semata-mata didasarkan pada jumlah penduduk yang akan dilayani, melainkan juga memperhatikan pendekatan desain ruangan untuk unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Hal ini berkaitan dengan pembentukan grup bangunan/blok yang sesuai dengan konteks lingkungan. Adapun penempatan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar sarana untuk memenuhi pelayanan pada area tertentu.

Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:

- a) berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
- b) optimasi daya tampung dengan satu *shift*;
- c) efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- d) pemakaian sarana dan prasarana pendukung;
- e) keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal /umum, yaitu



meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-Kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU/SMA/MAN).

Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- a) Taman Kanak-Kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- b) Sekolah Dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- c) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
- d) Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- e) sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.



Tabel 2.7 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1.250
2.	Sekolah Dasar (SD)	1.600
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4.800
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4.800

Sumber: SNI 03-1733-2004

Kondisi kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran di Kabupaten Blitar dihitung berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk usia 3-6 tahun untuk Taman Kanak-Kanak (TK), 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD), 13-15 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), 16-18 tahun untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut tabel proyeksi kebutuhan sarana Pendidikan Kabupaten Blitar.

Tabel 2.49 Proyeksi Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Blitar

Uraian	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.253.550	1.273.450	1.318.010	1.354.680	1.381.808	1.398.788
Proyeksi Fasilitas Pendidikan:						
TK/KB	1095	132	138	136	130	130
SD/MI	875	105	104	108	102	101
SMP/MTs	175	37	35	35	38	38

Per kondisi tahun 2024 jumlah satuan pendidikan negeri maupun swasta untuk tingkat TK/KB sejumlah 1.095 lembaga, tingkat SD sejumlah 666 lembaga dan tingkat SMP sejumlah 109 lembaga.



2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Nasional

Berdasarkan arah pembangunan wilayah, Pulau Sumatera akan difokuskan sebagai Koridor industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat Indonesia, Pulau Jawa difokuskan terhadap koridor industri berbasis inovasi, riset dan teknologi, Pulau Kalimantan akan berfokus pada koridor superhub ekonomi nusantara, Pulau Sulawesi akan berfokus pada koridor penunjang ekonomi IKN dan industri berbasis SDA, Pulau Bali-Nusa dan sekitarnya akan berfokus pada koridor superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara, Kepulauan Maluku akan berfokus pada koridor hub ekonomi biru timur, Pulau Papua akan berfokus pada koridor industri kimia dasar dan agro.

Arah kebijakan di Pulau Jawa yang berfokus pada industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh strategi progresif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat inovasi, maka penyediaan barang dan jasa dapat berlangsung lebih efisien serta meningkatkan daya saing usaha. Investasi dalam penelitian dan pengembangan juga dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan pengembangan teknologi atau metode baru yang berpotensi menambah daya saing daerah di level nasional maupun global. Fokus pada teknologi memastikan bahwa Jawa memasuki era industri 4.0 melalui pemanfaatan kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan *linkage* antarindustri. Dengan demikian, arah kebijakan ini berupaya menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif, berdaya saing, dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Jawa.



Sumber: Rancangan RPJPN 2025-2045.

Mengacu pada Rancangan RPJPN 2025-2025, Jawa sebagai Wilayah “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan, memiliki 5 (lima) prioritas sebagai berikut.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global) serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T;
2. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis industri ramah lingkungan, kawasan strategis pariwisata; kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan, dan kawasan strategis perkotaan;
3. Percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan;
4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastructure backbone dan feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik;

pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar;

5. Penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis

2.7.2 Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Daerah Provinsi

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 terdapat kawasan perkotaan yang berfungsi menjadi Pusat Kegiatan.



Sumber: Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Adapun pusat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)



PKN merupakan Kawasan permukiman yang diklasifikasikan sebagai PKN berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, lingkup nasional atau melayani beberapa provinsi. PKN di Provinsi Jawa Timur berada di: a) Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila). Potensi pengembangan pusat kegiatan nasional (PKN) Gerbangkertosusila dapat dilihat melalui nilai strategis dari Kawasan tersebut. Potensi nilai strategis PKN Gerbangkertosusila dijabarkan sebagai berikut:

1. Prioritas pembangunan ekonomi Jawa Timur dalam pengembangan kawasan industri strategis berada pada utara koridor Jawa Timur.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan KEK lainnya, industri halal, industri modern dan berorientasi ekspor, integrasi infrastruktur akses hub, pelabuhan lengkap dan akses tol logistik pasar domestik dan internasional.
3. Pengembangan Pasar Puspa Agro menjadi Jatim Food Hub dengan fungsi stabilisasi stok dan harga komoditas strategis.
4. Industri strategis dan berkelas dunia (industri migas, industri kimia, industri smelter logam, industri perikanan, industri maritim, industri komponen elektrik modern) Pesisir Benowo – Krembangan (Kota Surabaya), Pesisir Gresik – Manyar (Kab. Gresik), Pesisir Lamongan (Brondong – Paciran) dan Pesisir Tuban (Palang, Tuban, Jenu, Bancar).
5. Integrasi kawasan perikanan, agropolitan dan wisata pantai di Gresik Utara (Ujungpangkah – Panceng) dengan Wilayah Paciran – Brondong (Perikanan Tangkap dan Pelabuhan).
6. Industri di wilayah Gempol pada lintasan koridor strategis ke arah Malang dan Pasuruan.
7. Pengembangan industri untuk meningkatkan efisiensi produksi pada kawasan industri di Mojokerto.



8. Pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (green chemistry), dan teknologi nano hijau (green nanotechnology), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (renewable energy).
9. Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan budaya lokal, amenities, aksesibilitas, dan ancillary.
10. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan.
11. Pengembangan prasarana pendukung kegiatan industri (Transportasi dan jaringan energi meliputi gas, air serta telekomunikasi).
12. Hub pendidikan tinggi global (Global Higher Education Hub) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah; serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia.
13. Pengembangan Sentra Industri Maritim dan pelabuhan perikanan sebagai pusat perikanan tangkap serta dukungan pengembangan Ekonomi Biru.
14. Pengembangan wisata pada Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Surabaya – Ziarah Waliullah – Trowulan dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) antara lain Trowulan – Jombang dan sekitarnya, dan lain-lain.
15. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).
16. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan pendidikan vokasi bidang maritim dan migas.
17. Pengembangan dan pemanfaatan jaringan puskesmas guna memperluas jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja puskesmas yang belum terjangkau.
- 18.



Pemerataan pembangunan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) berdasarkan kebutuhan, pemerataan distribusi rumah sakit, distribusi dokter spesialis dasar sesuai dengan program pengampunan layanan prioritas.

b) Kawasan Perkotaan Malang, Potensi pengembangan pusat kegiatan nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Malang dapat dilihat melalui nilai strategis dari Kawasan tersebut, diantaranya:

1. Pengembangan Kawasan yang memiliki potensi ekonomi kreatif yang didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi berbasis produk unggulan.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari untuk pengembangan pendidikan, ekonomi kreatif dan lain-lain.
3. Hub pendidikan tinggi global (*Global Higher Education Hub*) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah; serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia.

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

PKW merupakan kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani lingkup kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota disekitarnya.

Pengembangan pusat kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui nilai strategis dari Kawasan tersebut. Potensi strategis pusat kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan komoditas unggulan berbasis pertanian, perhutanan, dan perikanan yang menjadi hulu Agropolitan dan Minapolitan antara lain pada Selingkar Bromo - Tengger -



- Semeru (BTS), Selingkar Wilis (termasuk Kelud dan Lawu), Selingkar Ijen, wilayah Tuban-Bojonegoro dan Pulau Madura.
2. Pengembangan sentra produksi dengan outlet pengumpul dan distribusi komoditas unggulan berupa pasar agribisnis yang menjadi input industri Agro.
 3. Pengembangan daya Tarik wisata di Kawasan Bromo – Tengger – Semeru dan Kawasan Selingkar Ijen dan Kawasan Selingkar Wilis dengan konsep ekowisata. Selanjutnya di wilayah-wilayah perkotaan perlu mengadopsi pengembangan pariwisata antara lain melalui penyelenggaraan Meeting, Incentives, Conférences, and Exhibitions (MICE).
 4. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global pada pusat aglomerasi Madiun, Kediri, dan Jember.
 5. Pengembangan Sentra Industri Maritim dan pelabuhan perikanan sebagai pusat perikanan tangkap serta dukungan pengembangan Ekonomi Biru.
 6. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan pendidikan vokasi bidang maritim dan migas.
 7. Pengembangan wisata pada Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).
 8. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).
 9. Pengembangan Kawasan Geopark (Taman Bumi) guna mendukung pengembangan kawasan strategis Provinsi serta memperkuat pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui pilar konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 10. Optimalisasi pengelolaan layanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien melalui pedoman praktik klinis rumah sakit



yang standar serta pelaksanaan sistem rujukan berbasis kompetensi

2.7.3 Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Daerah Kabupaten Blitar

Pusat Pertumbuhan wilayah merujuk pada daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan masyarakat. Pusat pertumbuhan wilayah biasanya memiliki berbagai faktor yang dapat mendukung pertumbuhan, seperti: Investasi, Infrastruktur, akses ke pasar dan sebagainya. Pusat pertumbuhan wilayah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut.

Sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

2.7.1 Pusat-Pusat Perkotaan

Dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), direncanakan pusat-pusat perkotaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Blitar



yang memiliki nilai strategis. Sistem pusat Perkotaan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Perkotaan Kanigoro berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perkantoran, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, industri agro, pusat pelayanan pendidikan, pusat peribadatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata

2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

a. Perkotaan Wlingi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, pusat pengembangan transportasi;

b. Perkotaan Srengat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, industri pengolahan, pusat pengembangan transportasi; dan

c. Perkotaan Sutojayan yang berfungsi sebagai pusat pemerintah kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, industri pengolahan, pusat pengembangan transportasi dan pusat rekreasi, olah raga dan wisata.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ini terletak di Perkotaan Nglegok, Perkotaan Kademangan, Perkotaan Talun, Perkotaan Selopuro, Perkotaan Kesamben, Perkotaan Wonodadi, Perkotaan Ponggok, Perkotaan Selorejo, Perkotaan Udanawu, Perkotaan Gandusari, Perkotaan Garum, dan Perkotaan Sanankulon yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, perikanan, industri pengolahan, pusat pendidikan, simpul transportasi dan pusat peribadatan.



4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
 - a. Perdesaan Plandirejo, Kecamatan Bakung;
 - b. Perdesaan Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto;
 - c. Perdesaan Serang, Kecamatan Panggungrejo;
 - d. Perdesaan Ringinrejo, Kecamatan Wates;
 - e. Perdesaan Salamrejo, Kecamatan Binangun; dan
 - f. Perdesaan Doko, Kecamatan Doko

2.7.2 Sistem Jaringan Prasarana Utama

1. Rencana sistem jaringan transportasi darat meliputi:
 - a. Jaringan jalan;
 - b. Jaringan perkeretaapian;
 - c. Jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. Prasarana lalu lintas; dan
 - e. Jaringan pelayanan lalu lintas;
2. Rencana jaringan jalan nasional meliputi:
 - a. Jalan nasional sebagai jalan Kolektor Primer meliputi: Batas Kabupaten Tulungagung – Batas Kota Blitar, Batas Kota Blitar – Batas Kota Wlingi, Jl. P. Sudirman (Wlingi), Jl. A. Yani (Wlingi), Jl. Duku (Wlingi), Jl. Langsep (Wlingi), Jl. Gajah mada (Wlingi), Jl. Hayam Muruk (Wlingi), Jl. Untung Suropati (Wlingi), Jl. Flamboyan (Wlingi), dan Batas Kota Wlingi – Batas Kabupaten Malang; dan
 - b. Sebagai jalan strategis nasional rencana meliputi : Bts. Kab. Tulungagung/ Kab. Blitar – P. Serang, dan P. Serang – Bts. Kab. Malang.
3. Rencana jaringan jalan Provinsi yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer meliputi:
 - a. Batas Kabupaten Kediri – Srengat;
 - b. Batas Kabupaten Tulungagung – Srengat; dan
 - c. Srengat - Batas Kota Blitar.



4. Rencana jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan lokal primer, meliputi:
 - a. Jalan penghubung antar ibukota kecamatan di Kabupaten Blitar;
 - b. Jalan menuju wisata Gunung Kelud melalui Garum, Nglegok, Gandusari;
 - c. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antara Wlingi – Krisik arah Selorejo (Kabupaten Malang) ;
 - d. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antara Kesamben –Binangun – Wates arah Pantai Jolosutro dan arah ke Kecamatan Donomulyo (Kabupaten Malang) ;
 - e. Pengembangan jalan strategis Kabupaten yang menghubungkan : Ruas Jalan Kanigoro - Selopuro - Kesamben ; Ruas Jalan Kawedusan - Ponggok - Sidorejo - Bts. Kabupaten Kediri ; Ruas Jalan Kademangan - Suruhwadang - Gawang / Wonotirto - Pantai Tambakrejo; Batas Kota Blitar - Kanigoro – Sutojayan – Panggungrejo - Pantai Serang;
 - f. Peningkatan jaringan jalan lingkaran berupa pelebaran jalan meliputi:
 - 1) Jalan lingkaran Kanigoro Utara meliputi ruas Tlogo – Banggle, Ruas Banggle- Sawentar, Ruas Sawentar – Sombong;
 - 2) Jalan lingkaran Kanigoro Selatan meliputi ruas Sambong – Satreyan, Ruas Satreyan – Karangsono, Ruas Karangsono – Gogodesa, Ruas Gogodesa– Jatinom, Ruas Jatinom – Minggirsari;
 - 3) Jalan lingkaran Kota Blitar Utara meliputi ruas Garum – Ngrobong, Ruas Ngrobong – Jiwud, Ruas Jiwud – Bangsri, Ruas Bangsri – Sumberingin, Ruas Sumberingin – Sumber, Sumber – Kalipucung.



- 4) Jalan lingkar Kota Blitar Selatan meliputi ruas Kalipucung – Bendosari, Ruas Bendosari – Purworejo, Ruas Purworejo – Bendowulung, Ruas Bendowulung – Tuliskriyo;
 - 5) Jalan lingkar Wlingi Utara meliputi Kaweron – Simpang Wlingi dan Jembatan Kali Lekso;
 - 6) Jalan lingkar Srengat meliputi ruas Tagokan – Langon, Ruas Langon – Kebonduren, Ruas Sumberdiren – Ponggok, Ruas Ponggok – Kawedusan; dan
 - 7) Jalan menuju lapangan terbang Ponggok meliputi ruas Kawedusan – Maliran, Ruas Maliran – Sumber, Ruas Ponggok – Sidorejo.
5. Rencana jaringan perkeretapian meliputi:
- a. Rencana pengembangan jalur perkeretaapian, pengembangan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan angkutan penumpang dan angkutan barang;
 - b. Rencana Pengembangan jalur kereta api umum berupa jalur kereta api ganda pada jalur lingkar : Surabaya (Semut)- Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)- Sidoarjo-Bangil-Lawang-Malang-Blitar-Tulungagung-Kediri-Kertosono-Surabaya;
 - c. Rencana pengembangan jalur perkeretaapian akan dikembangkan jalur kereta api Kediri – Tulungagung – Blitar kelas III, dan penataan jalur perkeretaapian di wilayah Kabupaten Blitar yang meliputi jalur Tulungagung – Blitar – Banyuwangi, KA Penataran jurusan Blitar – Malang – Surabaya, KA Doho jurusan Blitar – Kertosono – Surabaya, KA Mataremaja dan Gajayana jurusan Malang – Blitar – Jakarta, KA Malabar jurusan Malang – Blitar – Bandung; dan



- d. Prasarana kereta api yang ada di Kabupaten Blitar terdiri dari 5 (lima) unit stasiun kereta api, yaitu meliputi : stasiun kereta api Kesamben, stasiun kereta api Wlingi, sebagai stasiun induk kabupaten, stasiun kereta api Talun, stasiun kereta api Pohgajih. dan stasiun kereta api Garum.
6. Rencana jaringan sungai, danau dan penyeberangan yang berfungsi sebagai sarana penghubung alternatif antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung yang dilintasi Sungai Brantas meliputi Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Srengat.
7. Rencana prasarana lalu lintas meliputi:
 - a. Pengembangan Terminal tipe B yaitu Terminal Wlingi di Kabupaten Blitar;
 - b. Pengembangan terminal tipe C yang berada di Krisik, Semen, Kanigoro, Penataran, Gawang, Kesamben (brongkos), Kademangan, Lodooyo dan Srengat;
 - c. Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai;
 - d. Pengembangan jembatan; dan
 - e. Pengembangan Terminal Kargo yang berada di Kecamatan Garum dan Kecamatan Sanan Kulon.
8. Rencana jaringan pelayanan lalu lintas meliputi:
 - a. Pengembangan angkutan penumpang antar kota dan antar kabupaten meliputi:
 - 1). Blitar – Jakarta;
 - 2). Blitar – Surabaya;
 - 3). Blitar – Denpasar;
 - 4). Blitar – Sumatera;
 - 5). Blitar – Kota Malang;
 - 6). Blitar – Pare, Kediri – Kota Surabaya; dan
 - 7). Blitar – Tamanan, Kota Kediri – Anjuk Ladang, Kabupaten Ngajuk.



- b. Pengembangan trayek angkutan penumpang dengan jalur lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Tulungagung guna mendukung keberadaan potensi-potensi pariwisata yang direncanakan akan dilalui oleh jalur lintas selatan.
- c. Pengembangan trayek angkutan penumpang yang menghubungkan Kota Blitar dengan lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Kabupaten Blitar bagian selatan, yaitu:
 - 1) Kota Blitar – Kademangan – Bakung – Goa Umbul Tuk - Pantai Pangi;
 - 2) Kota Blitar – Kademangan – Wonotirto – Pantai Tambakrejo;
 - 3) Kota Blitar – Sutojayan – Panggungrejo – Pantai Serang;
 - 4) Kota Blitar – Sutojayan – Binangun – Wates – Pantai Jolosutro; dan
 - 5) Fungsi angkutan pedesaan dapat dioptimalkan, terutama pada daerah yang mempunyai pola topografi yang terjal dan belum terlayani sarana angkutan pedesaan untuk menunjang kelancaran sistem perangkutan.

Pengembangan rute transportasi ini perlu studi kelayakan lebih lanjut.
- d. Peningkatan status terminal diantaranya Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan dan bila dimungkinkan menghidupkan kembali terminal Srengat;
- e. Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai; dan
- f. Pemasukan tempat pengujian bermotor yang berada di Kecamatan Srengat dan Kecamatan Wlingi.



BAB - III



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Blitar untuk periode 2025-2045. Pembentukan permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar dilakukan atas hasil analisis Pembangunan periode sebelumnya. Tahapan yang dilakukan diantaranya adalah dengan menelaah capaian periode sebelumnya, lalu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi atas capaian tersebut melalui forum diskusi dengan pihak terkait. Kemudian, hasil telaahan tersebut dibobotkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu mempertimbangkan komponen-komponen jangka panjang.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan dalam pembangunan daerah adalah adanya “kesenjangan harapan” antara kinerja pembangunan saat ini dengan kinerja pembangunan yang direncanakan, serta antara apa yang harus dicapai di masa depan dengan keadaan aktual pada saat perencanaan. Beberapa permasalahan pada Kabupaten Blitar dapat uraikan sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan modal utama pembangunan yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Blitar tahun 2023 sebesar 72,84 dan berada pada urutan 24 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Masih cukup rendahnya nilai IPM ini disebabkan oleh rendahnya tingkat Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Blitar, dimana tahun 2023 masih mencapai 7,83 tahun. Selain itu, tercatat jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blitar per Desember 2023 sejumlah 9.900 anak.



Selain itu masih ditemukannya kasus kekerasan pada perempuan dan anak serta cukup tingginya kasus perkawinan anak di Kabupaten Blitar dimana rata-rata dalam kurun waktu 2021-2023 sejumlah 300 anak menjadi tantangan untuk memperluas akses terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan keberdayaan perempuan sekaligus mengurangi ketimpangan gender.

2. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari tingkat kemiskinan di suatu daerah. Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Blitar cenderung lambat dan tingkat kesenjangan pendapatan masih tinggi yang dicerminkan dari naiknya Indeks Gini tahun 2022 senilai 0,335 menjadi 0,360 pada 2023. Hal ini harus menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Blitar meskipun angka kemiskinan tahun 2023 merupakan angka terendah selama 20 tahun terakhir dan merupakan salah satu dari 4 kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah se-Jawa Timur.

3. Rendahnya Produktivitas Perekonomian

Sektor pertanian merupakan tulang punggung atau menjadi sektor penyangga perekonomian Kabupaten Blitar dengan sumbangannya terhadap PDRB terbesar dibanding sektor-sektor lain. Tercatat, pada tahun 2023 *share* sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,75%. Meskipun menurun dibanding tahun sebelumnya dengan *share* sebesar 31,05% dan sektor ini masih mendominasi perekonomian Kabupaten Blitar, namun laju pertumbuhannya cenderung fluktuatif dan relative rendah dibanding sektor lain, yaitu rata-rata kurang dari 2 persen per tahun. Apabila jika melihat *data series* PDRB dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi pergeseran struktur ekonomi, yaitu kontribusi sektor industry pengolahan dan sektor perdagangan



yang mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2023, kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 14,89% dan sektor perdagangan mencapai 19,13%.

Sektor basis Kabupaten Blitar adalah pertanian namun industri hasil pengolahan produk pertanian belum banyak berkembang di Kabupaten Blitar, padahal potensinya di perkebunan dan pertanian hortikultura cukup besar. Untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan hilirisasi pertanian sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah maupun kesejahteraan petani, maka perlu didorong pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas pertanian.

4. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur diantaranya melalui nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi. Predikat SAKIP selama periode 7 tahun terakhir masih stagnan dengan predikat “B” atau Baik. Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) telah mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 58,00 dan di tahun 2023 menjadi 71,38 namun masih perlu dioptimalkan.

5. Belum meratanya infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan dasar publik

Belum meratanya infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan dasar publik dapat berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah. Selain itu, masih belum meratanya ketersediaan infrastruktur baik infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi, di wilayah Kabupaten Blitar salah satunya disebabkan oleh kondisi geografis.

6. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Perlunya Penguatan Mitigasi Bencana



Pembangunan perlu diimbangi dengan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan. Tekanan terhadap lingkungan hidup semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, serta perubahan iklim. Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar yang diindikasikan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan bahwa kinerjanya perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan dalam lima tahun terakhir nilai IKLH berfluktuatif dan memiliki kecenderungan menurun. IKLH dalam periode tahun 2019-2023 menurun dari 69,90 menjadi 64,27. Masih belum optimal dan meratanya sarana prasarana persampahan serta rendahnya kesadaran pemilahan sampah rumah tangga perlu mendapat perhatian khusus. Di sisi lain, Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah rawan bencana di Jawa Timur. Potensi bencana di Kabupaten Blitar cukup beragam yaitu banjir, gunung meletus, tanah longsor, bencana tsunami, angin puting beliung hingga bencana kekeringan. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blitar tahun 2023 tercatat sebesar 158,82 yang berkategori Tinggi, sehingga masih perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana.

7. Perlunya penguatan nilai-nilai budaya sosial menghadapi globalisasi/kemajuan teknologi

Perkembangan massif teknologi informasi serta meluasnya globalisasi membuat makin tipisnya batas antar negara. Pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan pertukaran budaya antar daerah menjadi lebih terbuka. Hal ini perlu diimbangi dengan pelestarian budaya local dan penguatan nilai-nilai sosial masyarakat.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merujuk pada keadaan atau situasi yang memiliki potensi untuk menjadi tantangan atau peluang bagi



suatu daerah di masa yang akan datang. Fokus utama dari isu strategis adalah pada prospek, yaitu hal-hal yang pada saat ini mungkin belum menjadi permasalahan, namun memiliki potensi untuk berkembang menjadi masalah di lokasi atau waktu tertentu di masa depan. Isu strategis dianggap sebagai permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dan tindakan strategis untuk mengatasi dampaknya.

Dalam konteks Kabupaten Blitar, proses identifikasi isu strategis menjadi langkah penting dalam menyusun rencana pembangunan yang efektif. Dengan menemukan dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang mungkin muncul di Kabupaten Blitar, upaya dapat diarahkan untuk merancang solusi yang tepat waktu dan mengurangi dampak negatifnya. Dengan demikian, isu strategis berperan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan pembangunan yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah tersebut.

3.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional didasarkan pada megatren global yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045

1. Isu Strategis dan Tantangan Megatren Global penting dalam 20 tahun kedepan yang akan merubah paradigma pembangunan global, meliputi:
 - i. Perkembangan demografi global
Populasi dunia diperkirakan akan tumbuh dari 7,6 miliar saat ini menjadi 9,8 miliar pada tahun 2050 (PBB, 2017). Pertumbuhan ini akan didistribusikan secara tidak merata



antar wilayah dan masing-masing negara dan jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat di seluruh dunia karena menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir

ii. Geopolitik dan geoekonomi

Adanya Dinamika geopolitik global kedepan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perang anantara Rusia dan Ukraina meningkatkan kewaspadaan global terhadap protensi konflik geopolitik kedepan dikawasan lainnya. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Pada tahun 2050, kontribusi ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71%. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju.

iii. Perkembangan teknologi

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi dan berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi sehingga perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat.

iv. Peningkatan urbanisasi dunia

Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan yang tidak memadai dan kurang terencana



dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh sehingga perlu dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat untuk memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

v. Konstelasi perdagangan global

Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi. Kerja sama Kawasan dengan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

vi. Tata kelola keuangan global

Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dan *FinTech*.

vii. Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*)

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia.



- viii. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumberdaya alam
Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.
- ix. Perubahan iklim
Dengan adanya krisis peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.
- x. Pemanfaatan luar angkasa (*space economy*); Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan dari fase pembangunan sebelumnya, negara ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat di masa mendatang. Perubahan-perubahan ini menimbulkan tantangan bagi pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045, yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi,



ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan, infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Sejumlah isu dan tantangan pembangunan pun muncul sebagai hasil dari dinamika ini.

A. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.

Rata-rata produktivitas yang tercermin dalam *Total Factor Productivity (TFP)* Indonesia selama periode 2005-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,66. Capaian ini mengalami ketertinggalan relatif bila dibandingkan dengan Korea Selatan yang berhasil mencapai pertumbuhan sebesar 1,61 pada periode menuju negara maju antara tahun 1971-1995, serta dengan Tiongkok yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,60 selama periode 2005-2019. Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tertinggal, terutama pada perempuan, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, keterbatasan dalam kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kurangnya inovasi. Kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum juga masih lemah. Dampak dari produktivitas rendah ini juga terlihat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melambat. Pada periode 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh dengan rata-rata 5,7 persen, namun kemudian melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Selanjutnya, kapasitas ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi semakin tertekan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai rata-rata 4,0 persen selama tahun 2015-2022. Selain itu, produktivitas yang rendah telah menyebabkan penurunan ekonomi potensial, dan bahkan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial di bawah 5 persen.



B. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)

Agar negara dapat meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas tinggi serta berteknologi tinggi, IPTEKIN harus memiliki kapasitas yang memadai untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Namun, komitmen pemerintah yang masih kurang, terutama dalam hal alokasi anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), berdampak negatif pada kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kondisi ini menyebabkan ketertinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Korea Selatan yang memiliki angka 4,81. Pada tahun 2005, Thailand mencapai nilai 1,31, sementara Malaysia mencapai nilai 1,04. Kapasitas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi memiliki dampak signifikan pada pengembangan pembangunan serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berbagai inovasi yang muncul dari pengembangan pengetahuan dan teknologi mencerminkan sejauh mana suatu negara mampu berkembang.

C. Kuantitas dan Kualitas SDM peneliti belum memadai,

Rasio jumlah peneliti per satu juta penduduk di Indonesia hanya mencapai 388, yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand (1.790), Singapura (7.287), dan Korea Selatan (8.408). Lemahnya ekosistem penelitian dan inovasi mengakibatkan hasil penelitian sulit dimanfaatkan karena kurangnya kolaborasi antara lembaga penelitian dan industri, serta keterbatasan kerja sama domestik dan internasional. Pada tahun 2021, jumlah paten yang diajukan oleh Indonesia hanya sebanyak 1.445, jauh tertinggal



dibandingkan dengan Malaysia (1.863), Singapura (9.766), dan Korea Selatan (267.527). H-Indeks Indonesia baru mencapai 284, yang jauh ketinggalan dari Malaysia (415), Singapura (697), dan Korea Selatan (810). Selain itu, Indonesia menghadapi berbagai masalah, termasuk kurangnya kesadaran ilmiah. Sejumlah negara di kawasan ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, melakukan lebih banyak riset daripada Indonesia. Dalam peringkat jumlah publikasi penelitian di seluruh dunia, Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 234 negara, menurut data SCImago on Research. Ini mengindikasikan bahwa hanya 1 dari setiap 10 dosen di Indonesia yang aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kendala dalam penggunaan anggaran, seperti kwitansi pembayaran, dan ketersediaan anggaran karena adopsi sistem tahunan atau tahunan jamak, menjadi hambatan bagi peneliti untuk meningkatkan produktivitasnya. Hal ini terjadi karena anggaran hanya tersedia pada tahun pertama, sehingga penelitian yang memerlukan waktu bertahun-tahun tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

D. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.

Penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan dalam mengadopsi teknologi dan memanfaatkan hasil riset serta inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan adanya ekonomi biaya tinggi yang dipengaruhi oleh biaya logistik dan tingkat suku bunga. Sebaliknya, penurunan produktivitas sektor pertanian disebabkan oleh lambatnya



regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan, terbatasnya adopsi teknologi, kendala akses keuangan, absennya standar proses, kelemahan lembaga ekonomi petani dan nelayan yang legal, dan penurunan dukungan lahan pertanian. Dampak dari berbagai faktor ini adalah terus berkurangnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, menurun dari 27,41 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 18,34 persen pada tahun 2022.

E. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata

Pariwisata telah menjadi potensi yang terus diperluas di berbagai daerah, dengan keberhasilan pemanfaatan potensi ini dipengaruhi oleh kondisi geografi, kemampuan pengelolaan, dan potensi usaha lokal yang menjadi branding dan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Namun, kendala aksesibilitas yang masih terbatas dan tingkat penerapan pariwisata berkelanjutan yang rendah menjadi faktor yang membatasi pencapaian kinerja pariwisata, menjadikannya belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi yang ada. Selain itu, dampak negatif yang muncul termasuk preferensi pasar dan disrupsi yang terkait dengan digitalisasi, teknologi, dan kebencanaan. Keterbatasan kebijakan terkait transformasi digital juga berkontribusi pada kurangnya pengembangan potensi ekonomi kreatif di sektor pariwisata. Seiring dengan perubahan tren dan dinamika global, penting bagi daerah untuk mengatasi kendala-kendala ini agar dapat memanfaatkan potensi pariwisata secara lebih optimal.

F. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut

Potensi ekonomi laut di Indonesia tinggi, namun belum dimanfaatkan secara efektif untuk menciptakan nilai tambah, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan secara inklusif dan



berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru masih menghadapi hambatan, termasuk rendahnya pemanfaatan sumber daya laut, kurangnya pengembangan Sea Lines of Communication (SLOC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang menyebabkan PDB Kemaritiman masih berada pada tingkat sekitar 7,60 persen. Rendahnya kontribusi ini juga dipengaruhi oleh kurang optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pembudidayaan perikanan, kurangnya diversifikasi industri dan sektor-sektor baru yang memanfaatkan sumber daya laut untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, serta terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Tantangan lainnya melibatkan rendahnya penanganan sampah plastik, tingginya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF), serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi dalam pemanfaatan ruang laut. Meskipun demikian, peran sektor kemaritiman dalam perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan mengingat potensi ekonomi kelautan yang besar.

G. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi

UMKM dan koperasi memainkan peran signifikan dalam menyerap tenaga kerja, meskipun kontribusinya terhadap perekonomian secara relatif rendah. Pada tahun 2019, proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha, dengan kemampuan menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen. Meski demikian, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,51 persen pada tahun tersebut, sedangkan proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen. Tantangan yang dihadapi UMKM dan koperasi melibatkan sejumlah aspek, termasuk kebanyakan UMKM yang



memiliki pekerja dengan keahlian rendah (*low-skilled workers*) dan beroperasi di sektor bernilai tambah rendah. Selain itu, rendahnya pemanfaatan teknologi, kurangnya inovasi, serta minimnya investasi untuk pengembangan usaha menjadi kendala. Masalah lainnya melibatkan kapasitas pengelolaan yang rendah, partisipasi yang kurang dalam rantai nilai produksi, dan jumlah koperasi yang terlibat dalam sektor riil yang juga tergolong rendah.

H. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal

Sebesar US\$7.274,9 per pekerja, di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US\$8.449.0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di antaranya rendahnya kualitas SDM (56.3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

I. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan

Untuk memastikan kelangsungan kapasitas ekosistem dan kemampuannya untuk menahan dampak lingkungan, pembangunan harus menerapkan konsep ekonomi berkelanjutan secara komprehensif. Salah satu tantangan utama dalam penerapan ekonomi berkelanjutan adalah tingginya ketergantungan pada energi fosil. Hal ini tercermin dalam data bahwa pada tahun 2021, sekitar 87,1 persen dari produksi listrik berasal dari sumber energi fosil,



dengan sekitar 1.317 unit emisi gas rumah kaca berasal dari sektor pembangkit listrik dan transportasi.

J. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.

Andil energi baru terbarukan (EBT) dalam portofolio energi nasional terus mengalami peningkatan, naik dari 4,24 persen pada tahun 2005 menjadi 12,30 persen pada tahun 2022. Meskipun demikian, kenaikan ini mencerminkan fakta bahwa penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil masih tetap tinggi. Pada akhir tahun 2020, tingkat elektrifikasi di pedesaan Indonesia mencapai sekitar 98,67 persen, namun secara keseluruhan, kualitas akses listrik masih memerlukan perbaikan. Terdapat beberapa wilayah yang masih belum terjangkau oleh pasokan listrik dan memerlukan implementasi kebijakan afirmatif untuk memastikan bahwa mereka juga mendapatkan akses listrik.

K. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau

Dampak pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai hasil dari aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan, yang sering disebut sebagai ekonomi "brown." Dampak negatif ini terlihat dalam peningkatan jumlah limbah berbahaya dan beracun (B3) yang mencapai sekitar 74 juta ton pada tahun 2022. Dalam hal limbah domestik, hanya sekitar satu persen rumah tangga di Indonesia yang dilayani oleh Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sementara itu, tantangan lain melibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem, seperti pertambangan eksploitatif, serta



peningkatan penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang berkontribusi pada degradasi hutan, deforestasi, dan penurunan keanekaragaman hayati. Pentingnya penguatan penegakan hukum dan regulasi, termasuk sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong ekonomi berkelanjutan, juga menjadi perhatian utama

L. Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas

Saat ini, Indonesia masih belum memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai, baik dari segi penawaran maupun permintaan, untuk mempercepat pemanfaatan sumber daya digital secara optimal guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan digital, termasuk kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tantangan ini melibatkan kapabilitas dan kapasitas jaringan, manajemen spektrum, serta kurangnya implementasi kebijakan TIK yang efektif.

M. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas

Penyebab utama dari situasi ini adalah konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Pulau Jawa, yang menyumbang sekitar 57,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022. Infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan biaya logistik menjadi tinggi. Selain itu, masih banyak regulasi yang menjadi hambatan bagi perkembangan ekonomi, dan terdapat disparitas dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di luar Pulau Jawa.

N. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi



Perbedaan tersebut tercermin dalam elastisitas pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap pertumbuhan PDB per kapita perkotaan di Indonesia, yang hanya sekitar 14 (artinya, pertumbuhan penduduk sebesar 1 persen hanya meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita perkotaan sebesar 14 persen). Sebaliknya, di Tiongkok, angka elastisitasnya mencapai 3,00. Selama 10 tahun terakhir, tingkat urbanisasi di Indonesia hanya tumbuh sekitar 0,67 persen per tahun, sementara di Tiongkok, tingkat urbanisasinya mencapai 1,21 persen per tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain keterbatasan konektivitas antara pusat pertumbuhan perkotaan dan wilayah sekitarnya, ketidakseimbangan dalam pembangunan di berbagai wilayah perkotaan dan antara perkotaan dan pedesaan, keterbatasan kapasitas pengelolaan perkotaan, serta penurunan kualitas lingkungan perkotaan.

O. Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, khususnya untuk mencapai tingkat kemiskinan nol persen

Pembangunan sektor kesehatan dihadapi oleh berbagai tantangan sebagai dampak dari transisi demografi, yang diiringi dengan peningkatan mobilitas penduduk, urbanisasi, perubahan pola epidemiologi, dan perilaku hidup yang tidak sehat. Tantangan ini meningkatkan beban penyakit, termasuk penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan yang berkaitan dengan penduduk lanjut usia dan kesehatan mental. Selain itu, akses yang terbatas ke pangan yang sehat dan pola konsumsi yang tidak baik dapat menyebabkan masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan. Sistem kesehatan harus



memiliki kemampuan untuk merespons berbagai perubahan, mengadopsi kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan, menghadapi risiko kesehatan global, seperti potensi terjadinya pandemi, serta harus mampu mengatasi ketimpangan dalam akses terhadap pangan, lingkungan yang sehat, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Pembiayaan kesehatan juga harus ditingkatkan dengan mengadopsi inovasi dalam pembiayaan kesehatan

P. Kualitas pendidikan masih rendah

Kualitas pendidikan yang masih rendah dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang masih kurang memadai. Jumlah guru yang memiliki kompetensi tinggi dan status profesional masih terbatas, dan mereka belum tersebar merata di seluruh daerah dan unit pendidikan. Terdapat keterbatasan dalam jumlah, kualitas, dan distribusi guru, di mana kurang dari 50 persen guru memiliki sertifikat pendidik di semua jenjang pendidikan. Pendidikan nonformal juga masih belum memadai, dengan 42 persen lembaga pendidikan nonformal belum terakreditasi atau hanya memiliki akreditasi C. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global juga masih rendah. Hanya sedikit perguruan tinggi Indonesia yang berhasil masuk dalam peringkat 500 terbaik dunia, yaitu hanya lima perguruan tinggi. Tantangan besar terkait produktivitas riset dan inovasi di perguruan tinggi juga masih ada. Meskipun terjadi peningkatan dalam jumlah publikasi ilmiah selama periode 2011-2021, kualitas publikasi masih rendah, yang ditunjukkan oleh rasio sitasi per publikasi yang hanya mencapai 0,39 pada tahun 2021.



Q. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketengakerjaan untuk pekerja informal

Tantangan dalam penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi mencakup beberapa aspek, salah satunya adalah pelaksanaan bantuan sosial yang masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Faktor ini dipengaruhi oleh penggunaan data yang masih terfragmentasi dan belum diperbaharui secara sistematis, yang berdampak pada tingginya tingkat kesalahan dalam menentukan sasaran bantuan. Selain itu, pelaksanaan bantuan sosial juga belum adaptif dan belum mampu membangun ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Tingkat efektivitas bantuan sosial juga masih rendah, dan lingkungan sosial masih belum inklusif bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

R. Regulasi yang berlebih dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah

Dampak dari situasi ini adalah munculnya banyak uji materi dalam hukum, yang menghasilkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis dan masyarakat secara umum. Kondisi tersebut berasal dari berbagai faktor, termasuk masih adanya kecenderungan kuat pada sudut pandang sektor, penyebaran kewenangan pengaturan yang tidak terkoordinasi, kurangnya pengawasan terhadap dampak pelaksanaan regulasi, kekurangan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor regulasi, dan kurangnya partisipasi yang efektif dalam proses perumusan regulasi.



S. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif

Penguraian birokrasi menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berbagai organisasi di berbagai sektor, serta mendorong terjadinya ego sektoral yang terus berlanjut. Fragmentasi di lembaga-lembaga pemerintah juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam kerangka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemecahan struktur birokrasi menciptakan situasi di mana tugas dan fungsi organisasi di berbagai sektor saling tumpang tindih, menciptakan ego sektoral yang berlanjut. Fragmentasi di dalam lembaga pemerintah juga terkait dengan cara kewenangan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan yang ada.

T. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif

Walaupun setiap kementerian/lembaga memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang sudah diatur dalam peraturan perundangan, namun dalam realitasnya, seringkali terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dan ketidaksempurnaan efisiensi

U. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D

Keadaan ini menghambat proses suksesi dalam pengisian jabatan strategis di instansi pemerintah, menyebabkan ketidakmampuan untuk mengoptimalkan potensi individu yang paling berbakat. Hal ini mengakibatkan penurunan kinerja dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), memperkuat pemisahan



mentalitas antar unit kerja, dan mengurangi budaya serta semangat kerja. Sistem penghargaan yang berbasis pada kinerja ASN juga belum terwujud, dan hal ini tercermin dalam disparitas atau kesenjangan dalam penghasilan ASN di berbagai instansi, yang membuat sulit untuk mempertahankan ASN berbakat yang terbaik.

V. ASN berada dalam posisi rentan intervensi politik

Dalam konteks birokrasi, khususnya di tingkat pemerintah daerah, permasalahan ini timbul karena kepala daerah memegang peran sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, dan pemberhentian aparatur sipil negara (ASN). Selama periode 2020-2022, terdapat 1.703 pengaduan terkait pelanggaran netralitas ASN. Terkait dengan kasus korupsi, aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat dari lingkungan eksekutif terlibat dalam 371 kasus korupsi, atau sekitar 38,1 persen dari total 1.165 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2003-2022.

W. Belum meratanya kualitas pelayanan publik

Penerapan standar pelayanan publik masih belum konsisten, menyebabkan kerumitan dalam prosedur pelayanan, ketidakpastian dalam waktu pelayanan, dan masih terjadinya praktik pungutan ilegal. Selain itu, proses digitalisasi pelayanan publik terkendala oleh pembangunan infrastruktur digital yang belum merata, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan kurangnya interoperabilitas data dan layanan yang masih belum terwujud.

X. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat



Situasinya dapat dilihat melalui masih adanya tantangan dalam tata kelola, termasuk masalah kelembagaan, proses bisnis, dan regulasi di berbagai sektor strategis. Hal ini mencerminkan adanya permasalahan yang perlu diatasi dalam mengelola berbagai aspek terkait kelembagaan, proses bisnis, dan regulasi di berbagai bidang strategis. Diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengatasi isu-isu ini guna mendukung perkembangan berkelanjutan.

Y. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar

Disparitas dalam infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi antar wilayah, terutama kesenjangan antara kota dan desa yang signifikan, serta rendahnya tingkat literasi digital, menjadi permasalahan yang masih ada. Tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata. Digitalisasi pemerintahan juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk tata kelola yang baik, keamanan siber, integrasi data dan informasi yang masih terbatas, serta tingkat literasi digital yang rendah.

Z. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik

Banyaknya kader yang menghadapi masalah hukum, melanggar kode etik, dan kesulitan dalam mencari calon pemimpin dan anggota legislatif menjadi isu yang signifikan. Selain itu, pengelolaan keuangan partai politik yang belum transparan dan tidak akuntabel, serta kurangnya pendanaan dari negara, berdampak pada munculnya praktik politik uang, perilaku koruptif, dan ketidakmandirian partai politik. Perlu adanya langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini dan



meningkatkan integritas serta kemandirian partai politik dalam sistem demokrasi.

AA. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal

Situasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan dalam aparatur sipil di tingkat nasional dan daerah, keterbatasan kemampuan keuangan, serta kurang kondusifnya lingkungan bagi partisipasi masyarakat sipil.

BB. Prinsip keterbukaan pemerintah belum seenuhnya taerarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan

Ketidakadaan mekanisme ko-kreasi antara pemerintah dan masyarakat telah mengakibatkan partisipasi masyarakat belum optimal, terutama dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk mencapai perubahan menyeluruh, baik di tingkat nasional maupun daerah, diperlukan fondasi yang kuat, termasuk penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan diplomasi yang tangguh sebagai faktor pendukung.

CC. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan

Disamping itu, pemulihan aset dari tindak pidana masih belum optimal, potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih tinggi, dan pengawasan terhadap institusi penegak hukum, baik dari dalam maupun luar, masih kurang kuat. Selain itu, budaya masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah, dan hal ini juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian dalam bidang hukum.



DD. Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan

Situasi ini menghasilkan praktik politik uang, kekurangan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, ketidaktransparanan dalam penggunaan dana publik, kinerja yang belum optimal dari sistem pemilu dan kebebasan pers, serta kurangnya kebebasan sipil dan peningkatan perilaku diskriminatif serta intoleransi. Selain itu, kepercayaan dan partisipasi masyarakat masih memerlukan peningkatan terus-menerus.

EE. Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan

Sementara itu, kekuatan daya gentar pertahanan di kawasan masih belum terbangun, dan ketergantungan terhadap alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari luar negeri tetap sangat tinggi. Tantangan lainnya melibatkan perkuatan tata kelola dan kelembagaan keamanan nasional, peningkatan jenis kejahatan baru yang menggunakan teknologi tinggi, kelemahan keamanan siber, dan masih tingginya tingkat gangguan keamanan serta pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan.

FF. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global, sehingga perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan

Tantangan dalam kebijakan fiskal melibatkan beberapa aspek, seperti rendahnya penerimaan negara, terutama dari perpajakan yang tercermin dari rasio pajak hanya sebesar 10,4 persen dari PDB pada tahun 2022. Angka ini jauh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 15,7 persen dan



rata-rata negara maju yang mencapai 20,9 persen pada tahun 2021. Kualitas dan rasio belanja negara terhadap PDB juga masih rendah, hanya sekitar 15,8 persen pada tahun 2022, yang tertinggal jauh dibandingkan dengan negara seperti Thailand (18,3 persen, 2022) dan Filipina (21,9 persen, 2022). Kondisi fiskal yang terbatas, bersama dengan kualitas belanja yang belum optimal, mengakibatkan keterbatasan peran fiskal sebagai stimulus pembangunan. Di sisi kebijakan moneter, tantangan melibatkan menjaga stabilitas harga di tengah volatilitas harga komoditas global, terutama pangan dan energi, serta risiko ketidakpastian ekonomi dan politik global. Kondisi ini dapat memicu peningkatan risiko tekanan inflasi dan nilai tukar, yang memaksa kebijakan moneter untuk lebih ketat guna menanggulangi risiko ketidakstabilan harga domestik.

GG. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat

Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2021 mencapai 51,90. Namun, budaya literasi, kreativitas, dan inovasi masih belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat disparitas kemampuan literasi antarwilayah, dan meskipun akses penduduk terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus meningkat, kemampuan dalam memilah informasi tidak selalu sejalan. Peran dan fungsi keluarga juga belum mencapai tingkat optimal, terlihat dari Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang hanya mencapai 58,49 pada tahun 2022. Pemenuhan hak dan perlindungan



anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia juga masih belum optimal. Terkait keagamaan, kebebasan beragama belum didukung dengan kemampuan literasi, dan penghormatan terhadap keragaman agama dan kebudayaan masih lemah, sebagaimana terlihat dari Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 73,09 pada tahun 2022. Selain itu, ketimpangan gender masih tinggi, tercermin dari Indeks Ketimpangan Gender yang mencapai 0,458 pada tahun 2022. Perlu diperhatikan pula bahwa keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan masih menjadi tantangan.

HH. Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan

Tingkat bencana hidrometeorologi yang mencapai 95 persen dari total 3.207 kejadian bencana pada tahun 2022 menjadi perhatian serius. Mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan penanganan pasca bencana masih kurang efektif. Sementara itu, pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum mencapai tingkat optimal. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air juga menjadi masalah di berbagai wilayah. Meskipun pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dimulai pada tahun 1999 telah memberikan hasil yang cukup signifikan, tantangan terkait bencana dan lingkungan masih menjadi fokus utama.

II. Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi

Pada tahun 2022, kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) meningkat menjadi 20,6 persen dari 18,8 persen pada tahun 2000. Jumlah daerah tertinggal pada tahun 2020



mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu hanya 62 kabupaten dibandingkan dengan 122 kabupaten pada tahun 2015. Meskipun begitu, pembangunan masih cenderung terpusat di Pulau Jawa (Java-centric), dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap tingkat nasional mencapai 57,8 persen pada tahun 2022. Tingginya ketimpangan, terutama antarwilayah, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan distribusinya yang belum merata di seluruh Indonesia, infrastruktur yang belum memadai di wilayah-wilayah tertinggal, khususnya di bagian timur Indonesia, serta keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan suboptimalnya pemanfaatan anggaran. Keadaan ini menyebabkan minimnya minat investasi di luar Pulau Jawa, terutama di Kawasan Timur Indonesia. Tantangan lainnya termasuk permasalahan pertanahan yang masih tinggi, keterbatasan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang tersedia, produktivitas perkotaan yang rendah akibat desain kota yang tidak optimal, serta risiko bencana yang tinggi dan lemahnya tata kelola kebencanaan.

JJ. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh dibawah kebutuhannya

Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dasar pelayanan, serta memperkuat integrasi nasional. Beberapa proyek besar infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, pembangkit listrik dan jaringannya, waduk, irigasi



pertanian, serta infrastruktur dasar dan perumahan, sedang atau telah diselesaikan di berbagai wilayah. Pemerintah juga telah menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Meskipun terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi, seperti lemahnya kelola tata dan koordinasi antarlembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang sudah dibangun, serta belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga belum memberikan dampak ekonomi dan sosial yang maksimal bagi masyarakat. Dalam mengatasi kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar antara Jawa dan luar Jawa, beberapa tantangan utama termasuk belum terpenuhinya kebutuhan akan hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman serta berkelanjutan, tingginya jumlah rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dan ketidakberdayaan prasarana dasar terhadap bencana.

KK. Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal

Konektivitas *hinterland* (intra pulau), yang melibatkan jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai, masih memerlukan peningkatan. Tantangan lainnya termasuk keterbatasan sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan dan kota, rendahnya jangkauan jaringan serat optik yang menjadi tulang punggung layanan digital berkualitas, dan ketidakmerataan



jangkauan jaringan internet seluler, terutama di pedesaan dan Kawasan Timur Indonesia. Kesenambungan pembangunan menjadi kunci penting dalam menjaga konsistensi antara satu masa pemerintahan dengan periode pemerintahan berikutnya, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan.

LL. Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang

Instrumen pengamanan (*safeguarding*) dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Penerapan manajemen risiko dalam pembangunan nasional masih belum optimal, dan komunikasi publik untuk membangun kepemilikan dan partisipasi pemangku kepentingan belum terjamin dengan baik. Diperlukan perbaikan dalam pengembangan instrumen pengamanan, optimalisasi manajemen risiko, serta peningkatan komunikasi publik agar pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan melibatkan secara lebih baik semua pihak yang terlibat.

MM. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah serta non publik masih terbatas

Dalam konteks pembiayaan pembangunan, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi, antara lain lambatnya perkembangan inovasi dalam pembiayaan pembangunan, tingginya biaya pendanaan, keterbatasan sektor keuangan (terutama dalam basis sumber pendanaan



dan peran sektor keuangan non-bank, seperti dana pensiun, asuransi, dan pasar modal), serta belum optimalnya fungsi intermediasi dan inklusi keuangan. Inklusi keuangan baru mencapai 85,10 persen pada tahun 2022. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat sistem pembiayaan pembangunan agar lebih efisien dan inklusif.

3.2.3 Isu Provinsi

Isu strategis regional didasarkan pada hasil penelaahan isu strategis tematik pulau pada dokumen Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan isu strategis pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Jawa Timur, antara lain :

Isu dan Potensi Kewilayahan Pulau Jawa yang tertuang pada dokumen Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

1. Isu utama ekonomi wilayah Jawa
 - Padatnya jumlah penduduk menyebabkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya tenaga kerja informal dan pengangguran;
 - Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri;
 - Permasalahan banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh di wilayah metropolitan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi
2. Isu utama sosial wilayah Jawa
 - Masih terbatasnya perkembangan Sumber Daya Manusia di wilayah Jawa karena masih terbatasnya belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan dasar;



- Tingkat kemiskinan beberapa provinsi di Pulau Jawa masih di atas rata-rata nasional;
 - Provinsi di Wilayah Jawa masuk dalam 5 (lima) provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi secara nasional karena ketatnya persaingan pencari kerja di perkotaan, kualifikasi lulusan sekolah kejuruan dan vokasi belum sesuai dengan kebutuhan industri
3. Isu utama Sarana dan Prasarana wilayah Jawa
- Produksi tenaga listrik didominasi oleh sumber energi fosil;
 - Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan - Kebutuhan untuk air baku dan irigasi masih terbatas; dan
 - Kebutuhan rumah tangga layak huni dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi
4. Isu utama terkait desentralisasi dan otonomi daerah wilayah Jawa
- Penegakan hukum
 - Antisipasi pembangunan perkotaan dan peningkatan pelayanannya untuk menghadapi perkiraan peningkatan persentase penduduk wilayah perkotaan
 - Kapasitas fiskal provinsi di Jawa sudah tinggi, terutama di wilayah barat dan timur.
5. Isu utama terkait Sosial Budaya dan Ekologi wilayah Jawa
- Masih rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat (baik sebagai pelaku/pendukung) dalam pertunjukkan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat;
 - Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas;
 - Masih tingginya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang Pembangunan;



- Masih rendahnya pengakuan dan penghormatan hak-hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia;
 - Penurunan kualitas lingkungan hidup, utamanya banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air; dan
 - Kondisi rawan bencana di pulau Jawa.
6. Sedangkan Isu Strategis yang tertuang pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur adalah :
- Peningkatan Daya Saing SDM;
 - Penurunan Angka Kemiskinan;
 - Disparitas Pembangunan Wilayah, Pesisir dan Kepulauan;
 - Penurunan daya dukung pangan dan air;
 - Penurunan resiko Bencana; dan
 - Belum optimalnya penataan dan pengendalian tata ruang;

3.2.4 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD

Adapun isu strategis dan prioritas berdasarkan KLHS yang ada di Kabupaten Blitar sebagai berikut:

1. Terancamnya sektor pertanian akibat minimnya usaha tani.
2. Ketimpangan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatnya jumlah pengangguran.
4. Penurunan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
5. Perubahan kuantitas dan kualitas sumber mata air yang tidak sesuai dengan standar baku mutu.
6. Minimnya upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui optimalisasi pelayanan pendidikan bagi masyarakat secara menyeluruh.

3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Blitar



Isu-isu strategis adalah situasi lokal yang mendesak atau isu-isu yang mempunyai dampak signifikan terhadap masyarakat selama dua puluh tahun ke depan sehingga perlu diperhatikan atau diprioritaskan dalam pembentukan pembangunan daerah. Isu strategis ini disusun dengan mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Blitar. Secara konseptual, isu-isu strategis berpotensi menjadi isu regional di masa depan, meskipun isu-isu tersebut bukan isu terkini. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai potensi daerah yang tidak dikelola dengan baik, yang jika dikelola dengan baik akan berpotensi menjadi modal pembangunan yang signifikan.

Sebagai upaya untuk mencapai visi dan pilar Pembangunan Indonesia 2045 maka ditetapkan isu strategis pembangunan jangka panjang. Adapun isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar sebagai berikut:

1. Penguatan Kemandirian Pangan serta Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Daerah melalui pengembangan agroindustri

Penguatan kemandirian pangan diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional dan daerah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk serta menjawab tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim. Kemandirian pangan harus didukung dengan sumber daya air yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, sebagai daerah dengan basis perekonomian pada sektor pertanian, maka upaya peningkatan produktivitas perlu diiringi dengan peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas, baik melalui hilirisasi, pengembangan inovasi dan penerapan teknologi, maupun penguatan sumber daya manusia di bidang pertanian (agroindustri), sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani. Hal ini juga selaras dengan Visi



Pembangunan Industri di Kabupaten Blitar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yaitu “Menuju Pembangunan Agroindustri yang Tangguh dan Mandiri”. Adapun industri unggulan yang ditetapkan dalam RPIK merupakan industri-industri yang memiliki hubungan erat dengan sektor pertanian terutama dalam hal penyediaan bahan baku, atau biasa disebut sebagai agroindustry. Terdapat 12 industri unggulan kabupaten Blitar, yaitu: (1) Industri Makanan dan Minuman; (2) Industri Tekstil dan Alas kaki; (3) Industri Furniture; (4) Industri Pengolahan Tembakau; (5) Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong; (6) Industri kayu, barang dari kayu, dan anyaman; (7) Industri Pengolahan Daging dan Susu; (8) Industri Pengolahan Kopi dan Kakao; (9) Industri Kimia dan Barang dari Kimia; (10) Industri Barang Galian Bukan Logam; (11) Industri Kertas dan Barang dari Kertas; dan (12) Industri Pengolahan Hasil Laut.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Manusia merupakan subyek dan obyek pembangunan. Sebagai salah satu modal pembangunan maka kualitas dan daya saingnya harus terus ditingkatkan, termasuk dengan melibatkan dunia usaha/industri dalam pengembangan vokasi, serta penguatan inovasi dan penguasaan adopsi teknologi.

3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Blitar masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung



lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung penguatan ekonomi daerah.

4. Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar

Pemenuhan kebutuhan layanan dasar, khususnya layanan pendidikan, kesehatan, perumahan serta peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penguatan Kapasitas Mitigasi Bencana

Potensi penurunan daya dukung dan daya tampung cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk maupun aktivitas perekonomian.

Perubahan iklim yang sudah mulai terjadi saat ini ditandai oleh semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis, diantaranya cadangan ketersediaan air yang semakin berkurang dan atau bahkan bisa menyebabkan kelebihan jumlah debit air pada waktu yang lain, serta kebakaran hutan dan lahan. Bencana-bencana hidrometeorologis tersebut berpotensi akan meningkat berdasarkan proyeksi perubahan iklim di masa mendatang, dan dapat berpengaruh pada ketahanan sumber daya air, pangan, dan energi. Berbagai tantangan tersebut membutuhkan langkah antisipasi lebih dini agar mampu beradaptasi dan melakukan mitigasi secara tepat.

6. Penguatan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik

Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas,



dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administrative, efisiensi terhadap regulasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan public, melalui perluasan dan penguatan implementasi teknologi informasi pada berbagai layanan serta didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor public.

7. Pelestarian Nilai Budaya dan Penguatan Stabilitas Wilayah

Pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan kepedulian sosial mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan sosial. Melalui pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan kepedulian sosial maka akan terbentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang madani. Selain itu, penanganan gangguan Trantibumlinmas juga menjadi salah satu upaya fundamental esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan stabil/kondusif, sehingga proses pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.





BAB - IV



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 VISI

Visi dan Misi pembangunan jangka panjang didasarkan pada permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah.

Otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola urusannya, namun harus tetap selaras, sinkron, dan terintegrasi dengan pemerintah di tingkat lebih tinggi, seperti Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan dokumen strategis jangka panjang (20 tahun) yang didalamnya memuat Visi, Misi, Arah Pembangunan, serta Arah Kebijakan Nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Sebagai upaya mencapai visi Indonesia 2045, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. RPJPN 2025-2045 menuangkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai acuan dan landasan bersama untuk mencapai visi Indonesia 2045, serta sebagai pedoman pemerintah daerah untuk memastikan konsistensi, kesinambungan, integrasi, dan kolaborasi antar daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebagai upaya untuk menyelaraskan antara Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Blitar dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka dilakukan telaah terhadap Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.



A. Visi-Misi Indonesia

Visi RPJPN 2025-2045: “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

Visi ini menjadi pedoman bagi seluruh Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam penyusunan Misi pembangunan jangka panjangnya.

Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah; (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Adapun Misi RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4. Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5. Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi
6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas



B. Visi-Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur

Visi RPJPD Jawa Timur 2025-2045:

“JAWA TIMUR BERAKHLAK, MAJU, MENDUNIA, DAN BERKELANJUTAN”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, Jawa Timur diharapkan menjadi provinsi yang memiliki karakter masyarakat yang berakhlak, maju, mampu bersaing secara kompetitif di pasar internasional dan mampu tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Pada Visi ini memiliki 4 (empat) pokok visi yang memiliki arti dan makna penting dalam menggambarkan cita-cita luhur masyarakat Jawa Timur di tahun 2045.

Rumusan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

1. Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan;
3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif;
4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan;
7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.



C. Visi-Misi Kabupaten Blitar

Berdasarkan pada hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka panjang di Kabupaten Blitar, maka dirumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 adalah:

“BLITAR KABUPATEN AGROINDUSTRO YANG MAJU, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, Kabupaten Blitar diharapkan menjadi kabupaten yang mampu bersaing secara kompetitif di pasar nasional dan internasional, dan mampu tumbuh dan memiliki peranan lebih besar di Jawa Timur, khususnya di sektor agro-industri dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Maju merupakan semangat bahwa Kabupaten Blitar harus mencapai kemajuan dari tahun ke tahun yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pokok, pendidikan yang berkualitas, jaminan sosial, kondusivitas wilayah, kesempatan yang merata dalam berbagai aspek kehidupan, akses terhadap layanan publik, kesempatan bekerja, maupun kesehatan.

Berdaya Saing artinya memiliki kemampuan untuk bersaing dan berkembang dalam berbagai aspek pembangunan, terciptanya stabilitas ekonomi makro kinerja sektor pertanian, perdagangan, dan industri yang kuat.

Berkelanjutan, mengandung makna bahwa pembangunan didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan kualitas hidup manusia.

Gambar 4.1 Keterkaitan antara Visi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Blitar



Dalam rangka menjaga keselarasan pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka perlu untuk dilakukan harmonisasi visi pembangunan beserta sasaran visi pembangunan yang terkandung pada masing-masing visi. Secara umum, nomenklatur visi pembangunan Kabupaten Blitar dapat dikatakan telah selaras dengan visi pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah diakomodirnya substansi pembangunan yang dimandatkan, khususnya pada aspek kemajuan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.

4.2 SASARAN VISI

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), maka visi RPJPD daerah harus selaras dengan Visi RPJPN. Mengacu pada gambar di atas diketahui bahwa telah terjadi keselarasan antara visi RPJPD dengan Visi RPJPN. Bentuk keselarasan sebagaimana dimaksud juga diwujudkan dengan pencapaian target Sasaran Utama Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar, dimana targetnya telah ditentukan oleh nasional sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1. Penyesuaian Visi Kabupaten Blitar dengan Visi Nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:.

Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Blitar

No	Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan Pendapatan Perkapita		
	a. PDRB per Kapita (ADHB; Rp. Juta)	33.36	183.48-200.16
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6.78 – 5.30	0.39 – 0.18
	b. Rasio Gini (Indeks)	0.3321- 0.2657	0.3300 – 0.2500
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah		
	a. Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	3.39	4
	b. Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	1.68	3.25
	c. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	14.99 - 16.04	17.98-19.15
4	Peningkatan Produktivitas & Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	a. Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	71.69 - 73.16	85.61
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4.47 – 3.97	2.72 – 1.72
5	Meningkatnya Daya Saing Daerah		
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	72.69	74.28
	b. Penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca (%)	-36.33	65.36

4.3 MISI

Misi merupakan formulasi umum mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi. Sebuah rumusan misi yang efektif membantu mengklarifikasi konsep visi yang ingin dicapai dan merinci langkah-langkah yang perlu diambil.



Rumusan misi memegang peran penting dalam memberikan struktur bagi tujuan, target, kebijakan, serta menetapkan jalur yang harus diikuti untuk mencapai visi. Dalam konteks mewujudkan visi tersebut, misi disusun berdasarkan rumusan visi, karena misi berfungsi sebagai penjelasan operasional konkret untuk merealisasikan visi tersebut. Berikut adalah misi untuk Dokumen RPPJD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045:

Misi I :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global

Misi ini bertujuan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Kabupaten Blitar yang unggul, berkarakter, dan memiliki daya saing yang kuat. Misi ini menekankan urgensi inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta dinamika dan tren global. SDM yang unggul harus memiliki kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan, dukungan pada riset dan pengembangan, dan penguatan kemampuan literasi digital akan menjadi landasan bagi terwujudnya SDM Kabupaten Blitar yang berdaya saing.

Misi II :

Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah

Sektor ekonomi dilandaskan pada upaya untuk mewujudkan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, berbasiskan pada potensi unggulan daerah serta didukung iklim usaha yang kondusif, infrastruktur dan kebijakan perekonomian yang inklusif.

Misi III :

Memantapkan Kualitas Infrastruktur dan Sarana-Prasarana yang berwawasan lingkungan serta Tangguh Bencana

Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang kegiatan perekonomian dan pembangunan Kabupaten Blitar. Namun dalam pembangunan dan pemanfaatannya harus



memperhatikan daya dukung lingkungan hidup agar tetap terjaga lingkungan hidup dari berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan juga mencakup penggunaan teknologi hijau, prinsip-prinsip daur ulang dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Misi IV:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif dan berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan, cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan, dan pelayanan public yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Misi V:

Mewujudkan Masyarakat yang Tenteram, Toleran, dan Berbudaya

Meminimalisir gangguan yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat melalui penguatan nilai-nilai agama dan budaya lokal serta perlindungan kepada seluruh masyarakat dari potensi gangguan keamanan ketertiban.



Tabel 4.2 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi terhadap Misi RPJPD

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan	Misi
1	Maju	Semangat bahwa Kabupaten Blitar harus mencapai kemajuan dari tahun ke tahun yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pokok, pendidikan yang berkualitas, jaminan sosial, kondusivitas wilayah, kesempatan yang merata dalam berbagai aspek kehidupan, akses terhadap layanan publik, kesempatan bekerja, maupun kesehatan.	<ul style="list-style-type: none">- Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif dan berkualitas- Mewujudkan masyarakat yang tenteram, toleran, dan berbudaya
2	Berdaya Saing	Memiliki kemampuan untuk bersaing dan berkembang dalam berbagai aspek pembangunan, terciptanya stabilitas ekonomi makro kinerja sektor pertanian, perdagangan, dan industri yang kuat	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing global- Mewujudkan transformasi ekonomi daerah



No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan	Misi
3	Berkelanjutan	Berkelanjutan memiliki makna komitmen untuk terus menjalankan pembangunan dan perbaikan di berbagai bidang. Pembangunan berkelanjutan secara fisik dengan mempertimbangkan aspek kualitas lingkungan hidup serta tata wilayah yang baik. Kualitas hidup masyarakat yang sejahtera dengan merata atas peningkatan pendidikan, kesehatan, pemukiman, serta fasilitas umum lainnya, melalui dukungan tata kelola pemerintahan yang baik.	- Meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan serta tangguh bencana



Tabel 4.3 Keterkaitan antara Misi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Blitar

		RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045	RPJPD Kabupaten Blitar 2025-2045	
No	Kelompok Agenda/ Misi	Agenda/ Misi		Misi	Misi	
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial		Mewujudkan Transformasi sosial dalam menunjang SDM berkelanjutan	Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing global	
2		Transformasi ekonomi		Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah	
3		Transformasi tata Kelola		Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif dan berkualitas	
4		Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia		Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tenteram, toleran, dan berbudaya
5			Ketahanan sosial budaya dan ekologi		Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	



6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan melalui	Memantapkan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan serta tangguh bencana
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	
8		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	



BAB - V



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Arah kebijakan merupakan landasan panduan bagi organisasi atau pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu di berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Dalam ranah pemerintahan, implementasi arah kebijakan melibatkan strategi dan tindakan konkret untuk merespons isu-isu masyarakat, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan melalui kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural. Arah kebijakan juga mencerminkan nilai-nilai dan visi pemerintah terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan hak asasi manusia. Sementara itu, sasaran pokok menjadi titik fokus utama bagi pemerintah daerah, baik di ranah pemerintahan yang menetapkan tujuan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pendidikan, pengurangan pengangguran, atau perbaikan akses layanan kesehatan. Sasaran pokok ini tidak hanya berperan sebagai pengukur keberhasilan, tetapi juga sebagai panduan operasional dan motivasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan pemahaman yang baik terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok, pemerintah daerah dapat bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

5.1 Arah Kebijakan

Rumusan Kerangka Kerja dalam melaksanakan misi RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 ditempuh melalui 4 (empat) tahapan dengan tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sejalan dengan pemantapan pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045.



Dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan daerah, maka arah kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah sebagai berikut:

5.1.1 Perkuatan Fondasi Transformasi

Perkuatan fondasi transformasi menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah Kabupaten Blitar, mencerminkan komitmen pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna mewujudkan transformasi yang berkelanjutan dan holistik. Fondasi transformasi ini mencakup pembenahan dalam sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan menciptakan struktur pembangunan yang inklusif dan berdaya tahan. Dalam konteks ekonomi, perkuatan fondasi transformasi melibatkan inovasi industri, pengembangan ekosistem bisnis yang kondusif, serta investasi dalam teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, di ranah sosial, fokus diberikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan kelompok rentan, dan penguatan jaringan sosial. Dalam aspek lingkungan, upaya ditempuh untuk menjaga keberlanjutan alam, mengurangi jejak karbon, dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Melalui perkuatan fondasi transformasi ini, diharapkan daerah mampu menghadapi tantangan global, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lingkungan yang memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar menegaskan bahwa perkuatan fondasi transformasi bukan hanya sebagai upaya mendesain masa depan yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai komitmen untuk memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan daerah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.



5.1.2 Akselerasi Transformasi

Akselerasi transformasi sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Blitar, mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempercepat perubahan positif dalam berbagai sektor. Pendekatan ini menekankan pada langkah-langkah strategis yang dapat menghasilkan dampak signifikan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, inovasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Di sektor ekonomi, akselerasi transformasi mencakup dorongan terhadap industri inovatif, pemberdayaan sektor digital, dan pemikiran kreatif dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, dalam konteks sosial, fokus diberikan pada percepatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Dalam aspek lingkungan, akselerasi transformasi melibatkan implementasi kebijakan pro-lingkungan dan keberlanjutan, dengan tujuan mengurangi dampak negatif dan mendorong praktik ramah lingkungan. Melalui akselerasi transformasi ini, pemerintah daerah berharap untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat, mengoptimalkan potensi daerah, dan meningkatkan daya saing. Akselerasi transformasi bukan hanya sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga sebagai strategi proaktif untuk membentuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh komunitas di wilayah tersebut.

5.1.3 Ekspansi Global

Ekspansi global sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Blitar, mencerminkan tekad pemerintah untuk terlibat secara aktif dalam pasar global dan memperluas dampak positifnya. Fokus pada ekspansi global mencakup berbagai langkah strategis, seperti meningkatkan daya saing ekonomi daerah di pasar internasional, menggali potensi



perdagangan internasional, dan memperkuat kolaborasi dengan mitra luar negeri. Di sektor ekonomi, ekspansi global mencakup peningkatan daya saing produk dan jasa lokal di pasar internasional, mendukung inovasi, dan memfasilitasi investasi asing. Dalam ranah sosial, prioritas diberikan pada peningkatan kerjasama internasional dalam pendidikan, budaya, dan pertukaran pengalaman untuk memperkaya wawasan masyarakat lokal. Sementara itu, aspek lingkungan mencakup kebijakan berkelanjutan yang mendukung tanggung jawab global terhadap isu-isu seperti perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Melalui ekspansi global, pemerintah daerah berharap untuk memperluas peluang ekonomi, meningkatkan keragaman budaya, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan internasional. Ekspansi global dianggap bukan hanya sebagai strategi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai langkah integral untuk memposisikan daerah sebagai pemain aktif dalam dinamika global, mendukung keberlanjutan dan daya saing yang berkelanjutan.

5.1.4 Perwujudan Indonesia Emas

Perwujudan Indonesia Emas sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Blitar, mencerminkan tekad pemerintah untuk mencapai kemajuan holistik dan berkelanjutan di seluruh sektor. Indonesia Emas melibatkan serangkaian upaya yang terintegrasi untuk menciptakan kondisi di mana ekonomi, sosial, dan lingkungan berkembang secara optimal. Di sektor ekonomi, ini mencakup upaya pemberdayaan industri, investasi dalam inovasi, dan peningkatan daya saing global. Dalam dimensi sosial, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pendidikan, dan menciptakan sistem kesehatan yang tangguh. Sementara itu, aspek lingkungan melibatkan kebijakan dan praktik berkelanjutan



untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Perwujudan Indonesia Emas tidak hanya bertujuan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, melibatkan partisipasi aktif warga, dan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan. Dengan demikian, Perwujudan Indonesia Emas bukan hanya sebagai target, melainkan sebagai visi menyeluruh yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan pembangunan di tingkat daerah.

Masing-masing tahapan tersebut dijelaskan pada Tabel berikut:



**Tabel 5.1 Tahapan Arah Kebijakan Kabupaten Blitar Tahun
2025-2045**

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Perkuatan fondasi transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Perwujudan Visi Kabupaten Blitar
Blitar Kabupaten Agro-Industri yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing global	Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan masyarakat	Percepatan peningkatan kualitas SDM yang merata	SDM Kabupaten Blitar yang sehat, cerdas, dan terpelajar	Penguatan SDM unggul dan berdaya saing global
	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah	Penguatan produktivitas tenaga kerja dan riset optimalisasi sumber daya alam	Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan pasar domestik maupun global	Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan pendapatan masyarakat tinggi
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif dan berkualitas	Penguatan kapasitas ASN, dan kelembagaan yang tepat fungsi	Mempercepat kolaborasi kelembagaan, didukung dengan ASN yang berkualitas	Kelembagaan yang terintegrasi dengan SDM yang kompetitif	Tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
	Memantapkan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan serta Tangguh bencana	Pemerataan infrastruktur dasar dan sarana prasarana daerah	Optimalisasi penggunaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana daerah	Peningkatan pengelolaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan	Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana yang ramah lingkungan
	Mewujudkan masyarakat yang tenteram, toleran, dan berbudaya	Mewujudkan ketahanan budaya dan sosial yang kuat sebagai landasan pembangunan	Akselerasi pelestarian budaya dan penguatan karakter masyarakat	Menguatkan ketangguhan budaya dan sosial masyarakat terhadap perubahan	Terwujudnya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi peradaban dunia berkelanjutan

5.2 Sasaran Pokok

Pada dasarnya, sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah untuk merumuskan visi dan misi yang dapat diukur pada akhir periode tahun ke-20. Sasaran tersebut menetapkan tujuan dari hasil pembangunan jangka panjang yang



diharapkan pada akhir tahun ke-20. Proses penetapan sasaran utama pembangunan jangka panjang di Kabupaten Blitar melibatkan tahapan yang didasarkan pada rencana pencapaian pembangunan setiap lima tahun. Sasaran pembangunan Kabupaten Blitar untuk periode 2025-2045 dibentuk dari serangkaian misi yang bertujuan mencapai kondisi yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Pembangunan di Kabupaten Blitar dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut:



Tabel 5.2 Arah Kebijakan Kabupaten Blitar 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Blitar Kabupaten Agroindustri yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing global	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;				
		Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;				
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;				
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;				
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;				
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;				
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting;				
		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan;				
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan Masyarakat.				
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);				
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan menengah;				
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi;				
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah;				
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan;				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah);				
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);				
		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik;				
		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan;				
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;				
		Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>); dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global.				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Beasiswa pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.				
		Penuntasan kemiskinan melalui satu sistem data terpadu dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi;				
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan				
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan				
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan				
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				
	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah	Pengembangan Kawasan Potensial Pertanian menuju Agro-Industri				
		Optimalisasi peran lembaga riset dan teknologi dalam pengembangan Agro-Industri				
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitas melalui ilmu /rekayasa /teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen,				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform;				
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian				
		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi berbasis organik (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya);				
		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;				
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis;				
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian;				
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		produk pertanian;				
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak;				
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/ teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i> ;				
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan;				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penyelesaian pembangunan pansela				
		Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi pertanian;				
		Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;				
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak;				
		Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi perikanan.				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif;				
		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan;				
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.				
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;				
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;				
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran),				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		penerapan teknologi dan kemitraan usaha;				
		Peningkatan produktivitas BUMD;				
		City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;				
		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;				
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif;				
		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha;				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;				
		Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah (industri pengolahan tembakau, industri bahan konstruksi, industri makanan dan minuman, industri <i>consumer goods & general manufactures</i> , industri kayu dan barang dari kayu, industri alat angkutan dan kendaraan;				
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor Agro-Industri dan sektor unggulan lainnya (a.l. jalan tol/jalan logistik, sarana dan prasarana perkeretaapian, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi);				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas Agro-Industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri;				
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.				
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif dan berkualitas	Penyelesaian pemindahan ibu kota Kabupaten;				
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;				
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;				
		Perkuatan pengendalian Pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;				
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;				
		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi;				
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;				
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Daerah.				
		Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah				
		Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR),				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		standar pelayanan, dsb.).				
		Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria				
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.				
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBU, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas Nasional				
	Memantapkan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan serta Tangguh bencana	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi;				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;				
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy;				
		Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas, penginputan data rumah tangga miskin yang belum berlistrik untuk pemasangan instalasi rumah dan sambungan rumah bagi rumah tangga miskin;				
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung berapi Kelud, gempa bumi, tsunami, banjir bandang dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi;				
		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.				
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan;				
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan;				
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya;				



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Mewujudkan masyarakat yang tenteram, toleran, dan berbudaya	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila;				
		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan				
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local				
		Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas				



**Tabel 5.2 Indikator Utama Pembangunan (IUP)
Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045**

No.	Indikator	Target Rankhir RPJPD	
		Baseline 2025	Target 2045
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,38	5
2	Indeks Risiko Bencana (IRB)	145,54	123,95-105,41
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,69	74,28
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	14,99-16,04	17,98-19,15
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,07-1,12	1,43-2,48
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,67-27,31	26,03-27,77
7	Realisasi Investasi (Trilyun Rp)	0,82	1,02
8	ICOR	5,75	4,99
9	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	9,78	0,54
10	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,45	80,62
11	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	39,07	6,3
12	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14,63	4,13
13	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,93	10,64
14	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,67	12,87
15	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	6,6	7,98
16	Tingkat Kemiskinan (%)	7,89-7,17	0,60 - 0,18
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,52 - 3,92	2,76 - 1,74
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	61,3	73,07
19	Persentase Desa Mandiri (%)	50,45	90,91
20	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,242-0,241	0,12 - 0,11



21	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	31,94	81,13
22	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	81	100
23	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1,82	78
24	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	73,67	92
25	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	n.a	100
26	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	27,5	100



BAB - VI



BAB VI

PENUTUP

Dalam rangka mengantisipasi kekosongan regulasi yang mengatur saat terjadinya transisi atas berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 ini dan petunjuk umum pelaksanaannya, maka perlu dirumuskan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Adapun muatan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

6.1 Pedoman Transisi

Pedoman Transisi memuat petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat dokumen RPJPD ini akan berakhir dan beralih pada dokumen RPJPD selanjutnya. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Blitar. Hal-hal yang perlu diatur antara lain sebagai berikut :

1. Bilamana terdapat permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada akhir periode RPJPD ini, agar dapatnya menjadi permasalahan pembangunan prioritas yang akan tertuang dalam RPJPD periode selanjutnya, sehingga dapat diselesaikan melalui Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dokumen perencanaan jangka Panjang yang akan datang.
2. Indikator Sasaran Pokok RPJPD merupakan alat ukur yang menandai keberhasilan berbagai aspek pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, jika karena suatu hal terjadi perubahan Indikator Sasaran Pokok, tetap dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi, namun cakupan pembangunannya harus tetap dipertahankan.



3. Berbagai target Indikator Sasaran Pokok yang belum tercapai pada periode RPJPD 2025-2045 akan dilakukan penyesuaian target pada periode RPJPD berikutnya.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar pada masa transisi periode tahun 2045- 2050 yang merupakan tahun pertama RPJPD periode 2045-2065 berfungsi untuk menjembatani agar Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan dokumen ini, diperlukan petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD secara efektif dan efisien. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tersebut bertujuan untuk mengelola sumberdaya pembangunan secara optimal serta dapat dilakukan pembagian peran secara tepat agar mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Adapun kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Blitar tahun 2025-2045 sebagai berikut;

1. Perangkat Daerah pengampu urusan Penunjang Perencanaan Daerah mengkoordinasi seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar memperhatikan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Limatahunan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD pada periode berkenaan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
2. Perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD selama periode perencanaan tahun 2025-2045 harus mengacu dan selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.



3. Target Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Target Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dokumen RPJMD pada periode berkenaan.
4. Sebagai upaya memastikan pencapaian target RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045, Perangkat Daerah pengampu perencanaan harus melaksanakan pengendalian dan evaluasi berdasarkan regulasi yang berlaku, untuk menghadapi perubahan baik lingkungan internal maupun eksternal.

6.3 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen RPJPD Kabupaten Blitar tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Sedangkan Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan melalui evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah dan pencapaian kinerja utama pembangunan daerah.

Pengendalian pembangunan diperlukan sinergi antar perangkat daerah sehingga diperlukan koordinasi yang intens lintas sektor dan internal perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan.



6.4 Mekanisme Perubahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJPD dapat dilakukan apabila;

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar.

Dalam hal perubahan yang mendasar antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau perubahan kebijakan nasional. Dalam rangka efektivitas perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.